KUASA GLOBALISASI DALAM SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Kapitalisasi, Liberalisasi, Privatisasi, & Komodifikasi Pendidikan

TEGUH TRIWIYANTO

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
UM
The Learning University

KUASA GLOBALISASI DALAM SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Kapitalisasi, Liberalisasi, Privatisasi, & Komodifikasi Pendidikan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KUASA GLOBALISASI DALAM SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Kapitalisasi, Liberalisasi, Privatisasi, & Komodifikasi Pendidikan

Teguh Triwiyanto

PENERBIT UM

Universitas Negeri Malang
Anggota IKAPI No. 059/JTI/89, Anggota APPTI No. 002.103.1.09.2019
Jl. Semarang 5 Malang, Kode Pos 65145
Telp. (0341) 562391, 551312 psw 1453

KUASA GLOBALISASI DALAM SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL - Kapitalisasi, Liberalisasi, Privatisasi & Komodifikasi Pendidikan

Penulis : Teguh Triwiyanto
Editor : Teguh Triwiyanto
Layout & Cover : Nia Windyaningrum
Cetakan : Pertama, 2023
Penerbit : Penerbit Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145
Telp. (0341) 562391
E-mail : penerbit@um.ac.id
Website : http://penerbit.um.ac.id

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

KREATOR	: Teguh Triwiyanto (penulis)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	: Kuasa Globalisasi Dalam Sistem Manajemen Pendidikan Nasional - Kapitalisasi, Liberalisasi, Privatisasi & Komodifikasi Pendidikan/ Teguh Triwiyanto
PUBLIKASI	: Malang: Universitas Negeri Malang, 2023
DESKRIPSI FISIK	: xii, 212 hlm; 15,5 x 23 cm

Anggota IKAPI No. 059/JTI/89
Anggota APPTI No. 002.103.1.09.2019

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Penyakit yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai coronavirus 2019 (covid-19), yang disebabkan oleh coronavirus 2 sindrom pernapasan akut (sars-CoV-2), ditetapkan menjadi pandemi pada 11 Maret 2020, memberikan banyak pelajaran, terutama bagaimana konektivitas antar wilayah dan negara menjadi sangat mudah, susul menyusul kemudian antar manusia. Transmisi yang begitu cepat di hampir seluruh dunia ini, juga membuktikan betapa cepatnya kontak antarmanusia melewati batas-batas teritorial nasionalisme-bangsa. Penanganan pandemi covid-19 dilakukan secara global, tarik menarik berbagai kepentingan tercermin dari produksi, distribusi, dan pengunaan vaksin. Kuasa tata kelola global tampak hadir dengan jelas pada bidang kesehatan saat penanganan pandemi covid-19 itu.

Imbas pandemi tersebut juga keras menghantam sektor pendidikan seluruh negara di dunia. Banyak negara kemudian menjadi sadar, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menjadi bukan sebuah investasi mahal untuk mengatasi ancaman terpotongnya satu generasi karena tidak memperoleh akses pendidikan karena berbagai pembatasan, maka praktik pembelajaran *online* dimaklumkan. Lagi-lagi negara-negara maju, pemegang arus struktural global, menjadi panglima melawan pandemi, termasuk pada sektor pendidikan.

Buku ini mengurai kuasa globalisasi dalam sistem manajemen pendidikan nasional kapitalisasi, liberalisasi, privatisasi & komodifikasi pendidikan. Pada bidang pendidikan *soft power* dapat melalui *hard power*, status quo dan peningkatan kekuatan, mengikuti tren globalisasi dan internasionalisasi di seluruh dunia. Interdependensi dan kompleksitas internasionalisasi pendidikan dalam tren globalisasi yang semakin berkembang di seluruh dunia, merupakan salah satu contoh yang sekarang tampak sekali. Hantaman keras pandemi covid-19 secara alamiah mendapatkan respon dari aktor-aktor globalisasi. Melalui mode globalisasi, yang menjadi garis kebijakan GATS, sektor pendidikan terus menggurita.

Terima kasih kepada sahabat Nyarwi Ahmad dari FISIPOL UGM, yang terus menerus rumahnya yang kondusif dijadikan markas episteme, bersama Mas Junaidin dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Mas Rohman-yang sekarang fokus menekuni studi terkait Mojokuto, dan Pak Slamet, serta kedamaian di ketinggian Kaliurang-dekat Merapi, buku ini hasil interaksi kami. Saya selalu merindukan suasana seperti ini, ritme kerja yang meledak-ledak, bahan pustaka tidak pernah kering, bersama-sama dengan diskusi kalian yang hangat: dari kelaparan di tengah-tengah malam (kemudian memesan melalui daring) dan pagi-pagi bercocok tanam sekitar rumah dengan bekal informasi dari berbagai kanal internet. Kami komunal di tengah globalisasi, masyarakat agraris dipinggiran peradaban kota. Buku ini saya persembahkan, untuk persahabatan hidup bersama-sama yang hangat dengan mereka.

Terima kasih dengan sangat tulus juga kepada keluarga, Hera Idris, istri penulis, Nevatera, Eikasia, dan Langit, anak-anak tercinta. Jika kita tidak membentuk anak-anak kita, mereka dibentuk oleh kekuatan luar yang tidak peduli dalam bentuk apa anak-anak kita, dengan mencintai mereka melebihi kemampuan mereka.

Syukur alhamdullilah semua bisa seperti ini karena ridlo, karunia, dan peluangNya. Kritik dan saran perbaikan dari pembaca sangat berarti untuk perbaikan di masa mendatang.

Salam pendidikan

Teguh Triwiyanto

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis vii
Daftar Isi ix
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xi

BAB 1 Globalisasi & Sistem Manajemen Pendidikan Nasional 1
BAB 2 *Cross Border Supply* Dampak & Penyikapannya 31
BAB 3 *Consumption Abroad* & Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi 53
BAB 4 *Commercial Presence* & Internasionalisasi Pendidikan 73
BAB 5 *Movement of Natural Persons* & Sistem Manajemen Pendidikan 97
BAB 6 Globalisasi & Kebijakan Sistem Manajemen Pendidikan Nasional 119
BAB 7 Respon Standardisasi Internasional 137
BAB 8 Situasi Global, Tamansiswa & Pergerakan Nasional 155

Daftar Rujukan 173
Penulis 211

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Berdasarkan Kelompok Kata Kunci ... 40
Tabel 2.2 Frekuensi Kata Kunci Berdasarkan Negara 44
Tabel 2.3 Faktor Memengaruhi Pengambilan Keputusan Strategis 47
Tabel 3.1 Indonesia dalam QS *World University Ranking* 2014-2019 56
Tabel 3.2 Indonesia dalam QS *Asia University Ranking* 2015-2018 56
Tabel 3.3 Klaster 1 Perguruan Tinggi Non-Vokasi Tahun 2020 58
Tabel 4.1 Rata-rata Biaya Sekolah Internasional 81
Tabel 4.2 Negara Asal & Tuan Rumah Terbesar 91
Tabel 5.1 Ringkasan Cakupan GATS Mode 4 100
Tabel 6.1 Model Kebijakan Nasional Pendidikan 128
Tabel 6.2 Indikator Kebijakan Nasional Pendidikan 130
Tabel 6.3 Bentuk Dukungan Pemerintah 133
Tabel 7.1 Pengangguran Terbuka 1988 – 2018 147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Sintetis Mode Pasokan 9
Gambar 2.1 Pertumbuhan Perdagangan Jasa 2021-2024 34
Gambar 3.1 Hubungan Antar Faktor Kepemimpinan Strategis 65
Gambar 4.1 Evolusi Pendidikan Menjadi Multinasional 90
Gambar 6.1 Dampak Globalisasi Berbagai Sektor 125

x

BAB 1
GLOBALISASI & SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Globalisasi tarik menarik dengan sistem pendidikan nasional. Satu pihak, sistem pendidikan nasional diupayakan untuk kepentingan rakyat banyak, sisi lainnya globalisasi tidak bisa dihindarkan, terus merangsek masuk. Ada implikasi positif, tetapi tidak dapat dihindarkan dampak negatif yang menyertainya. Pada sistem pendidikan, globalisasi membawa implikasi untuk kemajuan atau kemunduran masa depan sumber daya manusia karena tersingkir dari kompetisi.

Situasi global tiga tahun terakhir, gegap gempita kompetisi, sebagai dampak globalisasi, memang menurun tajam. Masa suram globalisasi terjadi pada saat pandemi Covid-19, integrasi ekonomi dan konektivitas menghadapi situasi suram. Setelah sebelumnya, sepanjang tahun 1980-1990-an termasuk di Indonesia, menjadi salah satu kunci pertumbuhan dan pembangunan, termasuk pendidikan.

Selama pandemi, berbagai isu terutama lingkungan dan perubahan iklim memang terus menguat. Globalisasi secara keseluruhan didorong untuk membantu memperbaiki degradasi lingkungan. Selain itu, globalisasi politik mestinya mampu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ada juga yang melakukan kritik, bahwa globalisasi ekonomi berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, berbagai forum dunia mendorong ekonomi global yang terintegrasi, kebijakan perdagangan dan kebijakan iklim untuk saling terkait erat.

Saat pandemi, semua negara menutup pintu rapat-rapat untuk berbagai mobilitas manusia. Tren globalisasi seperti memasuki senja kala. Globalisasi seperti memasuki tahap akhir sejarah. Awal tahun 2020, dunia menghadapi pandemi terburuk dalam satu abad, memicu salah satu tantangan global terbesar di zaman kita. Ketika Covid-19 menyebar ke seluruh negara, perdagangan barang dan jasa anjlok dengan kecepatan dramatis. Penurunan tajam dalam perjalanan dan transportasi menyebabkan perdagangan jasa mengalami penurunan yang lebih besar. Krisis juga memukul aliran modal. Hanya arus informasi digital yang melonjak, saat setiap orang bertukar interaksi langsung dengan antarmuka di layar. Pada bidang pendidikan, pembelajaran dilakukan secara daring, sekolah ditutup.

Tapi apakah situasinya sesuram itu, di masa mendatang. *DHL Global Connectedness Index* (2021) memberikan kabar baiknya, secara keseluruhan, globalisasi sedang pulih dari guncangan awal – dan jauh lebih kuat dari yang diperkirakan banyak orang. Perdagangan barang bangkit kembali dengan cepat pada pertengahan 2020 dan bahkan melampaui level sebelum pandemi pada akhir tahun. Awal 2021, volume perdagangan global mencatat rekor baru.

Perdagangan jasa selain perjalanan dan transportasi telah bertahan, dan perkiraan menyerukan pertumbuhan perdagangan (baik barang dan jasa) untuk melampaui PDB pada tahun 2021 dan 2022. Setelah anjlok pada awal pandemi, perdagangan barang dunia bangkit kembali ke atas level pra-pandemi sebelum akhir tahun 2020, dan mencatat rekor baru pada awal tahun 2021. Aliran modal pulih dengan cepat karena pasar keuangan stabil di awal pandemi, dan globalisasi informasi arus kembali ke tren pertumbuhan melambat sebelum pandemi. Hanya arus orang yang lambat untuk pulih, tetapi terlihat secercah harapan ketika perjalanan internasional mulai meningkat lagi.

Situasi global terkini, selain pandemi, ancaman perang semakin meluas juga menjadi titik muram globalisasi, setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. Situasi serba salah dialami Indonesia sebagai Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia. Altman & Bastian (2022) menyebutkan invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan babak baru prediksi bahwa akhir globalisasi sudah dekat, seperti yang kita lihat di awal pandemi Covid-19. Namun, arus lintas batas global telah pulih dengan kuat sejak awal pandemi. Dalam pandangan kami, perang kemungkinan akan mengurangi banyak jenis kegiatan bisnis internasional dan menyebabkan beberapa pergeseran dalam geografi mereka, tetapi itu tidak akan menyebabkan runtuhnya arus internasional.

Saat ini, globalisasi sangat terkait dengan berbagai isu yang jalin menjalin, terdapat kelompok yang diuntungkan, sebaliknya ada yang dirugikan dan terpinggirkan. *DHL Global Connectedness Index* (2021) mencatat berbagi isu tersebut diantaranya yaitu: globalisasi terbukti tangguh melalui krisis Covid-19, globalisasi belum memberi jalan untuk regionalisasi, perdagangan AS-China bangkit kembali di masa pandemi, negara termiskin di dunia tertinggal dalam

pemulihan globalisasi, dan keterhubungan global yang lebih kuat dapat mempercepat pemulihan dunia. Micklethwait & Wooldridge (2022) menyebutkan globalisasi merupakan fenomena saling ketergantungan universal bangsa-bangsa.

Sama seperti perdagangan, aliran modal internasional juga anjlok pada awal pandemi, dan juga telah pulih. Pada tahun 2020, arus investasi asing langsung (FDI), yang mencerminkan perusahaan membeli, membangun, atau menginvestasikan kembali dalam operasi di luar negeri turun di bawah $ 1 triliun untuk pertama kalinya sejak 2005. Arus orang internasional sangat dibatasi selama pandemi Covid-19, karena potensi mereka untuk menularkan virus dan variannya. Jumlah orang yang bepergian ke luar negeri turun 73% pada tahun 2020 dan masih turun 71% dibandingkan tingkat pra-pandemi pada tahun 2021. Pandemi membalikkan tiga dekade pertumbuhan perjalanan internasional, dan perang akan memperlambat pemulihan, terutama di Eropa.

Pengembangan sistem pendidikan nasional dibutuhkan karena, seperti yang dikatakan Hou & Cheng (2022) terdapat hubungan kuat antara globalisasi dan lokalitas reformasi pendidikan. Hubungan tersebut mencakup misi, nilai, peringkat akademik, dampak global, kekuatan yang digerakkan oleh pasar, tanggung jawab sosial, keunggulan, dan akuntabilitas.

Astomo (2021) mengatakan upaya serius pemerintah untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan globalisasi diwujudkan melalui pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, sehingga untuk mencegah kebijakan yang melanggar hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis. atas kebijakan tersebut terutama di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Lebih jauh, penelitian Kuhfeld et al., (2020) menunjukkan bahwa kemajuan akademik selama pandemi melambat sehingga siswa hanya menunjukkan 35 hingga 50 persen dari pencapaian yang biasanya mereka capai dalam matematika dan 60 hingga 68 persen dalam membaca. Kerugiannya tidak dialami secara seragam, dengan anak-anak dari lingkungan yang kekurangan sumber daya tertinggal di belakang rekan-rekan mereka yang lebih banyak sumber daya. Lembaga internasional Ipsos (2022) menyebutkan 5

masalah teratas memiliki urutan peringkat dari hasil survei persepsi globalnya: Covid-19 (33%), kemiskinan/ketidaksetaraan sosial (31%), pengangguran (29%), korupsi keuangan/politik (27%), kejahatan dan kekerasan (26%), 63% rata-rata mengatakan bahwa hal-hal di negara mereka menuju ke arah yang salah.

Olsen (2022) menyatakan memasuki tahun ketiga Covid-19, pada tahun 2022 ada kemungkinan negara-negara akan mengubah sistem pendidikan mereka atau sebagian besar membiarkan mereka apa adanya. Para pemimpin sistem pendidikan dapat saja bermain-main di sekitar tepi perubahan tetapi sebagian besar mencoba kembali ke "normal" prapandemi, atau akankah mereka mengambil keuntungan dari perpecahan global dalam status quo ini untuk menggantikan institusi dan pendekatan pendidikan kuno dengan perbaikan struktural yang signifikan?

Negara-negara memiliki kemungkinan akan mengubah sistem pendidikan mereka, dikatakan Schleicher (2020) bahwa pendanaan pemerintah untuk pendidikan sering berfluktuasi sebagai respons terhadap guncangan eksternal, karena pemerintah memprioritaskan ulang investasi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyebaran virus dapat memengaruhi ketersediaan pendanaan publik untuk pendidikan, karena pendapatan pajak menurun dan dana darurat disalurkan untuk mendukung peningkatan biaya perawatan kesehatan dan kesejahteraan.

Kompetisi global, anak kandung kapitalisme, tidak terelakkan membawa dampak di sektor pendidikan. Salah satunya yaitu internasionalisasi pendidikan yang mengarah kepada kapitalisasi, liberalisasi, privatisasi, dan komodifikasi pendidikan. Internasionalisasi pendidikan terwujud melalui empat formasi, yaitu *cross border supply, consumption abroad, commercial presence*, dan *movement of natural persons*. Empat formasi ini biasanya disebut sebagai mode dalam perdagangan jasa dunia.

Definisi perdagangan jasa di bawah GATS (*General Agreement Trade in Services*) adalah berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh empat formasi tersebut, tergantung pada keberadaan teritorial pemasok dan konsumen pada saat transaksi. Dampak mode globalisasi di sektor pendidikan yang tidak tertangani dengan baik, pada suatu negara dapat memunculkan simpang jalan sistem

manajemen pendidikan nasionalnya.

Simpang jalan di sini merupakan simpul dalam jaringan sistem pendidikan nasional, dimana dua atau lebih tujuan pendidikan bertemu, tetapi tujuan pendidikan mengalami berbagai macam konflik, tersumbat. Untuk mengendalikan konflik ini ditetapkan aturan guna menetapkan siapa yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk menggunakan persimpangan. Mengabaikan kepentingan rakyat, demi kuasa global, jangan dijadikan alasan mendahulukan. Mas'udi, Karim, & Tapiheru (2021) menyatakan pendefinisian tentang kekuasaan terus mengalami perkembangan, bukan hanya terkait dengan kemampuan si A untuk memengaruhi si B agar melakukan tindakan yang diinginkan si A, tetapi juga terkait dengan berbagai bentuk resistensi, baik bersifat manifes atau laten maupun aktif atau pasif atas otoritas dan kekuatan kontrol.

Berbagai perjanjian internasional, pengejawantahan mode globalisasi, menjadi ancaman serius bagi munculnya berbagai macam konflik pada sistem pendidikan nasional. Tantangan internasional dan keterbatasan nasional, keduanya mesti diletakkan untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan dokumen GATS, pengertian setiap mode globalisasi tersebut, yaitu Mode 1. *Cross border supply*, pengguna di negara A menerima layanan dari luar negeri melalui infrastruktur telekomunikasi atau posnya. Persediaan tersebut dapat mencakup konsultasi atau laporan riset pasar, saran tele-medis, pelatihan jarak jauh, atau gambar arsitektur; Mode 2. *Consumption abroad*, warga negara A telah pindah ke luar negeri sebagai turis, pelajar, atau pasien untuk mengkonsumsi layanan masing-masing; Mode 3. *Commercial presence*, layanan ini disediakan dalam A oleh afiliasi, anak perusahaan, atau kantor perwakilan yang didirikan secara lokal dari perusahaan asing yang dimiliki dan dikendalikan (bank, grup hotel, perusahaan konstruksi, dan lain-lain); dan Mode 4. *Movement of natural persons*, warga negara asing memberikan layanan dalam A sebagai pemasok independen (misal konsultan, pekerja kesehatan) atau karyawan pemasok layanan (misal perusahaan konsultan, rumah sakit, perusahaan konstruksi).

Di GATS, perdagangan jasa didefinisikan sebagai penyediaan layanan: (1) Dari wilayah salah satu anggota (WTO) ke dalam wilayah anggota lainnya; (2) Di wilayah salah satu anggota (WTO) hingga

konsumen layanan dari anggota lainnya; (3) Oleh pemasok layanan dari satu anggota (WTO), melalui keberadaan komersial di wilayah anggota lainnya; dan (4) Oleh pemasok layanan dari satu anggota (WTO), melalui kehadiran orang perseorangan dari anggota di wilayah anggota lain mana pun.

Kehadiran komersial dan kehadiran orang perseorangan, layanan mungkin dipasok ke ekonomi anggota A atau ekonomi lain. Orang perseorangan dari perekonomian anggota didefinisikan dalam paragraf (k) pasal XXVIII GATS sebagai warga negara dari perekonomian anggota tersebut atau orang perseorangan yang memiliki hak untuk tempat tinggal permanen dalam ekonomi anggota itu. Orang perseorangan yang bukan merupakan warga negara dari perekonomian anggota, tetapi merupakan penduduk tetap darinya, dapat dilindungi hanya jika perekonomian anggota yang bersangkutan tidak memiliki warga negara atau, tunduk pada kualifikasi tambahan dalam penerimaannya atau akses ke Pembentukan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia, setuju pada dasarnya perlakuan yang sama kepada penduduk tetap warga negara sehubungan dengan tindakan yang memengaruhi perdagangan jasa. Dalam pasal XXVIII (l), GATS mendefinisikan badan hukum sebagai badan hukum apa pun, benar-benar dibentuk atau diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk keuntungan atau sebaliknya, dan baik milik pribadi atau milik pemerintah, termasuk perusahaan, perwalian, kemitraan, usaha bersama, perseorangan.

Mode pasokan GATS ditentukan berdasarkan lokasi pemasok dan konsumen saat layanan disediakan, dengan mempertimbangkan kebangsaan atau asal mereka (lihat Gambar 1.1). Mode tersebut biasanya disebut sebagai: Tampilan sintetis dari mode pasokan.

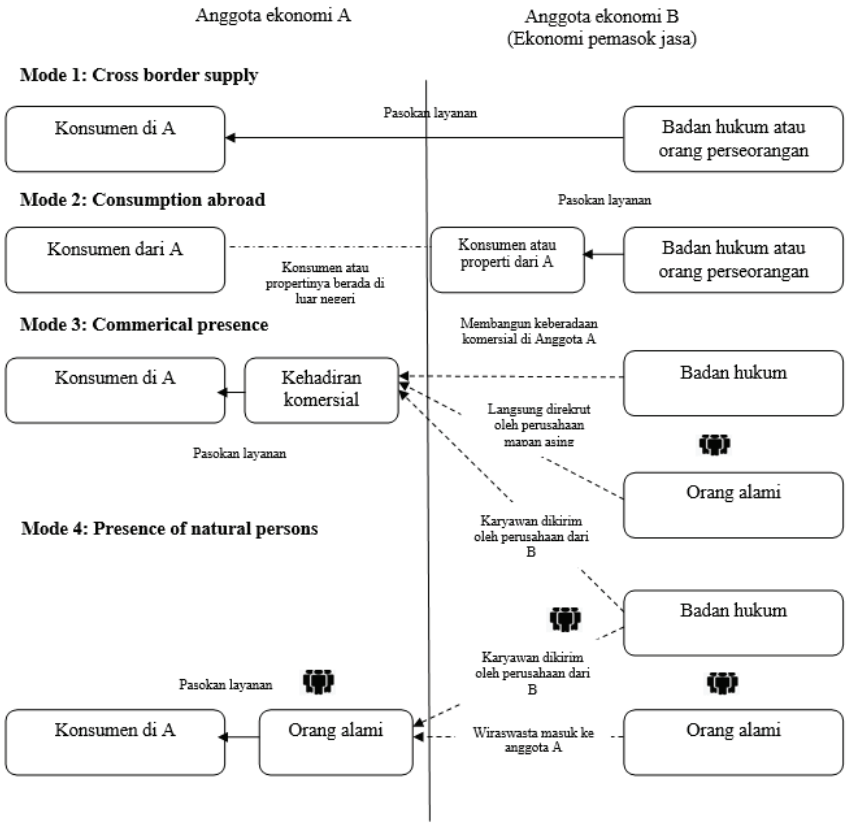

Gambar 1.1 Tampilan Sintetis Mode Pasokan

Awalnya dimulai dari program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO/*The World Trade Organization*). Organisasi pedagangan dunia ini merupakan satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. Intinya, perjanjian WTO, dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara dagang dunia dan diratifikasi dalam parlemen mereka. Tujuannya adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir menjalankan bisnis mereka. WTO berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sesuai dengan hasil Persetujuan Marrakesh, yang ditandatangani oleh 124 negara pada tanggal 15 April 1994. WTO merupakan organisasi internasional resmi yang memiliki kantor pusat di Jenewa, menyediakan sistem perdagangan multilateral

yang lebih kompleks meliputi tarif dan non tarif, serta barang *tangible* dan *intangible*. WTO menangani seperangkat perjanjian dalam suatu kesatuan dimana seluruh anggota berkomitmen dalam perjanjian tersebut. Struktur organisasi WTO tidak terikat pada peraturan-peraturan pemerintah dimana negara-negara bebas untuk menentukan tingkat perlindungan, lingkungan, kesehatan, serta tenaga-kerja yang sesuai bagi negaranya.

Sebelumnya, atas perintah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Ketenagakerjaan, GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah "pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan." Perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antarbangsa untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization* atau ITO). GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss, pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku hingga penandatanganan Perjanjian Putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 14 April 1994, yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Naskah asli GATT (GATT 1947) masih berlaku dalam kerangka kerja WTO, berdasarkan perubahan GATT 1994.

GATT merupakan serangkaian perjanjian antara anggota yang dilayani oleh sekertariat *ad hoc*. WTO memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada GATT. GATT hanya sebatas tentang tarif dan barang tangible. GATT terdiri dari banyak perjanjian dimana keanggotaannya terbatas pada beberapa negara saja. WTO dapat menjangkau area sensitif tertentu seperti agrikultur dan tekstil yang sebelumnya tidak begitu ditoleransi oleh GATT. Bentuk-bentuk GATT yaitu *Advantages*, berupa pengurangan tariff; *Favour*, mengizinkan ekspor barang tertentu yang semula dilarang, *Privilege*, pengecualian dari pajak; dan *Immunity*, pengecualian dari keharusan melakukan *health hazard test*. Kewajiban negara

untuk memberikan keuntungan keuntungan di atas *immediately* dan *unconditionally* pada produk sejenis dari semua negara.

Sementara itu, pembentukan GATS pada tahun 1986. Meskipun mencakup sebagian besar perdagangan internasional, tetapi itu bukan bagian dari GATT selama beberapa tahun. Tetapi keluhan dari perdagangan jasa tidak dapat diabaikan lama-lama dengan hasil bahwa GATS mulai berlaku pada 1995 di GATT babak Uruguay. Ketentuan GATS mirip dengan yang dari mitranya disebut GATT, tetapi sementara GATT berurusan dalam perdagangan barang (barang dagangan), ketentuan GATS berlaku pada perdagangan jasa. Saat ini, hampir semua anggota WTO juga adalah anggota GATS dan mengikuti pedoman yang dikeluarkan untuk negara-negara anggota.

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *Word Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Undang-undang tersebut menyatakan latar belakang Indonesia terlibat dalam WTO yaitu dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi perekonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah *General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Pebruari 1950.

Selain itu, disebutkan dalam undang-undang juga menyatakan bahwa manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk

menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan. Tidak kurang pentingnya adalah penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara, terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya.

Setelah lebih dari tujuh dasawarsa, keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional dampaknya semakin meluas dan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Tata pemerintahan diwarnai berbagai tema-tema yang mendorong tercapainya berbagai tujuan perjanjian pedagangan internasional tersebut. Berbagai industri diarahkan dan didorong memiliki komoditas yang dapat menjadi andalan untuk devisa negara. Berbagai pemberlakuan tatanan nilai yang baru pada satu pihak dimaksudkan alasan maraknya trend perdagangan bebas dan memacu bagi peningkatan kesejahteraan pelaku industri dengan melakukan ekspor sehingga berujung pada masuknya devisa, tetapi pada sisi lain kebijaksanaan ini memberikan dampak bagi industri. Nye (2007) menyatakan mekanisme institusi perdagangan internasional yang berlaku saat ini merupakan perwujudan dari aspek kedua dan ketiga dari *power*. Aspek pertama yaitu kemampuan untuk membuat pihak lain bertindak dalam cara-cara yang berbeda dari pilihan dan strategi awal mereka, sedangkan aspek kedua yaitu merupakan kerjasama yang membentuk sebagian dari *soft-power* – kemampuan untuk mendapatkan yang diinginkan dengan cara-cara kooperatif seperti membentuk agenda, bujukan, dan memunculkan daya tarik positif. Ahli teori politik Hannah Arendt (Volk, 2016:549) menyatakan bahwa *power* meningkat jauh ketika orang-orang bekerja sama, hal serupa berlaku pada negara. Negara dapat memiliki kekuatan global dengan menjalankan dan bekerjasama dengan negara lain.

Semakin penting bagi negara untuk mempromosikan legitimasi dan daya tariknya, namun semakin sulit bagi pemerintah untuk melakukannya dengan sukses di tengah kompetisi internasional yang semakin meningkat dari berbagai informasi dari aktor negara dan non-negara. Dalam konteks ini, Nye (2004:16) berpendapat bahwa varian baru politik internasional telah muncul, tidak semata-mata didasarkan pada 'kekuatan keras' insentif keuangan

atau kekuatan militer, tetapi lebih berfokus pada 'kekuatan lunak' manajemen reputasi. Negara melakukan *soft power* dengan mengadaptasi agenda internasional untuk membentuk preferensi dan perilaku orang lain sesuai dengan kepentingan strategisnya sendiri, misalnya dengan mendapatkan kekaguman dari orang lain melalui prestasi budaya, kinerja pendidikan atau keberhasilan olahraga.

Kompetisi internasional yang semakin meningkat memang tidak secara seimbang terjadi di antara banyak negara. Sunu (2020:17) menyatakan negara-negara maju menggunakan mekanisme perdagangan internasional untuk mendapatkan keuntungan melalui kerjasama dengan negara-negara berkembang. Serangkaian aturan yang dibuat dalam mekanisme perdagangan internasional yang berlaku pada saat ini lebih menguntungkan bagi negara-negara industri maju. Negara-negara berkembang kesulitan dalam mengejar ketertinggalannya dalam bidang industri manufaktur, bahkan pada bidang pertanian yang dikatakan merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, negara maju menggunakan berbagai cara untuk mencegah produk-produk pertanian dari negara-negara berkembang memasuki negaranya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional merupakan aspek kedua dari power, *soft-power*. Moak (2017) menyatakan perdagangan dan investasi internasional menghasilkan skala ekonomi atau pengurangan biaya melalui penggunaan sumber daya atau input yang tepat dan efisien.

Pada bidang pendidikan *soft power* dapat melalui *hard power*, status quo dan peningkatan kekuatan, mengikuti tren globalisasi dan internasionalisasi di seluruh dunia. Interdependensi dan kompleksitas internasionalisasi pendidikan tinggi dalam tren globalisasi yang semakin berkembang di seluruh dunia, merupakan salah satu contoh yang sekarang tampak sekali. Li (2018) menyatakan di era globalisasi kontemporer, pengetahuan selalu dianggap sebagai komoditas di seluruh dunia dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Perdebatan tentang globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi dalam beberapa dekade terakhir melibatkan dalam mengidentifikasi alasan dan tujuan pendidikan tinggi dalam konteks global. Baik internasionalisasi dan

globalisasi merupakan fenomena yang kompleks dengan tumpang tindih dan saling terkait.

Tumpang tindih dan saling terkait diantara globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi salah satunya menjadikan pendidikan sebagai magnet lintas negara. Nye (2005:14) berpendapat bahwa pendidikan tinggi dianggap sebagai jalur yang efektif untuk menarik siswa asing yang berbakat untuk mencari pendidikan tinggi yang berkualitas yang memengaruhi dan belajar dari siswa asing. Li (2018:19) menyatakan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sisi gelap globalisasi, menumbuhkan pemahaman mendalam tentang ide inti kekuasaan dan peran *soft power* memberikan keseimbangan yang lebih baik dan kinerja yang memadai dalam pendidikan tinggi. Menghadapi tren peningkatan globalisasi dan internasionalisasi, institusi pendidikan tinggi semakin menekankan pada mempromosikan perubahan sosial yang memfasilitasi dan mendorong transformasi untuk perubahan sosial. Mas'udi, Karim, & Tapiheru (2021) menyatakan instrumen dan arena kekuasaan mengalami perluasan, tidak hanya dalam bentuk organisasi dan relasi formal yang eksplisit, tetapi juga berada dalam ruang-ruang informal dan tidak selalu eksplisit yang menentukan pola relasi antaraktor dan agensi dalam struktur kekuasaan berbentuk dominasi dan hegemoni.

Saat ini, pendidikan, bersama dengan kualitas dan berbagai tingkat pengajarannya, digunakan sebagai sarana untuk mengejar kepentingan nasional di luar negeri, serta memengaruhi elit lokal, dan kadang-kadang bahkan pada populasi yang lebih besar. Tingkat dan kualitas pendidikan yang baik adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hubungan antar negara. Peran pendidikan dalam hal prestise internasional dan posisi masing-masing negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama karena perubahan besar dalam ekonomi global dan pergeseran nilai-nilai yang sesuai, nilai-nilai yang telah menjadi penting bagi modernisasi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan telah menjadi semakin penting, terutama karena semakin pentingnya pengetahuan di dunia global.

Seperti diungkap sebelumnya, berbeda dengan negara maju yang selalu diuntungkan, negara berkembang atau terbelakang

mengalami berbagai dampak yang kurang menguntungkan. Tella (2018:81) menyatakan ada literatur yang kuat tentang xenophobia di Afrika Selatan, akibat *soft power*. Selain itu, ada baru-baru ini, meskipun minat akademis Afrika Selatan masih minim. Namun, tidak ada perhatian telah diberikan pada peran aktual atau potensial dari pendidikan tinggi dalam proyeksi kekuatan lunak negara di hati dan pikiran dari luar biasa jumlah siswa internasional yang didaftar di lembaga pendidikan tinggi di negara itu. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dinyatakan bahwa xenophobia adalah perasaan benci, takut, waswas terhadap orang asing atau kebencian pada yang serba asing. Ketakutannya bisa meliputi ras, agama, suku, warna kulit, dan sebagainya.

Seperti xenophobia di Afrika Selatan, berapa negara juga menganggap pendidikan telah membentuk hegemoni negara maju terhadap negara berkembang, apalagi terbelakang. Sifat hegemoni global dalam pendidikan tinggi sering digambarkan sebagai dominasi paradigma Barat sebagai penindasan budaya dan pengetahuan asli dan sebagai neo-kolonialisme dalam pendidikan tinggi. Lo (2011:209) memberikan contoh pendidikan tinggi di Asia Timur, memperlihatkan ketidaksetaraan internasional dalam pendidikan tinggi dilihat dari perspektif anti-kolonial, bahwa peringkat universitas global yang muncul adalah sumber daya penting *soft power* yang memiliki potensi, sebagai alat tata kelola, untuk membentuk kembali lanskap pendidikan tinggi global, yang hegemonik.

Globalisasi membawa dampak yang besar terhadap sistem pendidikan nasional berbagai negara di dunia. Bieber & Martens (2011:101) menyatakan meskipun awalnya dibuat untuk tujuan ekonomi, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD/*Organisation for Economic Co-operation and Development*) semakin meningkat dalam kebijakan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang dianggap sebagai otoritas internasional di lapangan, terutama melalui Program untuk Penilaian Siswa Internasional (PISA/*Program for International Student Assessment*), yang sangat dihargai di banyak negara dan memungkinkan reformasi pendidikan domestik yang beragam. OECD memperoleh berbagai rekomendasi kebijakan dari hasil PISA.

Pendidikan semakin dianggap penting sebagai ukuran kemajuan dan kompetisi antar bangsa, oleh karena itu sistem pendidikan dilakukan upaya perbaikan terus menerus. Amirbek & Ydyrys (2014:504) menyatakan jumlah negara yang menganggap bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka di panggung dunia semakin meningkat. Terutama negara-negara besar mulai memberikan perhatian khusus dan pentingnya penggunaan pendidikan sebagai instrumen/sumber kekuatan lunak yang efektif. Juga, sistem pendidikan nasional yang sukses dapat membantu menciptakan citra yang lebih baik dan langgeng di antara khalayak internasional, sehingga semakin meningkatkan kekuatan lunak suatu negara.

Sistem manajemen pendidikan Indonesia tidak terkecuali, terkena dampak adanya berbagai mode globalisasi. Awalnya sistem manajemen pendidikan Indonesia, dikenal kemudian sebagai sistem pendidikan nasional, merupakan adaptasi ragam corak sistem pendidikan kaum penjajah. Melalui sistem pendidikan nasional dikembangkan sumber daya manusia untuk mencapai mutu ilmu dan teknologi yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Kecenderungan pengembangan ilmu dan teknologi global yang semakin kuat memperlihatkan adanya kesamaan persepsi dalam memilih bidang ilmu dan memberikan prioritas kepadanya. Prioritas yang diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan hampir sama karena tampaknya penguasaan bidang penting itulah yang akan memberikan peluang besar kepada mereka untuk tetap berada di garis terdepan dalam memajukan negara industrinya. Kekuatan negara-negara maju – hampir seluruhnya mereka merupakan pengerak utama arus liberalisme global – itu yang menjadikan negara dunia ketiga hanya sebagai negara industrialisasi pinggiran. Mas'oed (2002:2) menyebutkan, bahwa keadaan yang menjadikan negara dunia ketiga mengalami ketidakstabilan di tengah dominasi negara maju dikarenakan: pertama, penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global di bawah hegemoni kapital; kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat; dan ketiga, konsentrasi pemilikan uang dan kapital oleh Si Kaya dan Si Kuat.

Selain persoalan arus struktural globalisasi, negara-negara maju menjadikan ilmu dan teknologi sebagai kekuatan untuk menang bersaing terhadap negara dunia ketiga. Faktor kapital juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu dan teknologi. Penelitian dan pengembangan ilmu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, negara dunia ketiga sangat kesulitan mengadakan. Sementara kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi di negara maju didukung dengan dana yang sangat besar. Pusat-pusat kajian di negara-negara maju, tempat bersemainya ilmu dan pengetahuan, mendapatkan fasilitas sangat memadai dan kemudahan akses untuk mendapatkan materi-materi penelitian mereka dari negara dunia ketiga yang sangat lemah dalam hak paten. Negara-negara dunia ketiga sulit dalam hal akses materi-materi ilmu dan pengetahuan, karena negara-negara maju itu terlindungi paten.

Meskipun ada kemajuan di banyak bidang usaha manusia, tantangan dunia saat ini adalah yang terpenting. Tantangan dunia tersebut menjadikan banyak negara di dunia menjadi sadar untuk melakukan investasi yang memadai di bidang sumber daya manusia, pendidikan. Tinjauan tentang tren global utama terkait dengan sifat kegiatan dan fungsi pendidikan, sudah berapa waktu lamanya dilakukan. Salah satu badan PBB, UNESCO (1995) menunjukkan serangkaian proses bersamaan, kadang-kadang bertentangan, dari: demokratisasi, globalisasi, regionalisasi, polarisasi, marginalisasi dan fragmentasi. Sayangnya demokrasi yang berjalan relatif stabil, seperti juga di Indonesia, tidak berbuah kebebasan ekonomi, bahkan menguat liberalisasi ekonominya (Rode & Gwartney, 2012). Anderson (2002) mengatakan pergaulan antarbangsa yang sudah terjadi sejak lama, globalisasi menjadi jargon baru yang mengatasi bangsa-bangsa dalam tata pergaulan internasional, setelah keruntuhan sistem Bretton Woods awal tahun 1970-an. Bangsa atau nation, komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan benar-benar memasuki nasionalisme babak akhir.

Sektor pendidikan yang menjadi pusat pembangunan komponen sumber daya manusia, membutuhkan sistem kelembagaan yang baik, dan inovasi teknologi untuk menjadi daya saing di pasar liberal, yang merupakan tantangan dunia. Implikasi

tantangan dunia membawa tata kelola pendidikan nasional ke dalam persoalan yang benar-benar kabur, berada diantara batas-batas nasional. Terkait dengan penguasaan ilmu dan teknologi, Brooks & Normore (2010:52) menganggap penting kepemimpinan pendidikan dalam perspektif global. Bahwa dibutuhkan kepemimpinan pendidikan untuk melakukan eksplorasi bagaimana konsep globalisasi, integrasi yang berarti kekuatan lokal dan global, dapat membantu para pemimpin pendidikan menginformasikan dan meningkatkan pedagogi dan praktik mereka.

Perubahan tata kelola perekonomian dunia telah menyeret banyak negara termasuk Indonesia dalam pusaran liberalisasi sistem pendidikan. Fenomena liberalisme pendidikan tercermin mulai dari arah kebijakan dan sistem pendidikan nasional sampai dengan praksis pendidikan di ruang-ruang kelas. Sekolah – termasuk sekolah negeri – telah terjebak dalam arus persaingan bebas. Keluarga yang bisa membayar berbagai fasilitas tambahan memastikan anak-anak mereka memeroleh pendidikan bermutu di sekolah-sekolah unggulan sementara keluarga miskin hanya sanggup mengirim anak mereka di sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar minimal pendidikan. Sekolah yang mampu dan kuat menjadi makin unggul sementara sekolah dengan sumber daya minimal menjadi makin tersisihkan. Akibatnya, hak-hak anak miskin untuk mendapatkan pendidikan bermutu menjadi terabaikan.

Kebijakan pendidikan pemerintah dalam prosesnya sering tidak suci dari kepentingan. Hadiwitanto & Sterkens (2015:129) menyatakan perspektif liberal ditandai, pertama-tama, dengan desakan pada netralitas prosedural dan netralitas substantif. Netralitas prosedural berarti bahwa dalam menetapkan kebijakan, pemerintah tidak dapat bergantung pada definisi substantif tentang apa yang 'baik'. Secara positif, ini berarti bahwa setiap orang yang berkepentingan harus bersedia mendukung kebijakan yang ditetapkan, terlepas dari konsepsi mereka tentang 'kebaikan'. Netralitas substantif berarti bahwa tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk mempromosikan persepsi tertentu tentang apa saja yang 'baik', misalnya agama tertentu. Motala (2001:61) menyatakan bahwa perubahan diamanatkan positif pada kebijakan

dan peraturan perundang-undangan belum tentu menyebabkan perubahan pada tingkat sekolah.

Kebijakan pembangunan pendidikan mungkin memang tidak maksimal menyebabkan perubahan pada tingkat sekolah, situasi ini dapat dirasakan dengan bercermian pada berapa negara. World Bank (2011) menyatakan jumlah anak putus sekolah pada usia sekolah dasar turun dari 106 juta pada tahun 1999 menjadi 68 juta pada tahun 2008, badan PBB yang membawahi pendidikan, sains, dan kebudayaan (UNESCO) merilis tahun 2018 setidaknya ada 260 juta di Bumi ini tidak bisa bersekolah. Keuntungan dalam akses ke pendidikan telah mengalihkan perhatian pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pembelajaran. Belajar untuk Semua berarti memastikan bahwa semua siswa, bukan hanya yang paling istimewa, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat keterampilan dalam angkatan kerja memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik daripada tingkat sekolah rata-rata. Pendekatan sistem pendidikan berfokus pada mempromosikan akuntabilitas dan meningkatkan hasil. Bukti kuat menunjukkan bahwa pengalaman di tahun-tahun awal memiliki dampak mendalam pada perkembangan otak, memengaruhi pembelajaran, kesehatan, produktivitas orang dewasa, dan pada akhirnya, daya saing ekonomi negara. Tahun 2016 (World Bank, 2018), menyebutkan sebanyak 156 juta anak kecil menunjukkan kekurangan gizi kronis. Hanya setengah dari semua anak berusi 3-6 tahun yang memiliki akses ke prasekolah. Bank Dunia telah menjadikan investasi pada tahun-tahun awal sebagai masalah ekonomi sentral dengan bekerja sama dengan mitra untuk meningkatkan investasi ini di lebih dari 20 negara.

Dampak kebijakan pembangunan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia menjadi kajian yang menarik. Kajian tersebut dilakukan terkait demokratis untuk kebijakan pembangunan (Faust, 2010), kebijakan dan praktik pembiayaan pembangunan (Pickering, Davies & Prizzon, 2017), dan intervensi gabungan dari domain kebijakan yang berbeda (Magro & Wilson, 2018).

India menempuh kebijakan pembangunan pendidikan melalui: kesetaraan dan keadilan sosial, desentralisasi tata kelola pendidikan di semua tingkatan, pembentukan tatanan pendidikan partisipatif, penanaman nilai-nilai yang sangat diperlukan untuk penciptaan masyarakat yang tercerahkan dan manusia, dan pemberdayaan untuk bekerja. Cina melakukan kebijakan pendidikan melalui: perluasan akses ke promosi pendidikan berkualitas, alokasi anggaran negara adalah sumber utama dana untuk pendidikan, setiap guru di sekolah dasar dan menengah negeri harus mengambil tidak kurang dari 360 jam kelas pelatihan setiap lima tahun, membangun sistem pendaftaran informasi siswa berstandar nasional dan sistem informasi, dan mengembangkan prosedur standar untuk inspeksi dan penilaian kualitas.

Sekitar 700 sebelum masehi, orang Indonesia belajar membuat perunggu dan besi, dan mengolah padi basah. Perdagangan secara bertahap dikembangkan dengan Cina, India, dan orang-orang lain, agama Hindu dan Budha diperkenalkan kepada orang Indonesia. Dua negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi paling besar sejak 1973 adalah Cina dan India. Tahun 2000 sampai sekarang, Cina dan India menunjukkan tingkat intervensi negara yang kuat dalam pendidikan, selain keterlibatan yang sangat selektif dan strategis dengan ekonomi dan perdagangan bebas sambil menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sistem pendidikan Indonesia sangat besar dan beragam. Lebih dari 60 juta siswa dan hampir 4 juta guru di sekitar 340.000 lembaga pendidikan, ini adalah sistem pendidikan terbesar ketiga di kawasan Asia dan terbesar keempat di dunia (hanya di belakang Cina, India, dan Amerika Serikat).

Kemiskinan di berbagai pelosok Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kompetisi lembaga pendidikan dan antarnegara dengan semangat kapitalisme, yang berwujud liberalisasi pendidikan, menyeruak, dan menjadi kebijakan tidak yang terelakkan pemerintah. Seperti yang diungkapkan Webber (2015:87) bahwa kapitalisme sekarang, yang telah mendominasi kehidupan perekonomian, mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang membutuhkannya melalui proses *"survival of the fittest"* dalam bidang ekonomi. Darwin (2015:79) menyebutkan bahwa setiap variasi sekecil apapun di dunia setiap hari dan setiap

jam menawarkan kesempatan demi peningkatan setiap makhluk hidup melalui seleksi alam. Arkeologi pengetahuan yang terjadi di bilik-bilik kelas merupakan perwujudan liberalisasi pendidikan, yang tanpa disadari telah menjadikan interdepedensi yang tidak simetris antara negara maju dan negara berkembang. Masuknya ideologi trans-nasional bahkan bisa menganggu ketentraman hidup masyarakat di Indonesia.

Longgarnya sistem pendidikan nasional dalam menerima gelombang liberalisme menjadi peluang ideologi baru, tahun-tahun terakhir ancaman itu semakin tampak. Konflik-konflik horizontal di masyarakat dan vertikal antara masyarakat dengan negara merupakan tanda gamblang, bahwa muaranya terjadi karena perebutan dan penguasaan medan ekonomi. Pendidikan oleh Wahono (2000:2) secara lugas dikatakan, bahwa sebenarnya adalah wahana atau alat saja. Sebagai alat, pendidikan diabdikan kepada sebuah atau berapa tujuan. Dalam tujuan terkandung visi dan misi. Untuk mecapai tujuan itu oleh O'neil (2002:4) dikatakan mahfum terjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan lengkap dengan ideologinya. Kekuatan dan ideologi ini terjelma dalam sistem ekonomi pendidikan. Sistem ekonomi pendidikan ini berkaitan dengan sistem pembiayaan pendidikan. Sistem pembiayaan pendidikan yang terwujud dalam alokasi komponen pembiayaan pendidikan idealnya mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan. Desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, sumber daya sekolah, otonomi sekolah, dan hasil belajar siswa berada dalam pusaran sistem pembiayaan pendidikan tersebut.

Secara spesifik sistem desentralisasi pendidikan, terutama pada komponen tata kelola pembiayaan, memiliki dampak perluasan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, dan kemiskinan. Pembangunan pendidikan telah memukul balik tujuan-tujuan mulianya. Pukulan balik tersebut merupakan dampak dari pembiayaan pendidikan, yang oleh Todaro (1994:414) disebabkan karena sasaran pokok pembangunannya adalah memaksimalkan peningkatan angka pertumbuhan. Akibatnya, pengaruh pendidikan atas distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan absolut banyak diabaikan. Silang sengkarut sistem pembiayaan pendidikan di negara-negara sedang berkembang

justru meningkatkan dan bukannya menurunkan ketidakadilan pendapatan. Saling keterkaitan antara negara-negara lain juga memiliki implikasi terhadap krisis ini, terutama arus deras liberalisme dan munculnya teknologi-teknologi baru.

Jadi sistem pendidikan nasional sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sekarang mengahdaapi sejarah akhirnya karena globalisasi. Komponen-komponen pendidikan yaitu: peserta didik, tenaga kependidikan, pendidik, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, pendidikan berbasis masyarakat, standar nasional pendidikan, wajib belajar, kurikulum, pembelajaran, evaluasi pendidikan, akreditasi, sumber daya pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, masyarakat pemerintah pusat dan daerah, dan menteri. Kommponen-komponen tersebut saling terkait untuk mencerdaskan dan memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, sekarang digerakan dan didorong bergeser oleh globalisasi.

Secara umum kualitas pendidikan dipengaruhi oleh mutu proses pembelajaran dengan corak dan ragam nasional; sedangkan mutu proses pembelajaran ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen-komponen pendidikan yang disebutkan di atas merupakan penentu terhadap kualitas pendidikan. Jika komponen-komponen tersebut dapat dikelola secara baik maka berdampak terhadap mutu proses pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komponen-komponen pendidikan tersebut terwujud dalam sistem pendidikan nasional. Saat ini, globalisasi menjadi penentu mutu pendidikan nasional.

Memasuki masa-masa tahun 2000-an, kemiskinan di Indonesia memang menurun, tetapi tidak dengan pemerataan konsumsi, termasuk pendidikan. Miranti, Vidyattama, Yogi, Erick & Duncan (2013) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan absolut terus menurun selama masa desentralisasi walaupun pengurangan tersebut tidak sekuat sebelum krisis ekonomi Asia. Sebaliknya, ketidaksetaraan konsumsi meningkat pada periode yang sama. Pemerintah memang melakukan usaha untuk memperbaiki kondisi

siswa miskin melalui bantuan siswa miskin, sekaligus merupakan salah satu strategi implementasi kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa kecuali, dan memperlihatkan dampak positif. Suprastowo (2014) menyatakan terdapat kontribusi bantuan siswa miskin terhadap keberlangsungan sekolah yang terkait dengan angka putus sekolah, angka mengulang kelas, disiplin dan prestasi belajar serta keberlanjutan pendidikan. Tetapi terdapat unsur yang menghambat, seperti yang diungkapkan Masruri (2006) bahwa dewasa ini, praktik-praktik yang sentralistik dan seremonialistik dalam dunia pendidikan masih sering diterapkan sehingga pengekangan kreativitas tidak dapat dihindarkan. Sebagai akibatnya, substansi dan mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal, bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

Saat ini, ukuran kemiskinan ditinggalkan sebagai dampak pembangunan. Ukuran-ukuran kemiskinan nonmoneter juga semakin banyak digunakan — ukuran-ukuran seperti kematian bayi, harapan hidup, dan keaksaraan — dan hampir semua orang sekarang menerima bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang diadopsi oleh para pemimpin dunia dalam Deklarasi Milenium PBB pada September 2002, menunjukkan bagaimana ukuran pembangunan tersebut terima secara global, dan ini sekarang menjadi prinsip panduan bagi komunitas pembangunan internasional. Sustainable Development Goals (SDGs) atau disebut juga Global Goals dicanangkan oleh PBB secara resmi pada 25 September 2015. Konsep SDGs sendiri lahir pada Konferensi PBB Sustainable Developments Rio+20 pada Tahun 2012. SDGs sendiri lahir menggantikan MDGs (Millenium Development Goals) yang berakhir pada Tahun 2015. Ini semua adalah kelanjutan dari yang sudah dibangun MDGs. Ada 5 pondasi dari SDG yaitu (manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan).

Menyambut Sustainable Development Goals (SDGs), melalui visi pembangunan Indonesia 2045, pemerintah mencanangkan terget yaitu taraf pendidikan penduduk Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Strategi pembangunan pendidikan yang ditempuh melalui jalan kualitas

dan layanan pendidikan merata, peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan, profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah dan baca, dan pendidikan vokasi, enterprenuership, dan karakter. Strategi pembangunan tersebut menghadapi membentur krisis tata kelola pendidikan. Saat yang sama akses pendidikan yang adil dan merata menjadi sesuatu yang istimewa.

Kesempatan mendapatkan pendidikan secara adil dan merata selama tidak terjadi, walaupun sejak awal pemerintah berargumentasi bahwa ada pemberlakuan berbeda antara strata ekonomi. Masa kolonialisme segresi siswa terjadi antara anak Belanda, anak Belanda golongan rendah, dan pribumi, yang dikemudian hari mendapat kritik keras dari Van Deventer dalam majalah *De Gids* pada artikel berjudul *Hutang Kehormatan*. Saat ini, ada ketakutan masyarakat tidak mendapatkan mutu pendidikan yang memadai juga beralasan, sebab mutu pendidikan asing dianggap lebih baik. Alasan-alasan itu menjadikan stigma bahwa pendidikan bermutu hanya untuk kalangan dengan strata ekonomi atas dan sebaliknya bagi masyarakat dengan strata ekonomi menengah ke bawah, biarpun begitu pendidikan tetap menjadi magnet bagi masyarakat. Sekolah negeri yang selama ini dikenal sebagai pendidikan yang bisa dijangkau dan mutunya relatif baik, juga mulai menaikkan biaya pendidikan bagi siswa, dibandingkan dengan sekolah swasta.

Perbedaan kondisi tata kelola pendidikan antara sekolah negeri dan swasta memang sudah lama menjadi bahan pembicaraan yang menarik, terutama perhatian pemerintah yang sepertinya berat sebelah. Perhatian pemerintah kepada sekolah-sekolah negeri selama ini terkesan penuh, berkebalikan dengan perhatiannya kepada sekolah swasta. Di masa penjajahan pernah ada pembatasan sekolah partikelir (swasta), yang kemudian medapatkan perlawanan terhadap ordonansi sekolah liar ini. Semestinya saat ini pemerintah harus lebih bijak dalam memberikan perhatian. Sekolah-sekolah swasta secara nyata membantu pemerintah dalam mendidik generasi penerus bangsa. Banyak sekolah swasta memberikan akses pendidikan untuk penduduk miskin di Indonesia yang jumlahnya berdasarkan data BPS tahun 2018 sebanyak 2.567.458 orang.

Kemiskinan di berbagai pelosok Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kompetisi lembaga pendidikan dan antarnegara dengan semangat kapitalisme, yang berwujud liberalisasi pendidikan, menyeruak, dan menjadi kebijakan tidak yang terelakkan pemerintah. Seperti yang diungkapkan Webber (2015:87) bahwa kapitalisme sekarang, yang telah mendominasi kehidupan perekonomian, mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang membutuhkannya melalui proses *"survival of the fittest"* dalam bidang ekonomi. Darwin (2015:79) menyebutkan bahwa setiap variasi sekecil apapun di dunia setiap hari dan setiap jam menawarkan kesempatan demi peningkatan setiap makhluk hidup melalui seleksi alam. Arkeologi pengetahuan yang terjadi di bilik-bilik kelas merupakan perwujudan liberalisasi pendidikan, yang tanpa disadari telah menjadikan interdepedensi yang tidak simetris antara negara maju dan negara berkembang. Masuknya ideologi trans-nasional bahkan bisa menganggu ketentraman hidup masyarakat di Indonesia.

Longgarnya sistem pendidikan nasional dalam menerima gelombang liberalisme menjadi peluang ideologi baru, tahun-tahun terakhir ancaman itu semakin tampak. Konflik-konflik horizontal di masyarakat dan vertikal antara masyarakat dengan negara merupakan tanda gamblang, bahwa muaranya terjadi karena perebutan dan penguasaan medan ekonomi. Pendidikan oleh Wahono (2000:2) secara lugas dikatakan, bahwa sebenarnya adalah wahana atau alat saja. Sebagai alat, pendidikan diabdikan kepada sebuah atau berapa tujuan. Dalam tujuan terkandung visi dan misi. Untuk mecapai tujuan itu oleh O'neil (2002:4) dikatakan mahfum terjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan lengkap dengan ideologinya. Kekuatan dan ideologi ini terjelma dalam sistem ekonomi pendidikan. Sistem ekonomi pendidikan ini berkaitan dengan sistem pembiayaan pendidikan. Sistem pembiayaan pendidikan yang terwujud dalam alokasi komponen pembiayaan pendidikan idealnya mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan. Desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, sumber daya sekolah, otonomi sekolah, dan hasil belajar siswa berada dalam pusaran sistem pembiayaan pendidikan tersebut.

Secara spesifik sistem desentralisasi pendidikan, terutama pada komponen tata kelola pembiayaan, memiliki dampak perluasan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, dan kemiskinan. Pembangunan pendidikan telah memukul balik tujuan-tujuan mulianya. Pukulan balik tersebut merupakan dampak dari pembiayaan pendidikan, yang oleh Todaro (1994:414) disebabkan karena sasaran pokok pembangunannya adalah memaksimalkan peningkatan angka pertumbuhan. Akibatnya, pengaruh pendidikan atas distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan absolut banyak diabaikan. Silang sengkarut sistem pembiayaan pendidikan di negara-negara sedang berkembang justru meningkatkan dan bukannya menurunkan ketidakadilan pendapatan. Saling keterkaitan antara negara-negara lain juga memiliki implikasi terhadap krisis ini, terutama arus deras liberalisme dan munculnya teknologi-teknologi baru.

Teknologi baru – mikroelektronik, komputer, telekomunikasi, materi buatan, robotik, dan bioteknologi – saling berinteraksi secara sinergis untuk mendukung pembentukan masyarakat. Perubahan struktur ekonomi dunia, mau tidak mau menjadikan perkembangan sistem pendidikan Indonesia, terutama berkaitan pengembangan ilmu dan teknologi, tidak bisa melepaskan diri terhadap situasi itu. Kekuatan negara-negara maju benar-benar mendominasi negara-negara dunia ketiga. Pemusatan ekonomi oleh berapa negara maju tersebut merupakan kelanjutan dari proses globalisasi yang tidak bisa dilepaskan dari penguasaan ilmu dan teknologi negara-negara maju tersebut.

Kemajuan komputer dan teknologi komunikasi seperti sistem digital, teknologi satelit, fiber optics, dan kecerdasan buatan. Inovasi teknologi ini, berdampak spesifik pada aktivitas ekonomi. Pertama, menurun tajamnya biaya dan juga waktu yang dipakai untuk kegiatan transaksi dan kumunikasi. Sehingga, semakin banyak barang dan jasa yang disirkulasikan dan dikompetisikan dalam arus perdagangan internasional. Kedua, sistem komunikasi global memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional mengkoordinasikan kegiatan produksi dan operasi finansial mereka secara efektif menjangkau bidang luas antar negara. Meskipun perusahaan global bukanlah baru, tetapi berkat inovasi teknologi, semakin banyak perusahaan transnasional yang

beroperasi melintasi batas-batas antarnegara. Ketiga, informasi itu sendiri mulai dimodifikasikan: film, recorder, internet, kanal berita, jasa-jasa telekomunikasi, sistem, desain dan pemrograman software dan seterusnya menjadi sesuatu yang menjual (*tradable*). Keempat, kapital menjadi begitu cepat bergerak dalam bentuk uang, sehingga pada titik di mana ia bisa dikonversikan dalam bentuk aset-aset tetap.

Kecenderungan pengembangan ilmu dan teknologi global yang semakin kuat memperlihatkan adanya kesamaan persepsi dalam memilih bidang ilmu dan memberikan prioritas kepadanya. Prioritas yang diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan hampir sama karena tampaknya penguasaan bidang penting itulah yang akan memberikan peluang besar kepada mereka untuk tetap berada di garis terdepan dalam memajukan negara industrinya.

Di Indonesia, tata kelola pembiayaan pendidikan satu dasawarsa terakhir, terutama pasca pemberlakuan otonomi daerah, serangkaian kebijakan pembangunan pendidikan diterapkan seharusnya mengatasi kesenjangan pemerataan pendidikan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Namun kebijaksanaan pembangunan pendidikan tersebut ternyata belum mampu menanggulangi krisis utama kesenjangan pendidikan disebabkan penekanan berbeda antara asumsi pembangunan pendidikan dan kenyataan kondisi masyarakat. Salah pilih variabel pembiayaan pendidikan memberikan sumbangan terhadap terpuruknya mutu proses dan hasil pendidikan, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menentukan alokasinya. Variabel biaya pendidikan biasanya dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikaan, gaji/kesejahteraan guru dan pegawai, pengadaan prasarana pendidikan, pembinaan profesional, pengelolaan sekolah, pengadaan alat-alat pelajaran, pemeliharaan sarana pendidikan, dan pembinaan siswa.

Dasar, fungsi, dan prinsip pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menemukan batu pengahalang besanya, yaitu globalisasi. Sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab mendapatkan tekanan globalisasi. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, samar terlihat karena globalisasi.

Penyelenggaraan pendidikan nasional yang mengenal prinsip-prinsip penyelenggaraanya diterjang berbagai globalisasi dan variannya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan diatur dalam sistem pendidikan sebagai berikut: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Globalisasi yang hadir melalui internasionalisasi pendidikan terwujud melalui empat formasi, yaitu *cross border supply, consumption abroad, movement of natural persons,* dan *commercial presence*, seperti berujung simpang jalan pendidikan nasional, jika tidak dikelola dengan baik.

Jurang kehancuran yang menganga dapat menjungkalkan sistem pendidikan nasional masuk ke dalamnya, jika salah pada saat mengambil kebijakan di simpng jalan. Simpang jalan itu dalam bentuk: (1) Mendorong proses keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional,

yang juga tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada; (2) Kemampuan Indonesia untuk memilih untuk memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang; (3) Semakin penting memilih jalan bagi negara untuk mempromosikan legitimasi dan daya tariknya, namun semakin sulit bagi pemerintah untuk melakukannya dengan sukses di tengah kompetisi internasional yang semakin meningkat dari berbagai informasi dari aktor negara dan non-negara; (4) Varian baru politik internasional telah muncul, tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan keras insentif keuangan atau kekuatan militer, tetapi lebih berfokus pada kekuatan lunak manajemen reputasi. Sistem pendidikan nasional menjadi pendukung utamanya; (5) Negara melakukan soft power dengan mengadaptasi agenda internasional untuk membentuk preferensi dan perilaku orang lain sesuai dengan kepentingan strategisnya sendiri, misalnya melalui prestasi kinerja pendidikan; (6) Sistem pendidikan nasional mesti menjadikan pengetahuan selalu dianggap sebagai komoditas di seluruh dunia dalam ekonomi berbasis pengetahuan; (7) Perdebatan tentang globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi dalam beberapa dekade terakhir melibatkan dalam mengidentifikasi alasan dan tujuan pendidikan tinggi dalam konteks global. Baik internasionalisasi dan globalisasi merupakan fenomena yang kompleks dengan tumpang tindih dan saling terkait. Bahwa pendidikan tinggi dianggap sebagai jalur yang efektif untuk menarik siswa asing yang berbakat untuk mencari pendidikan tinggi yang berkualitas yang memengaruhi dan belajar dari siswa asing; (8) Saat ini, pendidikan, bersama dengan kualitas dan berbagai tingkat pengajarannya, digunakan sebagai sarana untuk mengejar kepentingan nasional di luar negeri, serta memengaruhi elit lokal, dan kadang-kadang bahkan pada populasi yang lebih besar; (9) Sistem pendidikan nasional mengantipasi , bahwa pendidikan telah membentuk hegemoni negara maju terhadap negara berkembang. Sifat hegemoni global dalam pendidikan tinggi sering digambarkan

sebagai dominasi paradigma Barat sebagai penindasan budaya dan pengetahuan asli dan sebagai neo-kolonialisme dalam pendidikan tinggi; (10) Pendidikan semakin dianggap penting sebagai ukuran kemajuan dan komotesi antar bangsa, oleh karena itu sistem pendidikan dilakukan upaya perbaikan terus menerus; (11) Sektor pendidikan yang menjadi pusat pembangunan komponen sumber daya manusia, membutuhkan sistem kelembagaan yang baik, dan inovasi teknologi untuk menjadi daya saing di pasar liberal, yang merupakan tantangan dunia. Implikasi tantangan dunia membawa tata kelola pendidikan nasional ke dalam persoalan yang benar-benar kabur, berada diantara batas-batas nasional; (12) Perubahan tata kelola perekonomian dunia telah menyeret banyak negara termasuk Indonesia dalam pusaran liberalisasi sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan pemerintah dalam prosesnya sering tidak suci dari kepentingan; (13) Kemiskinan di berbagai pelosok Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kompetisi lembaga pendidikan dan antarnegara dengan semangat kapitalisme, yang berwujud liberalisasi pendidikan, menyeruak, dan menjadi kebijakan tidak yang terelakkan pemerintah; (14) Longgarnya sistem pendidikan nasional dalam menerima gelombang liberalisme menjadi peluang ideologi baru; dan (15) dan sistem pendidikan nasional sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, menghadaapi sejarah akhirnya karena berbagai mode globalisasi, jika sikap dan simpang jalan yang diambil tidak mampu memilih dengan benar.

BAB 2
CROSS BORDER SUPPLY: DAMPAK & PENYIKAPANNYA

Globalisasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam sejarah peradaban manusia, yang membuat dunia semakin kecil dan semakin kecil dengan meningkatnya pertukaran barang, jasa, informasi, pengetahuan, dan budaya di antara berbagai negara. Globalisasi ini dianggap memberikan dampak positif, seperti yang diungkapkan Nilson (2010) bahwa globalisasi biasanya merujuk pada proses di mana ekonomi dan masyarakat yang berbeda menjadi lebih dekat. Milner & Rudra (2015) menyatakan selama beberapa dekade sekarang, negara-negara berkembang telah bergabung ekonominya dengan terjadi dampak peningkatan kesejahteraannya pada mayoritas.

Sisi lainnya, selama bertahun-tahun, globalisasi telah meningkatkan penularan penyakit global dan memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Globalisasi telah muncul sebagai sarana untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan budaya individu. Meningkatnya urbanisasi dan integrasi yang lebih erat dari ekonomi dunia telah memfasilitasi keterkaitan global. Penularan penyakit global, wabah pes yang disebabkan oleh *Yersinia pestis*, pandemi influenza tahun 1918, flu Asia tahun 1957, pandemi flu Hong Kong, dan sekarang pandemi Covid-19, memiliki implikasi ekonomi. Maret 2021, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendukung pembebasan sementara aturan bisnis terkait hak paten vaksin Covid-19, yang melindungi keuntungan dari produsen, memperlihatkan dominasi negara kaya atas negara miskin.

Siaran pers WTO menegaskan prospek pemulihan yang cepat dalam perdagangan dunia telah membaik karena perdagangan barang dagangan berkembang lebih cepat dari yang diharapkan pada paruh kedua tahun lalu. Menurut perkiraan baru dari WTO, volume perdagangan barang dagangan dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 8,0% pada tahun 2021 setelah turun 5,3% pada tahun 2020, melanjutkan reboundnya dari keruntuhan akibat pandemi yang mencapai titik terendah pada kuartal kedua tahun sebelumnya. Pertumbuhan perdagangan kemudian akan melambat menjadi 4,0% pada tahun 2022, dan efek pandemi akan terus dirasakan karena laju ekspansi ini masih akan membuat perdagangan di bawah tren pra-pandemi. Gambar 2.1 menunjukkan perubahan tahun-ke-tahun dalam perdagangan jasa komersial dunia menurut kategori utama. Untuk seluruh tahun

2020, layanan travel dan transport masing-masing turun 63% dan 19%. Sementara itu, kategori jasa komersial lainnya (termasuk jasa keuangan dan jasa komputer) bertahan cukup baik, hanya turun 2%. Akhirnya, jasa terkait barang turun 13%. Layanan transportasi dan perjalanan secara langsung dipengaruhi oleh tindakan penahanan yang dirancang untuk membatasi penyebaran covid-19, banyak di antaranya tetap ada atau telah diperketat sebagai tanggapan terhadap kebangkitan penyakit.

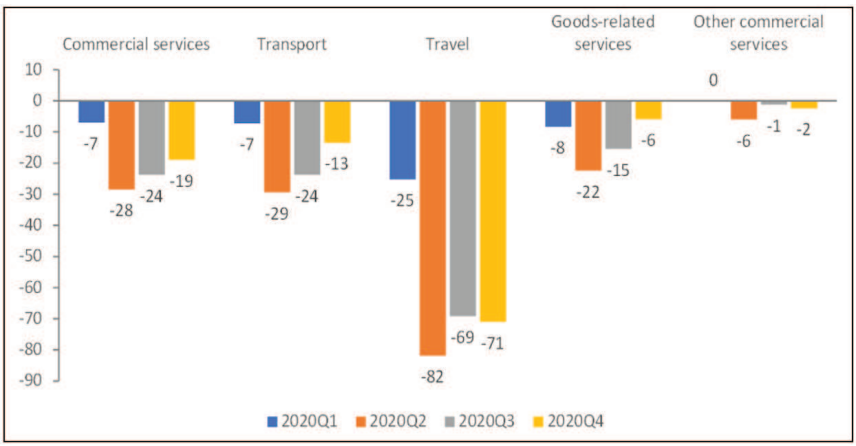

% perubahan nilai US $

Sumber: Perkiraan WTO-UNCTAD-ITC

Gambar 2.1. Pertumbuhan Perdagangan Jasa 2021-2024

Untuk para pendukungnya, globalisasi dipandang sebagai kekuatan yang tak tertahankan dan ramah untuk memberikan kemakmuran ekonomi bagi orang-orang di seluruh dunia. Sebaliknya untuk yang tidak mendukung, globalisasi disalahkan sebagai sumber dari semua persoalan kontemporer. Faktanya globalisasi memengaruhi ketimpangan antar negara, ketimpangan di dalam negara, dan globalisasi memengaruhi kemampuan pemerintah nasional untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan risiko di dalam negara. Stiglitz (2017) menyatakan kegagalan globalisasi dan reaksi sesat terhadapnya mengandung banyak pelajaran: tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pembelajaran dalam masyarakat, pentingnya penerimaan fakta bersama, konsekuensi berbahaya dari kesalahan informasi publik, dan kebodohan mengabaikan konsekuensi distribusi. Kekuatan

ekonomi hanya karena mereka dapat menyebabkan pertumbuhan diberbagai sektor.

Di kawasan Eropa globalisasi berintegrasi menjadi kawasan Masyarakat Ekonomi Eropa yang terintegrasi secara ekonomi dan geografis. Uni Eropa dibentuk dengan tujuan untuk mengakhiri perang yang sering dan berdarah antara tetangga, yang memuncak dalam Perang Dunia Kedua. Pada 1950, Komunitas Batubara dan Baja Eropa mulai menyatukan negara-negara Eropa secara ekonomi dan politik untuk mengamankan perdamaian abadi. Enam negara pendiri adalah Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Belanda. 1950-an didominasi oleh perang dingin antara timur dan barat. Protes di Hongaria terhadap rezim Komunis dijatuhkan oleh tank Soviet pada tahun 1956. Pada tahun 1957, Perjanjian Roma menciptakan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC/European Economic Community), atau 'Pasar Bersama'. Euro menjadi mata uang baru bagi banyak orang Eropa pada tahun 2000. Selama dekade ini semakin banyak negara mengadopsi Euro. Krisis ekonomi global melanda Eropa. UE membantu beberapa negara untuk menghadapi kesulitan mereka dan membentuk 'Serikat Perbankan' untuk memastikan bank yang lebih aman dan lebih dapat diandalkan. Pada 2012, Uni Eropa dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Kroasia menjadi anggota ke-28 UE pada 2013. Perubahan iklim masih menjadi agenda utama dan para pemimpin sepakat untuk mengurangi emisi berbahaya. Pemilihan Eropa diadakan pada tahun 2014 dan lebih banyak orang Eropa terpilih menjadi anggota Parlemen Eropa. Kebijakan keamanan baru dibuat setelah pencaplokan Krimea oleh Rusia. Ekstrimisme agama meningkat di Timur Tengah dan berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, yang menyebabkan kerusuhan dan perang yang mengakibatkan banyak orang meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di Eropa.

Seperti sektor jasa lainnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Asia Tenggara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukan kontribusi sektor jasa dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sekitar 50%, sektor pertanian dan pertambangan hanya menyumbang sekitar 25% dari PDB sedangkan 25% sisanya adalah dari sektor manufaktur. Singapura yang dikenal sebagai pusat industri jasa

skala dunia, negara yang tergolong sangat maju dan berhasil menerapkan ekonomi pasar bebas, komposisi PDB–nya berasal dari sektor jasa (72,8%) dan industri (27,2%). Pertumbuhan PDB di seluruh wilayah Asia Tenggara rata-rata 5,3%.

Didorong globalisasi, jasa pendidikan menjadi sektor yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar di Asia Tenggara, sejak tahun 1990-an mulai menguat. Salah satu jenis jasa pendidikan tersebut adalah yang disebut dengan *cross border supply*, perdagangan melalui penyediaan lintas batas, jasa melintasi batas negara, terpisah baik dari penyedia maupun konsumen. Gelombang perdagangan tersebut tidak terkecuali terjadi pada pendidikan tinggi. Pendidikan internasional menjadi daya dorong yang kuat bagi pendidikan tinggi diberbagai negara, baik sebagai produsen maupun konsumen. Pendidikan tinggi transnasional terbentuk sejalan dengan konsolidasi globalisasi di sektor ekonomi. Lane, Owens, & Kinser (2015) menyatakan pendidikan tumpang tindih dengan empat mode perdagangan utama: 1) pasokan lintas-batas (misal pengiriman online ke siswa di negara lain), 2) konsumsi di luar negeri (misal mobilitas siswa), 3) kehadiran komersial (misal kampus cabang internasional atau lokasi belajar di luar negeri), dan 4) kehadiran ahli di berbagai kawasan (misal dosen perguruan tinggi yang bepergian ke luar negeri untuk mengajar kelas di luar negara asal).

Berdasarkan ulasan di atas, tujuan bagian ini untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi dampak *cross border supply* di Asia Tenggara.

Untuk memenuhi tujuan pada bagian buku ini, digunakan penelitian dengan metode meta analisis, yaitu dilakukan dengan cara merangkum data penelitian, mereview dan menganalisis data dari berapa hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan teknik menelusuri artikel-artikel yang terdapat pada jurnal penelitian di repository, dengan menggunakan berbagai mesin pencari di internet. Kata kunci yang digunakan peneliti dalam penelusuran artikel adalah faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi, *cross border supply*, dan Asia Tenggara. Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kata kunci tersebut diperoleh beberapa artikel, kemudian dipilih yang

memenuhi kriteria yaitu tersedianya data dalam bentuk skor. Skor yang diperoleh dianalisis dengan mencari persentase. Teknik analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pembanding untuk menentukan aspek yang diteliti berupa tekanan dari luar, kebiasaan lama (konservatisme), kepribadian, kelompok luar, dan lingkungan sosial berupa fenomena *cross border supply*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan selisih skor variabel yang dikaji yaitu: Faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi dan dampak *cross border supply* di Asia Tenggara. Sejumlah 22 naskah artikel, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis keseuaian tema, ditentukan menjadi 10 naskah yang berasal dari 10 jurnal.

Fenomena pendidikan transnasional tampak pada banyaknya universitas dari negara-negara maju yang semakin fokus pada kegiatan kewirausahaan dengan mengekspor pendidikan tinggi mereka ke masyarakat berkembang dengan tuntutan pendidikan tinggi. Chen (2015) menyatakan sebagai bentuk mobilitas akademik dan kegiatan pendidikan yang didorong oleh pasar, pendidikan transnasional ini mengikuti pola yang sama dengan mobilitas siswa internasional, negara-negara utama yang berbahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia adalah penyedia layanan utama. Masuknya negara-negara tanpa latar belakang kolonial dan linguistik seperti Taiwan mengubah lanskap pendidikan tinggi transnasional.

Mobilitas siswa selama masa kolonial, sebagian besar alirannya berasal dari koloni ke ibu kota dunia. Selama era Perang Dingin, kekuatan saingan saling bersaing untuk memengaruhi arah arus. Selama periode globalisasi, itu menjadi aktivitas yang didorong pasar, dan terkadang, aktivitas komersial yang diperdagangkan dengan kendali GATS (General Agreement Trade in Services) di bawah WTO (World Trade Organization). Varghese (2008) menyatakan perubahan terbaru dalam arus siswa lintas batas menunjukkan bahwa aliran dominan terus menuju ke Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru menjadi tujuan yang menarik bagi siswa luar negeri. Perubahan-perubahan dalam arah arus dipengaruhi lebih oleh biaya pendidikan daripada oleh pertimbangan politik. Banyak

institusi di beberapa negara tuan rumah sangat bergantung pada pendapatan yang dibawa oleh para siswa pendidikan lintas batas. Gupta (2015) menyatakan pendidikan tinggi telah bergeser dari pendekatan kesejahteraan tradisional ke pendekatan yang lebih diprivatisasi dan berorientasi pasar.

Privatisasi dan terbukanya pasar menimbulkan daya tarik untuk memperoleh pendidikan tinggi diberbagai negara maju, juga ikut mendorong dibukanya berbagai cabang diberbagai negara yang lemah sumber daya manusia. Berbagai pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi dilakukan oleh negara-negara lemah sumber daya manusia tersebut sebagai dampak *cross border supply*. Lund & Manyika (2016) menyatakan penyebaran teknologi digital mengubah arus global barang, jasa, uang, dan manusia. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, transformasi cepat perdagangan digital memunculkan isu-isu penting yang perlu diatasi, termasuk hambatan yang masih ada untuk pertumbuhannya, cara yang tepat untuk mengukurnya, dan pertanyaan tentang tata kelola dan keamanan data.

Penyebab berbagai isu dan hambatan tersebut menjadi tantangan bagi pendidikan tinggi berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara dikarenakan adanya berbagai keunggulan komparatif masing-masing negara. Isu dan hambatan tersebut diantaranya yaitu: mulai bergesernya batas organisasi institusi pendidikan tinggi (Amaral, Tavares, Cardoso & Sin, 2016), warisan, tradisi, dan layanan (Khan, 2015), jenis publikasi dan jurnal (Anna & Putty, 2016), redefinisi ruang kelas dan lingkungan belajar (Kahn & Agnew, 2017), perencanaan strategis dan pembangunan (Wang, 2019), standar pengajaran (Dan, 2019), dan strategi menghadapi globalisasi (Yang, 2014).

Tahun 2018 webometrics merilis daftar universitas terbaik di Asia Tenggara. National University of Singapore, Singapura menjadi universitas terbaik di Asia Tenggara, disusul Nanyang University masih dari Singapura, dan University of Malaya, Malaysia di peringkat tiga. QS World Univerisity Ranking merilis pemeringkatan universitas terbaik di Asia untuk tahun 2018 - 2019. Tidak kurang dari 450 universitas Asia masuk dalam daftar pemeringkatan tersebut. Dari daftar tersebut, negara-negara

Asia Tenggara tergabung dalam Asean (Association of Southeast Asian Nations); Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Myanmar (Birma), Kamboja, Laos, dan Brunei berhasil memasukan 42 univesitas terbaik mereka.

Kondisi pendidikan tinggi di Asia Tenggara, mempelihatkan perlunya dilakukan perbaikan terus menerus di tengah-tengah kompetisi dengan negara-negara lain dalam format globalisasi dan dampak adanya *cross border supply*. Khalid, Ali, Nordin, Nordiana, & Shah (2019:90) menyatakan globalisasi negara-negara yang kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara jauh tertinggal dalam perlombaan menuju globalisasi dan transformasi industri pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah Asia Tenggara dan menentukan apa yang kurang untuk mencapai tujuan ini. Pendekatan komparatif eksplorasi telah digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki tren internasionalisasi terkini di negara-negara anggota Asia Tenggara. Internasionalisasi pendidikan tinggi adalah pendekatan yang meyakinkan dan logis untuk meningkatkan harmonisasi di tingkat intra-regional dan antar daerah.

Berdasarkan ulasan di atas, bagian ini mendiskusikan berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi dampak *cross border supply* di Asia Tenggara.

Dampak *Cross Border Supply* Tehadap Pendidikan Tinggi Di Asia Tenggara

Kelompok kata kunci yang sering digunakan dalam berbagai kajian terkait pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggidampak *cross border supply* di Asia Tenggara, terdiri dari 17 buah. Kelompok kata kunci yamg dominan yaitu standar penjaminan mutu, liberalisasi pendidikan, kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, hambatan hukum, hubungan akademik dengan mitra di negara lain, dan rasa regionalisme. Tabel 2.1 memperlihatkan secara lebih terinci kelompok kata kunci tersebut.

Tabel 2.1 Persentase Berdasarkan Kelompok Kata Kunci

Pengelompokan Kata Kunci	Jumlah	%
Standar penjaminan mutu	8	17,39
Liberalisasi pendidikan	7	15,22
Kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan	7	15,22
Hambatan hukum	6	13,04
Hubungan akademik dengan mitra di negara lain	3	6,52
Rasa regionalisme	3	6,52
Pemahaman tentang kekhasan pribadi	2	4,35
Internasionalisasi pendidikan tinggi	2	4,35
Memajukan tujuan pendidikan nasional	1	2,17
Perlindungan konsumen	1	2,17
Eksploitasi sumber daya alam	1	2,17
Otonomi pendidikan tinggi	1	2,17
Kualifikasi pendidikan tinggi asing	1	2,17
Melindungi sistem lokal	1	2,17
Jumlah pendidikan tinggi asing	1	2,17
Eksploitasi tenaga kerja yang murah	1	2,17
Grand Total	**46**	**100**

Kelompok kata kunci yang dominan dalam pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi dampak *cross border supply* di Asia Tenggara tersebut memperlihatkan sikap defensif pendidikan tinggi negara-negara di Asia Tenggara terhadap fenomena globalisasi, dibandingkan dengan negara-negara maju ilmu dan teknologinya. Sikap defensif tersebut lahir karena selama ini cenderung sebagai konsumen berbagai ilmu dan teknologi, tidak sebagai produsen. Zulkifli (2014) menyatakan globalisasi pendidikan khususnya dinegara berkembang ditandai oleh ambivalensi yaitu berada pada kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk menyamai kualitas pendidikan internasional.

Kondisi sebagai konsumen juga dikonfirmasi sikap defensif tersebut, bahwa tekanan dari luar, kelompok luar, dan lingkungan sosial, yang bermuara pada *cross border supply*, merupakan faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi. Huang (2007) menyatakan seperti di banyak wilayah lain, dampak yang meningkat dari globalisasi dan pasar telah menciptakan bentuk-bentuk baru dan dimensi yang lebih luas dalam internasionalisasi pendidikan tinggi di banyak negara

Asia. Khalid, Ali, Nordin, & Shah (2019:81) menyatakan institusi pendidikan tinggi dan pemerintah nasional telah dipaksa untuk lebih memperhatikan hubungan akademik dan peluang pertukaran pengetahuan dengan mitra di negara lain, khususnya di wilayah yang sama. Nhan & Nguyen (2018:138) menyatakan di antara praktik pendidikan di era globalisasi, negara-negara berkembang muncul dengan beragam representasi kolaborasi transnasional.

Sayangnya, kolaborasi transnasional tersebut tidak bersifat seimbang dan memberikan keuntungan sebanding antar negara. Seringkali perdagangan jasa menunjukan grafik yang timpang, di mana negara-negara produsen ilmu dan teknologi mendominasi negara-negara yang lemah sumber daya manusia. Sikap defensif dari negara-negara yang lemah tersebut menjadi belenggu untuk melakukan pembangunan struktur dan infrastruktur pendidikan lebih baik, karena hanya sebagai konsumen belaka. Para siswa yang menikmati pendidikan tinggi dari berbagai negara majupun, ketika mereka menyelesaikan studinya dan kembali ke negara asal, mengalami berbagai kendala untuk mengaplikasikan ilmunya. Femomena *brain dain* terjadi semakin massif, berupa *human capital flight*, hengkangnya tenaga ahli, pemikir, intelektual potensial ke negara lain yang pada umumnya lebih maju dibanding negara asalnya.

Sikap defensif tersebut juga diperkuat oleh ketakutan atas ancaman seni, budaya, dan berbagai warisan lokal. Hasil kajian ini memperlihatkan kebiasaan lama, pengalaman masa lampau, dan kepribadian sebagai faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi. Berbagai upaya dilakukan untuk membentengi dan melindungi berbagai kearifan lokal tersebut, di tengah gempuran *cross border supply* yang berbentuk seni dan budaya. Gempuran seni dan budaya tersebut semakin massif didukung piranti internet dan berbagai media sosial yang sangat mudah diakses masyarakat. Quynh (2016:35) menyatakan globalisasi telah menghubungkan negara-negara di seluruh dunia lebih dekat dengan menghilangkan penghalang.

Penghalang tersebut berupa aktivitas untuk menurunkan bahkan menghilangkan berbagai tarif masuk barang dan jasa, yang diperdagangkan antar negara, transnasional. Bentuk perdagangan dalam sektor pendidikan biasanya berupa pengiriman siswa di

negara lain, mobilitas siswa, kampus cabang internasional atau mobilitas dosen bepergian ke luar negeri untuk mengajar. Berbagai bentuk perdagangan pendidikan tersebut disikapi tiap negara dengan berbagai respon keputusan politik berupa kebijakan pendidikan dalam wujud sistem manajemen pendidikan nasional. Dari Asia Tenggara jumlah siswa yang keluar menuju negara maju dengan pendidikan lebih baik, di Indonesia 6.300 orang pada 2016 menjadi sekitar 11.000 orang tahun 2017. Indonesia menduduki peringkat ke 22 di dunia sebagai negara terbanyak mengirimkan siswa belajar keluar negeri. Peringkat tersebut masih di bawah Malaysia dan Vietnam. Semantara itu, jumlah siswa internasional yang masuk dan belajar di Singapura sebanyak 6.000, Thailand 20.000, Filipina 5.000, Vietnam 4.000, dan Malaysia 177.000.

Respon keputusan politik nasional untuk menghilangkan penghalang berbagai tarif masuk barang dan jasa biasanya difokuskan untuk memenuhi berbagai kepentingan internasional, sering kali mengabaikan kepentingan nasional. Berbagai negara di Asia Tenggara, telah menjadikan globalisasi sebagai mendorong berbagai keputusan politik yang ujung-ujungnya kesenjangan sosial (Zulkifli, 2014:139; Lane, Owens & Kinser, 2015:22), eksploitasi sumber daya manusia (Peterson, 2016:473), mengabaikan mutu pendidikan lokal (Mcburnie & Ziguras, 2001:85), dan penghancuran kekayaan alam (Quynh, 2016:30). Pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi diarahkan untuk memenuhi berbagai kepentingan internasional dan mengabaikan kepentingan lokal, kepentingan, dan kebutuhan banyak orang. Akses pendidikan tinggi internasional hanya untuk memenuhi kebutuhan kelas ekonomi menengah atas masyarakat perkotaan, sementara masih banyak rakyat bawah yang tinggal dipedasaan mendapatkan akses seadanya saja.

Timpangnya akses pendidikan tinggi ini menimbulkan lebarnya jurang perbedaan kelas sosial ekonomi dimasyarakat. Modal sosial dan ekonomi masyarakat miskin pedesaan yang lemah ini menyusahkan terjadinya mobilitas vertikal dan perbaikan taraf hidup. Maka, perputaran berkah akses pendidikan dan ekonomi berputar-putar saja di kalangan masayarakat ekoomi kelas menengah atas. Belenggu masyarakat miskin tersebut semakin mengaburkan cita-cita mereka memutus mata rantai kemiskinan,

yang berputar-putar dari generasi ke generasi berikutnya. Proses pengambilan keputusan strategis pendidikan tinggi di masing-masing negara tentu saja dilakukan secara normal, sesuai dengan kesepakatan GATS. Ziguras (2003:89) menyatakan GATS adalah perjanjian multilateral di mana anggota WTO berkomitmen untuk liberalisasi sukarela perdagangan jasa, termasuk pendidikan.

Keputusan itu dibuat melalui proses formal, konseptual, analitis, proyeksi, analitis, proyeksi masa depan, posisi ideologi, *learning*, bertahan, *copycat*, dan intuisi ditunjukkan juga dalam hasil kajian ini. Bangladesh yang memiliki frekuensi kelompok kata kunci pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi dampak *cross border supply* lebih rendah dibandingkan Malaysia, menunjukan proses pengambilan keputusan strategis di Bangladesh kurang kompleks dilakukan. Bangladesh menghadapi berbagai persoalan nasional seperti kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, standar penjaminan mutu, dan hambatan hukum.

Persoalan Bangladesh tersebut menjadikannya tidak banyak melakukan upaya-upaya lebih baik dalam pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi untuk merespon globalisasi, dibandingkan Malaysia. Proses pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi di Malaysia menjadikan komponen berikut sebagai landasannya. Komponen tersebut yaitu liberalisasi pendidikan, perlindungan konsumen, memajukan tujuan pendidikan nasional, melindungi sistem lokal, hubungan akademik dengan mitra di negara lain, pemahaman tentang kekhasan pribadi, dan rasa regionalisme. Malaysia lebih siap merespon globalisasi dibandingkan Bangladesh, yang berperilaku sebagai konsumen. Data dari ICEF Monitor (2017:7) menyebutkan bahwa sekitar 67 juta rumah tangga di negara-negara Asia Tenggara adalah bagian dari kelas konsumsi, dengan pendapatan yang melebihi tingkat di mana mereka dapat mulai melakukan pembelian diskresioner yang signifikan.

Sikap Negara-negara Asia Tenggara

Hasil kajian ini menemukan frekuensi kelompok kata kunci berdasarkan negara dalam pengambilan keputusan strategis sistem

manajemen pendidikan tinggi dampak *cross border supply* di Asia Tenggara. Frekuensi dari tertinggi ke terendah yaitu Malaysia (13), Vietnam (11), Indonesia (11), Singapura (6), dan Bangladesh (4), lihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Frekuensi Kata Kunci Berdasarkan Negara

Negara	Frekuensi	% Kata Kunci
Malaysia	13	28,89
Vietnam	11	24,44
Indonesia	11	24,44
Singapura	6	13,33
Bangladesh	4	8,89
Grand Total	**45**	**100**

Negara-negara maju yang sebagian besar penganut sistem pasar liberal yakin, bahwa daya saing dipengaruhi derajat kebebasan ekonomi. Semakin bebas sistem ekonomi, daya saing semakin meningkat, kebebasan ekonomi dilihat dari minimnya campur tangan pasar oleh negara. Sektor pendidikan tinggi tidak jauh berbeda, peran publik negara dikerangkeng dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sektor swasta. Pandangan ini berbahaya jika diterapkan sepenuhnya, walaupun sampai saat ini belum ada sikap yang jelas di Asia Tenggara mengenai praktik *cross border supply* ini. Praktik-praktik konsolidasi dominasi kekuatan ekonomi besar dunia terhadap pendidikan tinggi nasional, misalnya tampak pada pengendalian standardisasi sistem mutu, pemeringkatan lembaga pendidikan, dan sampai pada otorisasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui berbagai macam indeks. Oligarki yang menekankan keunggulan sumber daya material sebagai kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi, telanjang dipraktikkan situasi tersebut. Negara-negara miskin sulit sekali keluar dari jerat ketertinggalan dan keterbelakangan, pendidikan tinggi nasional hampir dapat dipastikan tunduk kepada kekuatan besar negara-negara maju yang mendominasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hampir mustahil terjadi negara-negara tertinggal mendesak dan merangsek untuk naik posisi, sepertinya tepatlah belaka diungkapkan Darwin (2015:442) banyak langkah-langkah sehingga makhluk hidup manapun tidak sampai ke keadaan yang

sekarang, karena sungguh-sungguh tidak ada yang benar-benar membuat lompatan, *natura non facit saltum*.

Keberadaan pendidikan tinggi asing di berapa negara Asia Tenggara memang masih menjadi kontroversi dengan berbagai hambatan yang menyertainya, tampaknya keberadaan pendidikan tinggi asing tersebut diterima beroperasi. Winarno (2006:186) menyatakan praktik globalisasi pendidikan tinggi sulit ditolak oleh negara-negara anggota, meskipun secara politis perlu memperhitungkan kapan waktu yang tepat untuk mengizinkan kehadiran pendidikan tinggi asing, berapa jumlahnya, dan dari negara mana. Hsu (2017:184) menyatakan yang utama menjadi hambatan globalisasi di Asia Tenggara berupa penggunaan lahan, penyelesaian sengketa, dan hambatan hukum yang dihadapi.

Kontroversi dan berbagai hambatan keberadaan pendidikan asing tersebut, selama ini diatasi dengan berbagai aturan konstitusional masing-masing negara, karena di Asia Tenggara masing-masing negara berdaulat dengan teritori dan sistem pemerintahan mereka. Hasil kajian ini memperlihatkan keputusan-keputusan penting terkait dengan globalisasi dan pendidikan tinggi dilakukan dengan berbagai ciri, yaitu: melibatkan banyak pihak, sebagai akibat dari tantangan perubahan, fokus pada masalah yang sedang dihadapi, reaktif, dan jangka pendek. Secara umum proses pengambilan keputusan strategus dilakukan secara demokratis.

Di Indonesia, tema pembangunan daya saing regional dimulai tahun 2015-2019, sementara daya saing internasional menjadi tema tahun 2020-2024, demikian dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Selebihnya dalam dokumen tersebut, tidak dijumpai kata globalisasi, dari dokumen setebal 134 halaman, hanya terdapat lima kata global untuk merujuk pada orientasi, persaingan, dan budaya positif. Rencana strategis tersebut merupakan visi dan misi dari kementerian yang bersangkutan, artinya kurang ada detail atau rincian yang memadai atas keberadaan globalisasi. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, globalisasi memang disinggung, tapi hanya sepintas tanpa rincian dan detail yang memadai. Dokumen terkait dengan pendidikan, baik undang-

undang dan kebijakan lain hampir tidak ada yang menyertakan kata itu.

Memang tema dan kata-kata kunci terkait tantangan global bertebaran dalam Rencana Strategis 2015 - 2019 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan di Indonesia, berhubungan dengan indeks daya saing global, publikasi terindeks global, dan paten. Di dalam rencana strategis tersebut tidak dibicarakan sama sekali tentang pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia dan bagaimana cara mencapainya, semuanya hanya terkait dengan pemenuhan berbagai macam indeks internasional.

Pengambilan keputusan strategis untuk menentukan kebijakan nasional di masing-masing negara di Asia Tenggara dilakukan oleh banyak pihak, sebagai akibat dari tantangan perubahan. Selvaraj, Anbalagan & Norhaini (2014:85) menyatakan empat elemen yang memengaruhi kebijakan dan praktik pendidikan tinggi di Malaysia yaitu kemampuan kerja, jaminan kualitas, akademisi, dan kompetensi bahasa Inggris. Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan & Ferdryansyah (2016:197) menyatakan pendidikan tinggi Indonesia melakukan persiapan dalam globalisasi tampak pada aspek-aspek visi dan misi, aturan, pedoman tata kelola, profil siswa, sumber daya manusia, infrastruktur, tri dharma perguruan tinggi, dan kerjasama internasional. Rosser (2016:109) menyatakan di Indonesia peran konfigurasi kekuasaan dan kepentingan domestik dalam memediasi tekanan global untuk reformasi pendidikan tinggi neoliberal sangat dibutuhkan. Mas'udi, Karim, & Tapiheru (2021) menyatakan sumber kekuasaan tidak selalu bersifat materiel, tetapi termanifestasi dalam bentuk wacana, pengetahuan, dan penguasaan atas data dan informasi.

Tampak bahwa pengambilan keputusan strategis tersebut fokus pada masalah yang sedang dihadapi, reaktif, dan jangka pendek terhadap fenomena *cross border supply*. Seperti yang terjadi, berdasarkan hasil kajian ini, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh komponen internasionalisasi pendidikan tinggi, standar penjaminan mutu, jumlah pendidikan tinggi asing, kualifikasi pendidikan tinggi asing, standar penjaminan mutu, liberalisasi pendidikan, hubungan akademik dengan mitra di negara lain, dan hambatan hukum. Dari 8 komponen tersebut, sebanyak 7 komponen berasal tekanan dari luar, hanya

1 komponen berasal dari dalam yaitu hambatan hukum. Hampir sama terjadi di Vietnam, komponen tekanan dari luar memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan strategis, ditambah komponen eksploitasi tenaga kerja yang murah dan berketerampilan rendah, eksploitasi sumber daya alam, otonomi pendidikan tinggi, kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, dan rasa regionalisme.

Penjaminan mutu di Indonesia menjadi mantra untuk berbagai upaya perbaikan dan pencapaian tujuan pendidikan. Awalnya LPMP, dan sekarang berubah lagi menjadi BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan). Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan mutu pendidikan di daerah dan nasional, maka Departemen Pendidikan Nasional merestrukturisasi dan merefungsionalisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sejak Juli 2003. Selain BPMP, penjaminan mutu dibuat pada satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi dua yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) sejak tahun 2016. Standar mutu pendidikan berlandaskan pada Standar Pelayanan Miniman, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar mutu pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Pada perguruan tinggi, penjaminan mutu dilakukan dalam sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, yang terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh LAMDIK, dan pangkalan data perguruan tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Tabel 2.3 Faktor Memengaruhi Pengambilan Keputusan Strategis

Faktor	Jumlah	%
Tekanan dari luar	42	51,22
Kelompok luar dan lingkungan sosial	18	21,95
Kebiasaan lama	11	13,41
Pengalaman masa lampau	6	7,32
Kepribadian	5	6,10
Grand Total	**82**	**100**

Hasil kajian ini menemukan faktor yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi dampak *cross border supply* di Asia Tenggara, dari yang terbesar ke terkecil yaitu tekanan dari luar (51,22%), kelompok luar dan lingkungan sosial (21,95%), kebiasaan lama (13,41%), pengalaman masa lampau (7,32%), dan kepribadian (6,10%). Tabel 2.3 memperlihatkan faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis. Kajian ini memperlihatkan identifikasi dasar dalam pembuatan keputusan dipengaruhi dua komponen yaitu kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan dan pemahaman tentang kekhasan pribadi. Kedua komponen tersebut berasal dari kebiasaan lama, lingkungan sosial, dan keadaan internal organisasi.

Untuk kepentingan internal organisasi dalam cakupan nasional-negara, proses analitis pembiayaan atas keputusan yang dibuat dengan memperhatikan biaya dan manfaat keberadaan *cross border supply*. Ho Mok (2008:527) menyarankan pilihan alat kebijakan (pilihan kekuatan pasar dalam pendidikan tinggi dan kebangkitan pendidikan transnasional dalam kasus ini) sangat politis dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada konteks sosial-ekonomi dan sosial-politik tertentu mereka, ketika negara membuat pilihan kebijakan. Marginson (2018:322) menyatakan analisis kebijakan pendidikan meliputi empat kuadran, yaitu masyarakat sipil, demokrasi sosial, pasar kuasi negara, dan pasar komersial. Yang (2014:163) menyatakan tentang pentingnya strategi negara untuk merespon internasionalisasi pendidikan tinggi. Teik & Takeshi (2016:3) menyatakan dinamika dan ketahanan interaksi geopolitik, termasuk berbagai damapak *cross border supply,* dapat dianalisis melalui aspek antropologi, sosiologi, dan pembangunan ekonomi jaringan-jaringan sosial di Asia Tenggara dalam membentuk kekuatan, pengaruh, dan keefektifan hubungan.

Globalisasi yang di dalamnya terdapat berbagai kekuatan, pengaruh, dan hubungan kawasan di Asia Tenggara berwujud dalam Asean dan diperkuat dengan AEC (Asean Economic Community) yang berlaku akhir tahun 2015. Asean memiliki AUN (Asean University Network), yang merupakan organisasi universitas di negara-negara Asean. Tujuan AUN adalah untuk meningkatkan kualitas standar universitas di Asean. AUN-QA (Asean University Network-Quality Assurance) merupakan sebuah asesmen yang

mengacu ke standar akreditasi international. Mulyono (2018) menyatakan masing-masing program studi perguruan tinggi harus melaksanakan proses pembelajaran baik dan pengelolaan prodi yang baik. Untuk menghadapi sertifikasi AUN-QA perlu disiapkan bukti fisik dan bukti pendukung lainnya untuk masing-masing kriteria AUN-QA. Pertanyaan diagnostik selalu dimunculkan untuk memastikan apakah masing-masing kriteria tersebut terpenuhi atau belum. Sementara itu, Asean Economic Community bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asean, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara Asean.

Asean Economic Community merupakan wujud terintergasinya negara-negara di Asia Tenggara. Sepuluh negara tersebut - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Burma (Myanmar), Kamboja, Laos, dan Vietnam - memiliki total populasi lebih dari 600 juta orang. Gabungan ekonomi mereka saat ini peringkatnya sebagai ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Mereka bersepakat untuk mendorong tegaknya empat pilar secara kolektif, yaitu pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Keempat pilar termuat dalam dokumen Blueprint yang disepakati dalam Pertemuan ke-38 *Asean Economic Ministers Meeting* (AEM) di Kuala Lumpur pada Agustus 2006. Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara Asean telah menyepakati dan mengesahkan *Asean Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Sejak disepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi jasa dilakukan melalui negosiasi ditingkat *Coordinating Committee on Services* (CCS) dalam bentuk paket.

Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki *Asean Framework Agreement on Services* (AFAS) *Package* 10. Sementara itu, khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan di tingkat Menteri terkait lainnya (Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan). Perundingan liberalisasi jasa keuangan sedang menegosiasikan AFAS 8 sementara jasa transportasi sudah menandatangani AFAS ke-10. Perundingan liberalisasi perdagangan

jasa Asean digunakan pendekatan positif. Pergerakan tenaga kerja terampil di Asean diatur melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Asean saat ini telah memiliki 8 (delapan) MRA yakni untuk profesi insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata dan akuntan. Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2018, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan tenaga kerja kelas menengah naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Pada cakupan global, Lombard (2022) dan Baglioni et al., (2022) menyebutkan bahwa liberalisasi tenaga kerja tersebut telah menghilangkan batas keibuan migran oleh rezim tenaga kerja dan produksi global.

Pendidikan tinggi dalam bidang jasa,, masuk dalam Asean Framework Agreement on Services (AFAS) Package 10. AFAS Paket Kesepuluh merupakan AFAS paket terakhir dari perundingan liberalisasi perdagangan jasa di tingkat Asean dan selanjutnya menjadi dasar dari Asean Trade in Services Agreement (ATISA) yang merupakan perjanjian bidang jasa yang lebih komprehensif, transparan dan *predictable*. Sektor jasa yang dikomitmenkan di dalam AFAS adalah 12 (dua belas) sektor jasa yaitu jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa pendidikan jasa kesehatan dan sosial, jasa lingkungan jasa pariwisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan olah raga, jasa transportasi, dan jasa lainnya.

Kelompok kata kunci yang dominan dalam pengambilan keputusan strategis sistem manajemen pendidikan tinggi dampak *cross border supply* di Asia Tenggara, yaitu standar penjaminan mutu, liberalisasi pendidikan, kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, hambatan hukum, hubungan akademik dengan mitra di negara lain, dan rasa regionalisme. Terdapat sikap defensif sektor pendidikan tinggi negara-negara di Asia Tenggara terhadap fenomena globalisasi, dibandingkan dengan negara-negara maju dalam ilmu dan teknologi. Sikap defensif tersebut lahir karena selama ini cenderung sebagai konsumen berbagai

ilmu dan teknologi, tidak sebagai produsen, hal ini ditandai oleh ambivalensi yaitu berada pada kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk menyamai kualitas pendidikan internasional. Sikap defensif tersebut dapat dilihat bahwa pengambilan keputusan strategis pendidikan dilakukan karena bahwa tekanan dari luar, kelompok luar, dan lingkungan sosial, yang bermuara pada globalisasi. Identifikasi dasar dalam pembuatan keputusan startegis pendidikan tinggi di Asia Tenggara dipengaruhi dua komponen yaitu kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan dan pemahaman tentang kekhasan pribadi. Kedua komponen tersebut berasal dari kebiasaan lama, lingkungan sosial, dan keadaan internal organisasi.

Situasi globalisasi melalui bentuknya *cross border supply* menjadikan sistem pendidikan nasional semakin rapuh dan memasuki tahap akhir sejarah, jika di simpang jalan tidak tepat mengambil arah yang benar. Dalam sistem manajemen pendidikan nasional, hak dan kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) yaitu: (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hak dan kewajiban pemerintah tersebut sekarang dikembalikan ke pasar, yang berkompetisi lintas batas negara.

BAB 3
CONSUMPTION ABROAD & SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Globalisasi telah mendorong berbagai pendidikan tinggi di berbagai negara untuk terus meningkatkan tata kelola berkompetisi dalam banyak berbagai layanan akademik. Saat ini peran *emerging economies* mencapai 71% dari total output dunia dan perdagangan internasional tumbuh 3.4%. Penduduk dunia saat ini 9.45 milyar, 65% penduduk hidup di perkotaan, dan terjadi pergeseran mata uang dari dolar AS menjadi multi *currencies*. Vrielink, Jansen & Hans (2017:145) menyatakan perkembangan kebijakan pendidikan di dunia tampak pada tiga model berikut: (1) Model yang berpusat pada negara; pendidikan tinggi dilihat sebagai lembaga yang dioperasikan oleh negara; (2) Perguruan Tinggi sebagai komunitas yang mengatur diri sendiri, adalah model yang didasarkan pada kemitraan universitas-negeri yang kuat, yang diatur oleh asumsi korporatisme dan kesepakatan bersama; dan (3) Sifat berorientasi pasar.

Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 71.39, meningkat sebesar 0.58 dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga Indonesia berstatus pembangunan manusia "tinggi" dengan Umur Harapan Hidup saat lahir mencapai 71.20 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 71.20 tahun. Secara rata-rata, penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8.17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun atau setara dengan Diploma I. Tidak kalah penting, standar hidup layak Indonesia yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai US$ 3.92 per kapita per tahun.

Untuk mengukur kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan, salah satunya dapat diketahui dari pemeringkatan pada QS University Ranking. Kualitas pendidikan tinggi dievaluasi sesuai dengan enam metrik yaitu reputasi akademik (40%), reputasi employer (10%), rasio fakultas / mahasiswa (20%), kutipan per fakultas (20%), rasio fakultas internasional, dan rasio mahasiswa internasional (5% each). Sistem pemeringkatan ini sering digunakan dan banyak dirujuk di tingkat global. Tabel 3.1 berikut ini diuraikan hasil yang diraih pendidikan tinggi di Indonesia dari sistem pemeringkatan tersebut.

Tabel 3.1 Indonesia dalam QS World University Ranking 2014-2019

Tahun	UI	ITB	UGM	IPB	UNAIR	UB	UNDIP	UNPAD
2014	309	461-470	501-550	701+	701+	701+	701+	
2015	310	461-470	551-600	701+	701+	701+	701+	
2016	358	431-440	551-600	701+	701+	701+	701+	
2017	325	401-410	501-550	701+	701+	701+	701+	
2018	277	331	401-410	751-1000	701-750	801-1000	801-1000	
2019	292	359	391	701-1000	751-800	801-1000	801-1000	651-700

Sumber: QS University Rankings

Tabel 3.2 Indonesia dalam QS Asia University Ranking 2015-2018

Tahun	UI	ITB	UGM	IPB	UNAIR	UNPAD	UNDIP	UB
2015	71	125	145	201-250	127	201-250	201-250	251-300
2016	79	122	137	201-250	147	161-170	251-300	-
2017	67	86	105	191	190	199	231-240	301-350
2018	54	65	85	147	171	176	240	291-300

Sumber: QS University Rankings: Asia

QS Asia University Ranking, pada kategori ini, pemeringkatan hanya dilakukan terhadap perguruan tinggi di Asia meskipun mencakup sebagian saja yang berasal dari 17 negara. Indikator yang digunakan untuk menyusun Peringkat Universitas QS Asia yaitu reputasi akademik (30%), reputasi pemberi kerja (20%), rasio fakultas / siswa (10%), jaringan penelitian internasional (10%), kutipan per makalah (10%) dan makalah per fakultas (5%), staf dengan gelar phd (5%), proporsi fakultas internasional (2,5%) dan proporsi mahasiswa internasional (2,5%), dan proporsi siswa pertukaran masuk (2,5%) dan proporsi siswa pertukaran keluar (2,5%). Berdasarkan pemeringkatan di tingkat Asia ini, pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan kinerja yang positif pada periode 2015-2019 melalui peningkatan peringkat yang kontinu. Tabel 3.2 memperlihatkan pemeringkatan dari QS Asia University Ranking untuk perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia 2015-2018.

Selain sistem pemeringkatan global, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Indonesia juga melakukan pemeringkatan perguruan tinggi (PT) untuk lingkup Indonesia. Pemeringkatan berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis output – outcome base, yaitu dengan melihat kinerja masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja input (15%) dan proses (25%), serta kinerja luaran dengan bobot 60% yang meliputi kinerja output (25%), dan outcome (35%). Tabel 3.3 memperlihatkan klasterisasi (klaster 1/tertinggi) perguruan tinggi non-vokasi tahun 2020. Klaster 1 memiliki ciri SDM dan Infrastruktur kuat berhasil didayagunakan untuk mencapai prestasi nasional yang tinggi dan siap ditingkatkan peringkat internasional.

Sejak perang dunia kedua berakhir disiplin ekonomi pembangunan mulai berkembang, tujuan disiplin ini untuk menganalisis apa yang disebut ekonomi negara-negara berkembang. Model-model yang kemudian dinisbatkan sebagai pemikiran neoklasik, yang meyakini di masyarakat terjadi suatu proses harmonis yang menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh masyarakat dalam kelembagaan yang ada, struktur sosial yang ada, dan permintaan efektif yang ada, melalui apa yang disebut mekanisme tetesan ke bawah (*trickle-down mechanism*), mulai ditinggalkan. Pemikiran ini tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan sosial dalam pembangunan, seperti penyerapan tenaga

kerja, kemiskinan, distribusi pendapatan dan kekayaan, dampak teknologi yang digunakan dalam proses produksi, dan kelembagaan nasyarakat yang dianggap sebagai sesuatu yang *exogenous*. Saat ini, terdapat beberapa faktor untuk meningkatkan pembangunan, Niño-Zarazúa (2016:6) menyatakan strategi kebijakan kunci untuk meningkatkan fungsi sistem pendidikan, kualitas layanan, dan tantangan utama untuk agenda pendidikan global di masa depan, yaitu: keadilan sosial, perspektif hak asasi manusia, dan kemajuan dalam teori ekonomi yang menekankan peran modal manusia dalam pembangunan telah menjadi pusat dalam proses itu.

Tabel 3.3 Klaster 1 Perguruan Tinggi Non-Vokasi Tahun 2020

Nama PT	Skor Total	Peringkat
Institut Pertanian Bogor	3,648	1
Universitas Indonesia	3.414	2
Universitas Gadjah Mada	3.315	3
Universitas Airlangga	3.299	4
Institut Teknologi Bandung	3.275	5
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	3.218	6
Universitas Hasanuddin	3.161	7
Universitas Brawijaya	3.161	8
Universitas Diponegoro	3.111	9
Universitas Padjadjaran	3.007	10
Universitas Sebelas Maret	2.930	11
Universitas Negeri Yogyakarta	2.908	12
Universitas Andalas	2.860	13
Universitas Sumatera Utara	2.792	14
Universitas Negeri Malang	2.747	15

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018, hampir 8.8% dari total 7 juta lebih sarjana menganggur. Angka ini meningkat 1.13% dari tahun 2017. Sekitar 630.000 sarjana pengangguran mesti berkompetensi dan keahlian tertentu dengan pekerja asing yang datang dari terbukanya globalisasi. Pendidikan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Situasi di Indonesia yang dialami India, seperti yang dikatakan Joshi & Ahir

(2019:70) bahwa pendidikan tinggi India harus mengatasi masalah keadilan, kualitas dan efisiensi secara pragmatis melalui kerangka kebijakan yang efektif untuk menjadi kompetitif secara global dan relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai *consumtion abroad*, yang merupakan salah satu dampak globalisasi yang nyata, terjadi arus perpindahan konsumen pergi ke luar negeri dan berstatus bukan penduduk dimana jasa dikonsumsi, termasuk pendidikan tinggi. Bagian buku ini menghubungkan praktik pendidikan tinggi di Indonesia: isu *consumption abroad*, perkembangan teknologi, politik pendidikan domestik dan perubahan kepemimpinan strategis.

Bagian buku ini merupakan hasil penelitian kepustakaan. Penelusuran menggunakan kata kunci pendidikan tinggi, *consumption abroad*, perkembangan teknologi, politik pendidikan domestik, dan perubahan kepemimpinan strategis. Metode penelitian menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan berita. Analisis data dengan cara melakukan pengujian validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data dengan dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Globalisasi adalah proses yang digerakkan oleh pasar dan itu berasal dari keyakinan bahwa pasar memainkan peran yang lebih penting daripada negara dalam pembangunan. *Consumtion abroad* merupakan salah satu dampak globalisasi, terjadi arus perpindahan konsumen pergi ke luar negeri dan berstatus bukan penduduk dimana jasa dikonsumsi. Konsumen melakukan perjalanan atau berpindah untuk mempermudah terjadinya transaksi, termasuk pula perpindahan hak milik konsumen. Xue-xin (2007:40) menyatakan seiring dengan globalisasi pendidikan, pembukaan pendidikan dihadapkan dengan peluang dan tantangan baru, yang berarti kita harus memiliki lebih banyak komunikasi dengan negara lain, meningkatkan kemampuan kompetitif, dan mengambil bagian aktif dari globalisasi pendidikan dengan pandangan globalisasi. Jadoon, Butt & Hayat (2016:327) menyatakan globalisasi telah mengubah pola konsumen, budaya, berperilaku, dan berpikir yang

memengaruhi pilihan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan rutin mereka.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilihan jasa yang dikonsumsi sebagai upaya pengembangan ilmu dan kemampuan lebih baik lagi yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber pengetahuan yang tidak terbatas. *Consumtion abroad* memberikan dampak terhadap praktik pendidikan tinggi antar negara, di mana jasa pendidikan dapat menjadi akses lintas batas. Lalu lintas siswa diberbagai pendidikan tinggi menjadi pemandangan lumrah. Varghese (2013:3) menyatakan *consumtion abroad* dapat dikategorisasikan menjadi tiga fase yang berbeda, tetapi terkait. Fase pertama mengalami lonjakan arus siswa lintas-batas, fase kedua melihat perkembangan pusat-pusat pendidikan dan kampus-kampus, dan fase ketiga dan yang terbaru menyaksikan mobilitas program dan direvolusi oleh massifikasi kursus online seperti kursus terbuka online.

Kompetisi pendidikan tinggi mendorong berbagai negara untuk mengembangkan kapasitas ilmu dan teknologi dalam berbagai praktik pengajaran. Pendidikan tinggi yang unggul diberbagai belahan negara lain menjadi incaran calon siswa, dengan meninggalkan negara asalnya. Akopova & Przhedetskaya (2015:115) menyatakan nilai kemajuan ilmiah dan teknis dan kemampuan untuk menerapkan teknologi baru meningkat dalam persaingan geopolitik. Sementara itu negara-negara, yang tidak dapat memberikan tingkat pendidikan yang diperlukan bagi warga negaranya, pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas lingkungan informasi, tidak dapat dihindari akan sangat tergantung pada pusat keuangan internasional, akan mempertahankan peran provinsi, sumber mentah, dan sumber daya manusia untuk perusahaan multinasional dan negara-negara yang paling menjanjikan. Jang (2017:21) menyatakan mereka menikmati kegiatan rekreasi seperti perjalanan dan bergaul sehari-hari, sehingga membangun versi kosmopolitanisme mereka. Harper (2016:54) menyatakan motivasi siswa untuk belajar di luar negeri dapat dikategorikan sebagai intrinsik atau ekstrinsik dan bahwa keyakinan siswa tentang studi di luar negeri berdampak pada pengembangan dan pengalaman interpersonal mereka. Siswa

belajar di luar negeri untuk mengembangkan secara interpersonal, untuk mengembangkan keterampilan.

Selain motivasi intrinsik atau ekstrinsik siswa lintas batas, terdapat juga motif investasi dengan pengembalian di masa depan. Cebolla-Boado, Hu & Soysal (2018:365) menyatakan pengembalian pasar tenaga kerja memberikan pemahaman tentang mobilitas pelajar internasional. Gerro (2017:438) menyatakan kerangka kerja lintas-nasional menawarkan wawasan ke tingkat kosmopolitanisme budaya di sejumlah besar negara dan sejauh mana korelasi kosmopolitanisme budaya bertemu di berbagai negara.

Pendidikan tinggi diberbagai negara perlu menyiapkan kedatangan siswa lintas batas, terutama untuk negara dengan kualitas pendidikan tinggi yang bagus. Sampai saat ini banyak negara yang masih tidak mengizinkan masuk dan berdirinya pendidikan tinggi asing, salah satu cara untuk mengatasi ketertinggalan sumber daya manusianya yaitu dengan mendorong siswa lintas batas. Sarker (2015:13) menyatakan mengizinkan investasi asing dalam pendidikan merusak identitas nasional. Jalan tengah bisa dilakukan: meningkatkan biaya untuk siswa yang makmur dan lebih banyak beasiswa untuk siswa miskin bisa menjadi pilihan. Bagian pertama dari opsi ini sudah dipraktikkan melalui kursus profesional yang dibiayai sendiri di banyak universitas negeri di India, tetapi siswa miskin tidak memiliki akses ke kursus tersebut. Bidyuk (2016:7) menyatakan oleh karena itu, telah disarankan bahwa pendidik dan lembaga pendidikan tinggi harus mengembangkan pendekatan yang berbeda untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan komunitas siswa yang sedang tumbuh, terutama siswa internasional.

Berbagai persiapan perlu dilakukan pendidikan tinggi untuk mengambil manfaat dari fenomena *consumtion abroad*. Berbagai faktor siswa lintas batas untuk memilih pendidikan tinggi dapat dijadikan acuan untuk mendorong kemajuan pendidikan tinggi. Mathew (2016:127) menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mendaftar di berbagai institusi luar negeri yaitu meningkatkan pengalaman pribadi, membangun kontak internasional, dan membangun jaringan profesional. Faktor-faktor kunci yang memengaruhi pilihan negara tuan rumah yaitu prospek

pekerjaan bergaji tinggi setelah lulus, infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik, program pendidikan internasional yang mapan yang diakui secara internasional, pengakuan gelar saat ini untuk pekerjaan dan pendidikan lanjutan, dan kemudahan akses ke informasi. Landon, Tarrant, Rubin & Stoner (2017:5) menyatakan cukup bepergian ke luar negeri dan berpartisipasi dalam program studi di luar negeri tidak serta merta menghasilkan hasil belajar yang diinginkan. Nguyen & Coryel (2015:23) menyatakan tema yang lazim dalam penelitian yang hadir untuk mempelajari partisipasi di luar negeri berfokus pada sosial, kelembagaan, akademik, alasan pribadi, dan keuangan.

Kemajuan teknologi pendidikan semakin kencang lajunya, setelah munculnya teknologi baru the *Fourth Industrial Revolution* (4IR) dan *the Fifth Generation* (5G) yaitu *wireless communication technology* dan segera disusul *the Sixth Generation* (6G). Perkembangan teknologi pendidikan memasuki era dimana teknologi baru menjadi kebutuhan dalam pengajaran di perguruan tinggi. Rajesh (2015:62) menyatakan teknologi baru yang relevan dengan bidang pendidikan, pengetahuan bersifat subyektif dan metode pembelajaran difokuskan pada interaksi, partisipasi, dan dialog. Siswa juga aktif dan mengambil inisiatif. Willis (2019:22) menyatakan teknologi digital sangat terintegrasi ke dalam sistem pendidikan; sekolah beroperasi pada konektivitas jaringan dan sangat bergantung pada internet. Crittenden & Peterson (2019:3) menyatakan teknologi digital berkontribusi terhadap perubahan besar dalam praktik, janji, dan operasi pendidikan tinggi, dan perubahan ini menantang pendidikan tinggi untuk berinovasi dan untuk menyegarkan program dan desain kurikulum. Al-Imarah & Shields (2019:258) menyatakan Massive Open Online Courses (MOOCs) pada pendidikan tinggi merupakan inovasi berkelanjutan yang membangun pasar baru untuk pelajar yang tidak dilayani oleh universitas.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan teknologi, keduanya bertemu di dalam kelas pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis terhadap pertemuan pendidikan dan teknologi dalam kelas pengajaran dan pembelajaran tersebut. Lucya & Anis (2019:509) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara simultan tingkat pendidikan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sayangnya kemajuan teknologi tidak serta merta diikuti dalam praktik pembelajaran oleh pendidikan tinggi. Berbagai macam hambatan masih dihadapi pendidikan tinggi, termasuk di Indonesia. Kearney, Burden & Schuck (2019:45) menyatakan semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pedagogi tradisional masih mendominasi bidang pendidikan dan tidak selaras dengan beragam kesempatan belajar yang ditawarkan oleh penggunaan teknologi seluler. Bond, Zawacki-Richter & Nichols (2019:12) menyatakan evolusi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh, munculnya desain pengajaran, kesalahpahaman antara praktisi dan desainer pembelajaran, masalah pendidikan calon guru dan dalam layanan dan penyerapan teknologi oleh pendidik dan siswa, termasuk kepercayaan diri untuk melakukannya, keterampilan teknologi para pendidik dan siswa, serta kurangnya dukungan kelembagaan untuk menyediakan ruang dan waktu untuk pelatihan dan integrasi.

Modal positif dimiliki oleh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia terhadap berbagai kemajuan teknologi tampak dalam kebiasaan belajar mereka. Aslamiyah, Setyosari & Praherdhiono (2019:109) menyatakan kemandirian belajar mahasiswa Indonesia berada pada kategori positif, yang tampak pada ketidaktergantungan terhadap orang lain, berperilaku disiplin, dan berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri.

Di Indonesia, bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika merupakan bidang yang strategis yang untuk dikembangkan. Ilmu-ilmu yang mendukung bidang strategis tersebut misalnya pengetahuan dasar, ilmu kelautan, keteknikan, humaniora, kesehatan, ekonomi, bisnis, manajemen, komunikasi serta ilmu-ilmu sosial dan politik, belum mampu memberikan dampak menggembirakan. Faktor-faktor pengetahuan dan kuasa dalam pendidikan banyak memberikan pengaruh terhadap arah pengembangan bidang strategis tersebut. Zaini Tamin, et.al (2018:10) menyatakan pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengetahuan dan kuasa. Pengetahuan yang dapat diperoleh

melalui pendidikan dan kuasa yang diemban oleh pemerintah untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban Indonesia. Hastuti & Sutama (2019:44) menyatakan politik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia berpengaruh pada anggaran pendidikan dan sumberdaya pendidikan. Selain itu, politik juga berpengaruh terhadap kurikulum.

Reformasi pendidikan tinggi yang terjadi setelah tahun 1998-an, setelah kejatuhan rezim Soeharto, belum banyak memberikan dampak positif relasi politik dan pendidikan yang ideal. Rosser (2016:109) menyatakan pengalaman Indonesia dalam reformasi pendidikan tinggi neoliberal penuh tantangan. Agenda ini telah menghadapi perlawanan yang kuat dari unsur-unsur politik, militer, dan birokrasi predator yang dominan yang menduduki aparatur negara, klien korporat mereka, dan kekuatan rakyat, yang mengarah pada kelanjutan dari sistem pendidikan tinggi sentralis dan predator yang didirikan di bawah Soeharto. Harjatanaya & Hoon (2020:18) menyatakan pasca Soeharto multikulturalisme bersama-sama dengan konsep nasionalisme dan identitas nasional Indonesia, termasuk visi keanekaragaman yang diabadikan dalam moto nasional Bhinneka-Tunggal-Ika (*Unity-in-Diversity*) menjadi isu yang penting. Kristiansen & Pratikno (2006:513) menyatakan nilai dampak reformasi desentralisasi di Indonesia, dapat disimpulkan; administrasi layanan pendidikan tanpa transparansi dan akuntabilitas, pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak-anak tinggi dan meningkat, dan ada kesenjangan sosial dan geografis yang sangat besar.

Isu *consumption abroad*, perkembangan teknologi, politik pendidikan domestik membawa pengaruh terhadap perubahan kepemimpinan strategis pendidikan tinggi. Kepemimpinan strategis pendidikan tinggi mampu melihat berbagai perubahan sebagai upaya kepemimpinan berkaitan dengan penanganannya. Kepemimpinan strategis pendidikan tinggi mesti menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan kemudian menyatukan, mengkomunikasikan dan mengilhami orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya tersebut dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut.

Khan (2017:178) menyatakan institusi pendidikan tinggi beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang mencakup pengaruh dari faktor-faktor eksternal, teknologi baru untuk pengajaran dan pembelajaran, globalisasi, dan perubahan demografi mahasiswa. Manuver kompleksitas dan perubahan seperti itu membutuhkan strategi kepemimpinan yang fleksibel dan mendukung. Gambar 3.1 menjelaskan hubungan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan kepemimpinan strategis pendidikan tinggi tersebut.

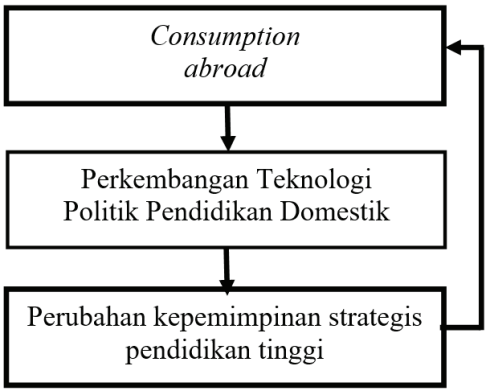

Gambar 3.1 Hubungan Antar Faktor Kepemimpinan Strategis

Untuk mendorong kepemimpinan starategis pendidikan tinggi yang memiliki kualitas bagus, perlu upaya yang keras dalam menghadapi berbagai tantangan dan implikasi perkembangan ilmu, praktik, dan penelitian. Pucciarelli & Kaplan (2016:311) menyatakan tiga tantangan inti pendidikan tinggi menghadapi dan yang memiliki implikasi mendasar untuk penelitian dan praktik: (1) kebutuhan untuk meningkatkan prestise dan pangsa pasar; (2) kebutuhan untuk merangkul pola pikir kewirausahaan; dan (3) kebutuhan untuk memperluas interaksi dan menghargai penciptaan bersama dengan para pemangku kepentingan utama.

Melalui kepemimpinan strategis pendidikan tinggi, kegiatan manajerial dapat dilakukan lebih efektif. Kepemimpinan fokus pada fungsi, tugas, dan perilaku. King & Boyatt (2015:1272) menyarankan pentingnya strategi kelembagaan yang ditargetkan untuk menyediakan sumber daya dan panduan yang memadai untuk implementasi yang efektif. Strategi ini perlu didukung oleh

program pengembangan staf yang beragam dan peluang untuk berbagi praktik di antara rekan kerja. Dalam mengembangkan pemahaman lebih lanjut dalam bidang ini, bermanfaat untuk mereplikasi penelitian dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya (termasuk tim kepemimpinan dan mahasiswa) untuk mengembangkan strategi kelembagaan yang responsif di semua tingkat implementasi. Penting juga untuk menyelidiki sejauh mana temuan ini direplikasi di tempat kerja lain yang ingin mengadopsi inovasi.

Kepemimpinan strategis pendidikan tinggi merupakan urusan banyak orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Setiap pemimpin berkewajiban melakukan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Gonzales (2019:43) menyatakan terdapat 5 filosofi kepemimpinan pendidikan yaitu esensialisme, perenialisme, progresivisme, behaviorisme, atau eksistensialisme (*The Five Key Education*). Barbuto & Davoudpour (2019:67) mengkonfirmasi perbedaan generasi dalam gaya kepemimpinan. Bracht, Junker & van Dick (2018:119) menyatakan hingga saat ini, konsep kepemimpinan difokuskan pada pencapaian tujuan tingkat individu atau tim, dan dengan demikian tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks sosial-organisasi yang lebih luas. Ncube (2010:77) menyatakan kepemimpinan adalah tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk transformasi.

Kepemimpinan strategis pendidikan tinggi perlu memadukannya dengan aktifitas manajemen yang baik. Peran kepemimpinan strategis pendidikan tinggi tidaklah signifikan terhadap perubahan organisasi, tidak ada artinya jika tanpa didukung oleh seluruh jenjang manajemen. Slamet (2019:20) menyatakan selain manajemen, untuk mengeksekusi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program-programnya, jika ingin melesatkan mutunya, pendidikan tinggi harus menerapkan kepemimpinan transformatif, organik, demokratik, dan transparan. Kalau manajemen lebih menekankan pada *technical side*, maka kepemimpinan lebih menekankan pada *socio-culture side* (*human side*).

Pemahaman terhadap keberagaman sangat penting dalam kepemimpinan strategis pendidikan tinggi. Lumby & Foskett (2016:95) menyatakan kepemimpinan internasionalisasi yang

dipertimbangkan dan berhati-hati, menjaga kekhasan dan mempromosikan kesetaraan di antara budaya adalah kepentingan komersial jangka panjang dari universitas, serta menawarkan manfaat individu dan sosial. Adserias, Charleston & Jackson (2017:315) menyatakan kepemimpinan strategis pendidikan tinggi perlu menerapkan agenda keberagaman di dalam lembaga yang terdesentralisasi, longgar, dan tahan perubahan seperti perguruan tinggi dan universitas adalah tantangan global. Pergeseran dalam iklim dan budaya organisasi sangat penting untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan agar agenda keragaman dapat berkembang. Sarjana pendidikan tinggi telah secara konsisten mengidentifikasi gaya kepemimpinan sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan kelembagaan yang sukses, terutama yang berkaitan dengan upaya agenda keberagaman.

Tugas kepemimpinan strategis pendidikan tinggi di tengah berbagai perubahan *consumption abroad*, perkembangan teknologi, dan politik pendidikan domestik, merupakan kunci dari keberhasilan sebuah perubahan besar dalam organisasi pendidikan. Pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik, agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap orang. Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan perubahan baru. Membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal-hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban. Pemimpin harus bisa membangkitkan semangat dan gairah perubahan dari setiap orang di dalam perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat, serta berjuang dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil perubahan yang lebih baik dari rencana yang ada. Pemimpin harus menyadarkan setiap orang, agar selalu menggunakan cara-cara profesionalisme dalam merespon setiap perubahan. Untuk itu, pimpinan pendidikan tinggi harus duduk bersama semua kekuatan sumber daya manusianya, untuk berbicara tentang perubahan-perubahan itu dengan cara-cara penuh inspirasi dan profesional. Pemimpin memiliki kemampuan untuk mengajak dan menggandeng setiap hati dan setiap pikiran, untuk berpikir dan bertindak dalam semangat meningkatkan

semua potensi perguruan tinggi, agar mampu menangani semua potensi yang dimiliki secara lebih baik, dengan cara mengubah hal-hal yang menghambat gerak sukses perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi Indonesia harus mengatasi masalah *consumption abroad*, perkembangan teknologi, politik pendidikan domestik, perubahan kepemimpinan strategis secara pragmatis melalui perubahan kepemimpinan strategis yang efektif untuk menjadi kompetitif secara global dan relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja. Seiring dengan globalisasi pendidikan, pembukaan pendidikan dihadapkan dengan peluang dan tantangan baru, yang berarti kita harus memiliki lebih banyak komunikasi dengan negara lain, meningkatkan kemampuan kompetitif, dan mengambil bagian aktif dari globalisasi pendidikan dengan pandangan globalisasi. Kepemimpinan strategis pendidikan tinggi mesti mampu melihat berbagai perubahan sebagai upaya kepemimpinan berkaitan dengan penanganannya. Kepemimpinan strategis pendidikan tinggi dapat menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan kemudian menyatukan, mengkomunikasikan dan mengilhami orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mendorong kepemimpinan starategis pendidikan tinggi yang memiliki kualitas bagus perlu upaya yang keras dalam menghadapi berbagai tantangan dan implikasi perkembangan ilmu, praktik, dan penelitian.

Hilangnya batas-batas negara (*internasionalization*) pendidikan ditakutkan memangkas akses pendidikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi tersebut mendorong terjadinya kesenjangan sosial karena pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tidak terjadi, walaupun sejak awal pemerintah berargumentasi bahwa ada pemberlakuan berbeda antara strata ekonomi. Ketakutan masyarakat tidak mendapatkan mutu pendidikan yang memadai juga beralasan, sebab mutu pendidikan tinggi asing dianggap lebih baik. Kondisi tersebut di atas menjadikan stigma bahwa pendidikan bermutu hanya untuk kalangan dengan strata ekonomi atas dan sebaliknya bagi masyarakat dengan strata ekonomi menengah ke bawah, biarpun begitu pendidikan tetap menjadi magnet bagi masyarakat. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang selama ini dikenal sebagai pendidikan yang bisa dijangkau dan mutunya relatif baik, juga menaikkan biaya pendidikan

bagi mahasiswa sebagai konsekuensi pengurangan subsidi dari pemerintah. Padahal tanggung jawab negara untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia merupakan amanah konstitusi. Kebijakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), jalur bidik misi, dan afirmasi pendidikan yang diterapkan pun belum banyak berbuat banyak untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan tinggi.

Program-program studi favorit dan dianggap memiliki kesempatan untuk pengembalian biaya pendidikan saat bekerja, menjadi ladang basah untuk meraup keuntungan kedua belah pihak, penyedia dan konsumen pendidikan. Transaksi biaya masuk pada program-program studi itu pun sekarang menjadi terang benderang dan lumrah, bahkan cenderung *'jor-joran'*. Perjumpaan kepentingannya mencapai titik temu pada harga yang harus dibayarkan untuk memasuki prgram-program studi fovorit tersebut, tanpa kaidah-kaidah akademik memadai.

Maka, mudah dijumpai sekarang kampus-kampus membuka kelas-kelas pararel panjang dan penuh sesak dengan mahasiswa. Kuliah-kuliah yang mestinya membutuhkan pendekatan individual menjadi kelas-kelas klasikal besar, seharusnya materi-materi kuliah dilakukan praktik untuk mendalami substansi cukup dilakukan demonstrasi melalui tayangan. Jumlah mahasiswa yang besar membutuhkan tempat praktik yang besar, laboratorium-laboratium kampus tidak mampu menampung. Pada saatnya mahasiswa-mahasiswa itu keluar dari perguruan tinggi, menyandang kesarjanaan yang megah, menjadi pribadi-pribadi dengan kompetensi tidak memadai. Secara umum persoalan-persoalan pendidikan tinggi ini tampak pada beberapa aspek yang menonjol. Aspek-aspek itu antara lain: persoalan (1) belum optimalnya penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing; (2) upaya yang masih rendah dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel; (3) keterbatasan penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi; (4) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi berkualitas dan berdaya saing

yang belum merata di seluruh provinsi; (5) masih minimnya upaya peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepda masyarakat yang berkualitas, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan (6) penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi berkualitas yang belum merata di seluruh provinsi.

Secara spesifik tata kelola pendidikan tinggi yang seharusnya memiliki dampak perluasan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, dan kemiskinan malah menunjukkan pengaruh sebaliknya. Pengaruh sebaliknya dari dampak tata kelola pendidikan tinggi oleh disebabkan karena sasaran pokok pembangunannya yaitu semata-mata pada upaya memaksimalkan peningkatan angka pertumbuhan. Akibatnya, pengaruh pendidikan atas distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan absolut banyak diabaikan. Silang sengkarut tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia justru meningkatkan dan bukannya menurunkan ketidakadilan pendapatan. Saling keterkaitan antara bangsa-bangsa lain juga memiliki implikasi terhadap persoalan ini, terutama arus deras globalisasi dan munculnya teknologi-teknologi baru.

Dalam konteks pengembangan ilmu dan teknologi, upaya strategis nasional dapat dilakukan dengan mengelola penelitian ilmu-ilmu dasar dan pengelolaan ilmu-ilmu teknologi terapan. Penelitian dasar digunakan untuk menunjang pengelolaan bahan dasar yang kaya di Indonesia, seperti di ungkap di atas jumlahnya melimpah. Sementara ilmu-ilmu teknologi terapan digunakan untuk memperkuat produksi dalam negeri. Namun, kesulitan tata kelola pendidikan tinggi yang segera tampak dari alternatif ini yaitu pengabaian pertimbangan situasi global. Mas'oed (2002:36) mengingatkan bahwa atas nama kepentingan nasional seringkali pemerintah bersikap mendukung kebijakannya dengan penggunaan kekuatan politik. Pengalaman menunjukkan bahwa proses seperti ini sulit dikendalikan oleh masyarakat melalui proses demokratis. Selalu ada alasan untuk menghindarkan para pejabat pemerintah dari keharusan untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya pada masyarakat. Artinya, tata kelola pendidikan tinggi harus tetap melalui proses demokratis dengan melibatkan masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat ini tidak terjadi dengan sendirinya jika pemerintah tidak melakukan upaya sistemik.

Mekanisme pertanggungjawaban kebijakan pun semestinya menempatkan masyarakat sebagai kekuatan kontrolnya. Secara umum, proses tersebut mewujud dalam otonomi PT yang diiringi dengan akuntabilitas.

Otonomi tidak mengarah pada lepasnya tanggungjawab pemerintah. Otonomi harus menjamin akses masyarakat ke pendidikan tinggi dengan tidak menyerahkan pendidikan tinggi menerapkan mekanisme pasar (liberalisasi pendidikan). Sukrisno (2011:81) menyebutkan bahwa manajemen pendidikan tinggi dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yaitu perlunya penguatan pada aspek otonomi, mutu, dan akuntabilitas pendidikan tinggi. Sa'ud (2011:262) menegaskan bahwa dalam konteks pengambagan sistem penjaminan mutu, setiap pendidikan tinggi perlu meredefinisi strateginya yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan pasar kerja dengan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saingnya, baik di pasar kerja nasional maupun internasional.

BAB 4
COMMERCIAL PRESENCE & INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN

Masalah perdagangan dalam pendidikan memicu spekulasi dan perdebatan tentang kemungkinan implikasinya. Kualitas pendidikan dan distribusi kesempatan pendidikan merupakan masalah yang diperdebatkan dalam kaitannya dengan perdagangan dalam pendidikan. Di negara maju, seperti Amerika Serikat, ekspor layanan pendidikan berada di peringkat ke-5 di antara semua ekspor layanan AS, senilai US $ 45,3 miliar pada tahun 2018. Penyerapan tenaga kerja di sektor jasa menjadi urusan yang terus tumbuh, awal abad 20 hanya 3 di antara 10 orang pekerja di Amerika Serikat bekerja di sektor jasa, sisanya bekerja dalam sektor pertanian dan industri. Di akhir abad 20 juga, Kotler (2000) menyatakan sektor jasa di Amerika Serikat berkontribusi terhadap sekitar 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih dari 50% total pengeluaran konsumen dibelanjakan untuk jasa, diperkirakan mencapai 79% dari total lapangan kerja.

Saat ini sektor jasa menyumbang setidaknya 50% dari PDB di lebih dari setengah negara dunia dan sekitar 65% dari PDB dunia. Tahun 2020, terdapat 5 negara dengan peringkat paling besar penyerapan tenaga kerja di sektor jasa yaitu Makau (95.7%), Luksemburg (80.6%), Britania Raya (80.4%), Amerika Serikat (79.1%), dan Finlandia (78.4%). Ekonomi sektor jasa di Amerika $ 15.1 triliun dengan pekerjaan 79.14%, Brasil $ 1.3 triliun dengan 70.18% pekerjaan, dan Meksiko $ 700.8 miliar dengan pekerjaan 61,05%. Seperti Amerika, sebagian besar negara di Eropa sangat bergantung pada sektor jasa. Misalnya, lebih dari 80% dari semua karyawan di Inggris Raya bekerja di sektor jasa. Setidaknya 40% dari populasi setiap negara di wilayah ini bekerja di bidang jasa. Dalam kebanyakan kasus, pekerjaan di sektor ini melebihi 50% dari populasi tiap negara. Di Asia, China, Jepang, dan India memimpin semua negara Asia lainnya dalam hal nilai tambah sektor jasa. Namun, meskipun Cina dan India adalah dua dari tiga negara Asia teratas di sektor ini, mereka adalah dua dari sedikit negara dengan di bawah 50% populasinya bekerja di sektor jasa. Sementara itu, sebagian besar negara Asia lainnya memiliki 50% atau lebih lapangan kerja di sektor ini. Sassen (2021) mengatakan zaman kita saat ini sangat ditandai dengan meningkatnya kapasitas dari sebagian besar aktor berpengaruh untuk terhubung di seluruh dunia. Namun, ini hanyalah sebagian kemampuan, sebagian besar

karena populasi besar dari sebagian besar orang miskin menempati lahan yang sangat luas. Dan meskipun ditandai dengan kemiskinan, imobilitas, dan ketidakberdayaan, kehadiran miliaran orang miskin muncul sebagai faktor dominan dalam pembentukan kembali planet kita yang sedang berlangsung.

Di Indonesia, penduduk bekerja pada sektor perdagangan meningkat sebanyak 1.8 juta (6.94%) menjadi 28.50 juta orang. Sementara pada sektor kemasyarakatan meningkat sebanyak 380.000 orang (1.96%) menjadi 19.79 juta orang. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan paling siginifikan yakni sektor pertanian sebanyak 1.8 juta orang (4.56%), sektor industri sebanyak 420.000 (2.50%), dan sektor keuangan sebanyak 170.000 (4.66%). Borchert dan Mattoo (2009) dan Ariu (2016) menyatakan perdagangan jasa terbukti lebih tahan terhadap krisis global 2008 daripada perdagangan barang dagangan.

Mode 3, *commercial presence*, terjadi melalui penyediaan layanan oleh pemasok layanan dari satu anggota, melalui kehadiran komersial di wilayah anggota lainnya. GATS menyadari bahwa pemasok layanan sering kali perlu membangun kehadiran komersial di luar negeri untuk memastikan kontak yang lebih dekat dengan konsumen di berbagai tahap produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman serta dalam konteks layanan purna jual. Kehadiran komersial di pasar luar negeri tidak hanya mencakup badan hukum dalam pengertian hukum yang ketat, tetapi juga badan hukum yang memiliki beberapa karakteristik yang sama, seperti kantor perwakilan dan cabang. Yang relevan dalam konteks ini adalah, misalnya, layanan keuangan yang disediakan oleh cabang atau anak perusahaan bank asing, layanan medis yang disediakan oleh rumah sakit milik asing, dan kursus atau pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah milik asing.

Penyediaan layanan pada mode *commercial presence* telah mendorong masyarakat global yang berubah dengan cepat. Khatun (2019) menyatakan pengetahuan adalah kekuatan pendorong dalam ekonomi dan masyarakat global yang berubah dengan cepat. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia khusus menentukan kompetensinya di pasar global. Globalisasi memiliki dampak multidimensi pada sistem pendidikan. Dalam waktu dekat, globalisasi berarti sistem pendidikan yang lebih

kompetitif dan deregulasi yang meniru pasar bebas tetapi dengan lebih banyak tekanan padanya untuk memastikan bahwa yang berikutnya generasi pekerja dipersiapkan untuk beberapa pasar kerja amorf abad ke-21. Manfaat globalisasi bertambah ke negara-negara dengan sumber daya manusia yang sangat terampil dan itu adalah kutukan bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya manusia khusus tersebut.

Di Indonesia, terjadi penolakan berbagai komponen masyarakat (sepanjang tahun 2020), yang kemudian kluster pendidikan dan kebudayaan di hapus dari RUU Cipta Kerja. Berikut ini pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud: pada kluster Pendidikan dan Kebudayaan tentang (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. "Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan 'usaha' sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Tujuan bagian ini yaitu mengetahui berbagai isu dan strategi manajemen pendidikan atas perubahan paradigma *commercial presence*.

Berbagai Isu Commercial Presence

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang diperluas menjadi GATS (General Agreement on Trade in Services) merupakan salah satu hasil dari Putaran Uruguay, yang luar biasa adalah bahwa untuk pertama kalinya investasi dan layanan serta hak cipta dianggap sebagai komoditas. Diprakarsai pada contoh pertama oleh AS di Putaran Uruguay, GATT diperluas menjadi GATS, menjadi seperangkat aturan multilateral pertama yang ditegakkan secara hukum yang disimpulkan pada perdagangan jasa secara keseluruhan, dari lintas batas serta semua cara yang mungkin

untuk menyediakan layanan termasuk membangun keberadaan komersial di pasar ekspor. GATS menetapkan program kerja yang biasanya disebut sebagai agenda bawaan. Menurut Pasal XIX, anggota WTO "... akan memasuki putaran negosiasi berturut-turut untuk mencapai tingkat liberalisasi yang semakin tinggi.

Secara bruto, perdagangan jasa menyumbang seperempat dari perdagangan global barang dan jasa; pangsa layanan dalam total perdagangan berlipat ganda jika kita memasukkan perdagangan dalam istilah nilai tambah (WTO, 2019). Sayangmya, untuk negara yang tidak maju, perdagangan jasa internasional mendorong masyarakat untuk bertindak konsumtif dan cenderung bergantung pada negara maju dalam pelayanan jasa yang diberikan. Selain itu Pasar produk jasa dalam negeri menjadi terbatas, perusahaan jasa internasional menaungi perusahaan lokal, dan banyak industri jasa kecil gulung tikar karena kalah bersaing. Varghese (2013:7) menyatakan kehadiran komersial penyedia di negara lain dalam bentuk kampus cabang atau pengaturan kembaran dan waralaba antara universitas dari negara maju dan berkembang, tetapi juga di antara universitas di negara maju secara keseluruhan. Contoh dari penerapannya yaitu pendirian cabang-cabang lokal atau kampus satelit, kemitraan kemitraan, dan Pengaturan kepemilikan dengan lembaga lokal. Ukuran/potensi pasarnya – menanam minat dan potensi kuat – untuk pertumbuhan di masa depan dan paling kontroversial karena tampaknya menetapkan aturan internasional tentang investasi asing, yang mungkin mengabaikan lokalitas.

Dalam bidang pendidikan, investasi asing tampak pada operasi lembaga pendidikan, layanan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Sebagian besar kehadiran komersial terjadi melalui usaha patungan penyedia asing dan investor dengan mitra lokal untuk memastikan akses ke tenaga pendidik lokal yang memenuhi syarat dan pasokan siswa yang membayar. Siswa asing (mode 2) dan kehadiran komersial asing (mode 3) dalam pendidikan atau dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas karena peningkatan ketersediaan teknologi yang canggih. Pada saat yang sama, hal itu dapat mendistorsi sistem pendidikan. Kualitas pendidikan atau lulusan di sektor publik mungkin terganggu karena hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas pada masyarakat yang tidak mampu mengakses.

Tahun 2020, terdapat 10 jaringan lembaga pendidikan asing di Indonesia, dengan jumlah 681 sekolah/satuan pendidikan kerja sama untuk jenjang prasekolah, dasar, dan menengah, yang terdiri dari 72 PAUD, 115 TK, 196 SD, 176 SMP, dan 122 SMA. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Lembaga pendidikan asing membuat Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang dulu disebut sebagai sekolah internasional, merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia. Lembaga pendidikan asing terbut yaitu: Cambridge Assessment International Education (Inggris), International Baccalaureate (Swiss), Pearson Education, Ltd. (Inggris), Fieldwork Education, Ltd. (Inggris), ACT Education Solutions (Australia), The New South Wales Education Standards Authority (NESA) (Australia), Montessori Australia Foundation (Australia), Council for The Indian School Certificate Examinations (India), Highscope Educational Research Foundation (Amerika Serikat), dan Association of Christian Schools International (ACSI) (Amerika Serikat). Beruntung, klaster pendidikan di hapus dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Jika tidak dihapus, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) banyak berubah. Khususnya soal keleluasaan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing di Indonesia. Tanpa akreditasi pun, lembaga pendidikan asing itu bisa masuk ke Indonesia, bahkan tidak harus bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional. Jian Xu (2009) menyatakan ketentuan terkait GATS tentang akses pasar dan perlakuan nasional adalah dasar hukum yang menjadi dasar anggota WTO negara dapat membuat komitmen khusus dalam layanan pendidikan.

Sekolah internasional sebagaimana didefinisikan oleh ISC Research (2021), adalah sekolah untuk anak-anak berusia antara 3 dan 18 tahun yang menawarkan kurikulum internasional atau kurikulum selain kurikulum nasional negara tersebut (seringkali Kurikulum Nasional Inggris atau kurikulum gaya Amerika). Sebagian besar seluruhnya berbahasa Inggris; yang lainnya bilingual, dengan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar utama.

Pertumbuhan dinamis sekolah internasional di negara-negara Asean telah menjadi hasil dari permintaan yang tumbuh

pesat untuk pendidikan internasional dari anak-anak ekspatriat dan, yang lebih penting, dari orang tua lokal yang lebih kaya dari kelas atas yang berkembang pesat. Tetapi pertumbuhan itu tidak terjadi, jika pemerintah tidak mencabut pembatasan partisipasi anak-anak lokal di sekolah-sekolah ini. Di beberapa negara, liberalisasi disertai dengan penerapan persyaratan baru yang memenuhi kebutuhan lokal dan mencerminkan visi yang berbeda dalam melindungi konsumen. Malaysia merupakan salah satu negara Asean yang paling proaktif mendorong pertumbuhan pendidikan internasional, termasuk sekolah internasional. Pembatasan 40% sebelumnya pada pendaftaran anak-anak lokal di sekolah internasional semuanya dicabut pada tahun 2012. Selain itu, pemerintah telah memperkenalkan insentif, termasuk pembebasan pajak penghasilan selama 5 tahun sebesar 70%, untuk sekolah internasional baru dan mengambil langkah-langkah untuk menarik perhatian yang terkenal di dunia untuk mendirikan afiliasinya di Malaysia.

Saat ini menjamur berbagai label sekolah internasional, terutama setelah penghapusan SBI/RSBI. Tetapi, tidak semua sekolah dengan label internasional yang mahal bayarannya tersebut adalah SPK. Ciri utama SPK adalah menggunakan kurikulum asing. Ditambah dengan kurikulum nasional khusus tiga mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, dan Bahasa Indonesia. Keberadaaan SPK diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Keberadaan sekolah berlabel internasional, awalnya diatur oleh Undang-Undang Dasar nomor 48 tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing. Dalam aturan tersebut, keberadaan sekolah asing diutamakan untuk anak-anak diplomat dan sebagian kecil anak-anak ekspatriat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak warga Indonesia yang berbondong-bondong mengupayakan anak-anaknya bersekolah dengan label tersebut.

Penjualan jasa sekolah internasional (dari afiliasi pendidikan asing, dalam bahasa FDI) di seluruh Asean adalah $ 5,1 miliar pada tahun 2019, juga sepersepuluh dari penjualan global sekolah

internasional. Mereka adalah yang terbesar di Singapura ($1,315 juta), diikuti oleh Thailand ($ 954 juta), Malaysia ($ 785 juta), Indonesia ($ 729 juta) dan Vietnam ($ 676 juta). Di negara-negara Asean lainnya, penjualan jauh lebih kecil. Perbedaan antara penjualan tertinggi dan jumlah siswa yang agak moderat menunjukkan bahwa di Singapura biaya sekolah rata-rata per siswa adalah yang tertinggi di antara negara-negara Asean: $ 18,660 per tahun. Di Thailand, $ 11.906, di Malaysia $ 7.760, dan di Indonesia $ 7.163.

Satuan pendidikan kerja sama yang dipatok mahal (lihat Tabel 4.1), di atas Rp 300 juta, bukan sekolah yang ramah pada umumnya keuangan keluarga dan pendidikan di Indonesia. BPS mencatat pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada 2019 mencapai rata-rata Rp 59,1 juta. Kondisi umum pendidikan di Indonesia sepeti data BPS (2020) menyebutkan pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat lebih dari 70 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan kondisinya rusak ringan/sedang maupun rusak berat. Secara rata-rata, rasio murid per rombonganbelajar pada setiap jenjang pendidikan telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Fenomena sekolah sambil bekerja bukan merupakan hal baru di Indonesia. Dari 100 siswa umur 10-24 tahun, kurang lebih terdapat 7 siswa yang bekerja. Pada tahun 2020, 1 dari 1.000 siswa SD/sederajat putus sekolah. Kemudian, dari 1.000 siswa SMP/sederajat, 10 di antaranya putus sekolah. Terakhir, pada jenjang SM/sederajat, 11 dari 1.000 siswa SM/sederajat putus sekolah.

Tabel 4.1 Rata-rata Biaya Sekolah Internasional

Tingkatan	Enrolment Fee	Tuition Balance	Capital Fee	Total Biaya
Playgroup	Rp22.000.000	Rp239.500.000	Rp54.600.000	Rp316.100.000
TK	Rp22.000.000	Rp343.000.000	Rp54.600.000	Rp419.600.000
SD	Rp22.000.000	Rp347.000.000	Rp54.600.000	Rp423.600.000
SMP	Rp22.000.000	Rp402.000.000	Rp54.600.000	Rp478.600.000
SMA	Rp22.000.000	Rp402.000.000	Rp54.600.000	Rp478.600.000

Sumber: https://www.stella-maris.sch.id/blog/

Globalisasi dan internasionalisasi berbeda maknanya, Altbach & Knight (2007:290) menyatakan globalisasi dan internasionalisasi terkait tetapi tidak sama. Globalisasi adalah konteks tren ekonomi

dan akademik yang merupakan bagian dari realitas abad ke-21. Internasionalisasi mencakup kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh sistem dan institusi akademik — dan bahkan individu — untuk mengatasi lingkungan akademik global. Motivasi untuk internasionalisasi termasuk keuntungan komersial, pengetahuan dan akuisisi bahasa, meningkatkan kurikulum dengan konten internasional, dan banyak lainnya. Inisiatif khusus seperti kampus cabang, pengaturan kolaboratif lintas batas, program untuk siswa internasional, pembentukan program dan gelar Bahasa Inggris menengah, dan lainnya telah diberlakukan sebagai bagian dari internasionalisasi. Tight (2021) menyatakan mengenai internasionalisasi, terdapat tipologi delapan lapisan dalam evolusi pemikiran internasionalisasi: (1) merekrut siswa internasional; (2) mengajar siswa internasional; (3) menumbuhkan universitas perusahaan internasional melalui perekrutan staf dan siswa internasional yang kompetitif; (4) kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi internasional; (5) 'internasionalisasi di rumah', yang berarti internasionalisasi kurikulum untuk pelajar lokal; (6) pendidikan untuk kewarganegaraan global; (7) e-learning yang terhubung; dan (8) pendidikan untuk planet, seluruh bumi, dilandasi kesadaran untuk mengakses.

Sama halnya dengan di dunia, di negara-negara Asean, kelompok terbesar anak-anak yang bersekolah di sekolah internasional pada tahun 2018 adalah anak-anak lokal, dengan bagian mereka dalam jumlah siswa berkisar dari 52% di Indonesia dan Thailand, hingga 60% di Malaysia, hampir 65% di Kamboja dan 72% di Vietnam. Hanya di Singapura, yang membatasi partisipasi anak-anak lokal di sekolah internasional, porsinya kecil - 12% pada 2018.

Melalui berbagai label sekolah internasional, sekolah di seluruh dunia mulai mengadopsi kurikulum yang berupaya mengubah siswa menjadi warga negara "global". Woods & Kong (2020) menyatakan pendidikan kewarganegaraan global, bagaimanapun, adalah abstraksi homogen yang telah dikritik karena mencerminkan dan mereproduksi (neo) nilai-nilai liberal Barat; dengan demikian, hal itu dapat dirusak oleh penyampaiannya dan penerapannya sehari-hari dalam konteks non-Barat. Pada sekolah internasional, dapat menegakkan sikap dan perilaku eksklusif, yang pada gilirannya

dapat merusak inklusi yang dibayangkan dari kewarganegaraan global.

Sikap dan perilaku kewarganegaraan, salah satunya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran dalam sekolah RSBI/SBI dinilai dapat mengikis jati diri bangsa, melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, yang akhirnya dibubarkan. Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) pada sekolah-sekolah pemerintah. Pembubaran itu disampaikan MK dalam sidang putusan pembatalan Pasal 50 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/1/2013). Pembatalan tersebut, memberikan angina segar untuk berdirinya sekolah internasional swasta.

Di Indonesia, kondisi kontradiktif dari keberadaan berbagai label sekolah internasional, yaitu akses pendidikan yang belum merata dan angka putus sekolah yang cukup besar. Sumber BPS tahun 2017, pada jenjang SM/SMK/MA/Paket C masih terdapat 18 provinsi (52,94%) yang masih berada di bawah rata-rata APM nasional. Jenjang sekolah dasar APM-nya juga masih rendah (55,88% atau 14 provinsi), masih jauh di bawah rata-rata nasional (97,19%). Artinya, masih ada 1, 94% (490.529) anak yang tidak sekolah, jumlah seluruh siswa SD sebanyak 25.285.045. Jumlah tersebut menjadi lebih besar jika digabungkan dengan anak SMP/MTs/Paket B sebesar 21,06% atau 2.112.550 anak tidak sekolah, dari jumlah siswa SMP/MTs/Paket B keseluruhan 10.031.106. Jumlah anak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun pada tahun tersebut sebanyak 2.603.079 anak. Jumlah tersebut tidak bergeser jauh dari 30 tahun lalu, penelitian Suryadi (1992), Indonesia di tahun 1989 masih terdapat 30% anak putus sekolah di dalam perjalanannya untuk menamatkan pendidikan dasar. Belum lagi akibat pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perlemahan di bidang pertumbuhan ekonomi. Sampai bulan Juni 2020, ekonomi Indonesia tumbuh di 2,97 persen, masih positif namun ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan yang biasanya di atas 5 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi, dapat diperkirakan angka putus sekolah pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan

tahun 2020 dapat melebihi 33% atau 14,9 juta dari 45,3 juta jumlah seluruh siswa Indonesia.

Besarnya jumlah anak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar tersebut memperlihatkan masih lemahnya tata kelola pendidikan untuk mendorong bebasnya generasi penerus dari belenggu kebodohan. Negara tidak bisa mengatasi persoalan putus sekolah, dukungan pembiayaan yang digelontorkan untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun belum berhasil dengan baik. Wajib belajar ini sudah ada sejak tahun 1950 (saat itu 6 tahun) melalui Pasal 30 UUDS RI yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 dinyatakan bahwa provinsi mempunyai wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan sekolah dasar. Saat ini, bantuan operasional sekolah yang setiap tahun sebesar 50 triliun kurang efektif dan efisien menjangkau anak-anak supaya tidak putus sekolah. Latar belakang putus sekolah ditengarai bermacam-macam sebabnya.

Putus sekolah atau tidak sekolah, mendorong pekerja anak-anak. Jenis pekerjaan yang bisa diakses biasanya informal, dengan daya tawar lemah pada buruhnya dan rentan kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu. Halonen & Liukkunen (2021) menyatakan mereka yang berpendidikan rendah kehilangan pekerjaan, dan pekerjaan baru diberikan kepada orang-orang yang lebih muda dengan pendidikan yang lebih tinggi. Di negara-negara industri "lama", masyarakat juga terpolarisasi menjadi pendukung dan penentang globalisasi. Investasi pada masyarakat tidak hanya melalui pendidikan tetapi juga melalui pekerjaan dan lembaga terkait pekerjaan sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, tenaga kerja harus memiliki dampak ekonomi, kemanusiaan dan lingkungan. Masyarakat masa depan semakin berbasis informasi, dan ini membutuhkan penciptaan kesempatan untuk belajar seumur hidup.

Paling utama penyebab putus sekolah yaitu krisis ekonomi yang membelit keluarga, mendorong anak tidak melanjutkan sekolah. Saepuloh dan Suherman (2018) menyatakan penyebab putus sekolah yaitu: ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya usaha dari orang tua dalam membujuk anaknya dalam melanjutkan pendidikan, dan kurang meratanya pendataan dari pemerintah

setempat dalam merespon program pendidikan sehingga masih banyak orang yang kurang mampu tidak mendapatkan program tersebut. Hasil penelitian Dewi, Zukhri, dan Dunia (2014) menunjukkan bahwa ada enam faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. Faktor tersebut yaitu ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya, dan lokasi sekolah. Faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan, artinya bahwa perhatian orang tua mampu menjelaskan penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. Aristin (2015) menyatakan faktor-faktor putus sekolah yaitu karena jarak tempat tinggal dengan sekolah, jenis pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan.

Pada jenjang pendidikan tinggi, di era Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, menyatakan sejumlah perguruan tinggi asing akan beroperasi di Indonesia pada tahun 2018. Ada 5 sampai 10 universitas asing yang sedang bersiap membuka perwakilan di Indonesia. Nasir mencontohkan beberapa perguruan tinggi asing yang tertarik beroperasi di Indonesia ialah Universitas Cambridge dari Inggris serta Universitas Melbourne dan Universitas Quensland dari Australia. Monash University melalui Yayasan Monash University Indonesia membuka pusat pembelajaran di Gedung GOP 9 kawasan BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang Selatan. Medcom.id (17 Februari 2020) memberitakan terdapat 30 perguruan tinggi asing antre 'masuk' ke Indonesia.

Terdapat juga model kerja sama dengan uar negeri untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia, seperti tujuh perguruan tinggi nasional dan tiga universitas asing dari Uni Eropa membentuk konsorsium Indonesia *Higher Education Leader* (iHiLead). Untuk universitas di Indonesia, praktik kerja sama ini dianggap strategis, mengingat posisi universitas memainkan peran penting mereka dalam pembangunan, mereka "akan membutuhkan kemitraan tidak hanya dengan aktor lokal dan regional dan pemangku kepentingan, tetapi juga dengan universitas, bisnis, dan pemerintah negara maju. Lobnibe (2020) menyatakan pengembangan kemitraan internasional untuk pengajaran dan penelitian telah menjadi salah satu strategi paling signifikan untuk

internasionalisasi di antara universitas-universitas di seluruh dunia. Danyathi (2016) menyatakan eksistensi perguruan tinggi asing di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi berimplikasi negatif. Terjadi komersialisasi pendidikan, lepasnya tanggung jawab pemerintah di sektor pendidikan, timbulnya kesenjangan antar perguruan tinggi asing dan lokal, degradasi kedaulatan negara, dan pudarnya nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Bassett (2006) menyebutkan bahwa pendidikan tinggi semakin diperlakukan sebagai produk komersial.

Terdapat peluang dalam internasionalisasi pendidikan, Nhamo & Mjimba (2020) menyatakan globalisasi mendorong perguruan tinggi ke arah keterlibatan internasional yang lebih besar sementara kekuatan internasionalisasi menciptakan peluang bagi kebijakan dan praktik perguruan tinggi yang dilakukan oleh lembaga akademik untuk mengatasi dinamika lingkungan akademik global. Inisiatif internasionalisasi khusus akan menciptakan peluang untuk pendirian kampus cabang, pengaturan dan program pembelajaran lintas batas, menyiapkan gelar tentang isu-isu internasional seperti studi global dan multikultural, pendidikan perdamaian, dan menawarkan program dan kursus online global.

Di dalam buku pedoman perjanjian WTO disebutkan bahwa sektor pedidikan ada kesepakatan tegas di berbagai untuk memungkinkan negara memberikan pengecualian kecil untuk hak pertunjukan publik. Taubman, Wager & Watal (2020) menyatakan contoh pengecualian kecil yang diberikan dalam konferensi revisi termasuk pertunjukan musik dalam upacara keagamaan, oleh band militer atau dalam konteks pendidikan. Konvensi mengizinkan negara berkembang, dengan syarat tertentu, untuk menggunakan lisensi wajib sehubungan dengan hak terjemahan dan reproduksi untuk tujuan pendidikan.

Pada bidang jasa, kehadiran komersial didefinisikan di GATS sebagai “semua jenis bisnis atau pendirian profesional” (pasal XXVIII, para. (D)). Ini termasuk “melalui konstitusi, akuisisi atau pemeliharaan badan hukum, atau pembentukan atau pemeliharaan cabang atau kantor perwakilan, di dalam wilayah Anggota” (pasal XXVIII, paragraf. (D) (i) dan (d) (ii)) (lihat bab II dan IV untuk informasi lebih lanjut tentang definisi badan hukum

dan keberadaan komersial). Oleh karena itu, kehadiran komersial terkait erat dengan tujuan pemasok asing untuk mendapatkan kepentingan abadi di wilayah ekonomi lain untuk memberikan layanan kepada konsumen di wilayah atau wilayah lain itu. Arus investasi langsung dianggap terkait dengan kasus tersebut. Seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini, pengaturan jangka pendek (yaitu, membangun kehadiran komersial selama kurang dari satu tahun tanpa hubungan investasi langsung) yang mungkin disukai oleh pemasok asing (misalnya, mereka yang terlibat dalam beberapa proyek konstruksi jangka pendek) akan memenuhi syarat seperti halnya penyediaan layanan melalui Mode 3 di bawah GATS. Transaksi terkait akan dilindungi oleh akun layanan dari neraca pembayaran

Hambatan yang teridentifikasi untuk membangun kehadiran komersial meliputi: (1) ketidakmampuan untuk diakui sebagai lembaga gelar atau sertifikat, misalnya tidak dapat memperoleh status dari negara untuk diakui sebagai universitas; (2) langkah-langkah yang membatasi investasi langsung oleh penyedia asing, misalnya karena plafon ekuitas — karenanya diperlukan beberapa jenis kembaran keuangan); (3) persyaratan nasional tentang suatu lembaga dalam mendirikan suatu lembaga, termasuk keuntungan nasional seperti hibah; (4) tes kebutuhan yang dikontrol secara nasional atau profesional - mengendalikan pasokan jenis-jenis pekerjaan tertentu dan karenanya nilainya — seperti dalam kasus kedokteran; (5) pembatasan guru asing — WTO menetapkan kasus guru Yunani, atau Prancis dan peraturan profesor asing; (6) keberadaan monopoli pemerintah — yang membuatnya sulit untuk hadir secara komersial; dan (7) subsidi pemerintah tingkat tinggi atas institusi lokal — dan yang tidak tersedia untuk penyedia asing.

Di bidang pendidikan, kita dapat membayangkan aspek-aspek pasar bebas yang dapat dengan cepat didorong dalam proses negosiasi GATS, seperti kehadiran komersial atau pasokan lintas-perbatasan, dan aspek-aspek yang mengalami perundingan yang lebih sulit sebagai akibatnya. Kepekaan politik mereka, seperti keberadaan orang perseorangan, karena mereka lebih cenderung memiliki efek, baik langsung maupun tidak langsung, pada undang-undang imigrasi. Di sisi lain, tingkat tinggi kodifikasi aturan dalam WTO menunjukkan mode prosedur politik yang berbeda.

Secara umum, pendorong utama globalisasi layanan meliputi deregulasi dan pembukaan pasar domestik yang tertutup, dampak dari GATS, peningkatan permintaan layanan yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi komunikasi yang maju, dan tren ke arah alih daya layanan. Perdagangan jasa simpul yang tidak bisa dilepaskan, yang pada era globalisai rentan menimbulkan dampak negatif. Bawon, Palandeng & Baftim (2020) menyebutkan dampak negatif yaitu diantaranya adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak yang kuat ekonominya, menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat, munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah, perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil.

Mode *commercial presence* berdampak negatif jika tidak direspon dengan berbagai kebijakan negara yang adaptif, terutama dengan dasar keterbatasan dan tantangan sistem pendidikan nasional. Dampak negatif timbul karena ada kesulitan besar yang terkait dengan pengukuran masing-masing dari mode penyampaian perdagangan jasa sebagaimana didefinisikan dalam GATS, terutama pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, kehadiran komersial, dan pergerakan orang perseorangan. Drake-Brockman (2011) menyatakan konsekuensinya adalah luasnya perdagangan global dalam jasa sangat diremehkan dan sektor jasa tidak menerima perhatian kebijakan perdagangan dan ekonomi yang semestinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintensifkan upaya resmi untuk meningkatkan pengumpulan data ekspor layanan dan untuk mengukur secara khusus penyampaian layanan internasional mode 3 yaitu keberadaan komersial.

Terdapat dampak buruk GATT/WTO, Kouwoaye (2021) menyatakan keanggotaan GATT/WTO meningkatkan kemiskinan secara signifikan di seluruh distribusi kemiskinan tanpa syarat. Negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi mengalami peningkatan kemiskinan yang lebih besar setelah bergabung dengan GATT/WTO dibandingkan negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Birdie (2021) menyatakan paruh kedua abad ke-20 telah menyaksikan gelombang globalisasi melanda seluruh dunia. Globalisasi memengaruhi pilihan konsumen lintas budaya. Berapa tahun terakhir telah terlihat peningkatan konsumerisme bersama

dengan pilihan yang tak terhitung banyaknya dan akses ke produk dengan kualitas yang lebih baik. Aerni (2018) menyatakan dampak globalisasi tidak hanya berlaku untuk pekerja harian tanpa pendidikan atau pelatihan formal, tetapi juga lulusan universitas di negara berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke bisnis keluarga dan gagal mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik di LSM asing, perusahaan multinasional atau pemerintah setelah lulus. Halonen & Liukkunen (2021) menyatakan munculnya pembagian kerja internasional merupakan proses yang panjang. Pada pergantian milenium, berbagai belahan dunia menyaksikannya secara berbeda. Secara umum, ada pembagian antara negara industri dan negara berkembang — antara Utara dan Selatan. Peninjauan lebih dekat menunjukkan bahwa ada pemenang dan pecundang di kedua grup. Ada juga pemenang dan pecundang di masing-masing negara.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta. Apabila dibandingkan tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta, lalu pada 2016 menjadi 28,01 juta. Pada 2017, jumlahnya menjadi 27,77 juta dan pada 2018 menjadi 25,95 juta. Sementara jika dilihat berdasarkan lokasinya, kemiskinan terbesar berada di kawasan perdesaan. Jumlahnya mencapai 15,26 juta orang atau 12,82%. Sedangkan, di perkotaan jumlahnya 11,16 juta orang atau 7,38%. Implikasinya, menurut Suryahadi, Izzati & Suryadarma (2020) Indonesia perlu menerapkan program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat miskin baru selain masyarakat miskin yang sudah ada. Mengingat skala masalahnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya akan besar. Untuk memastikan efektivitas program perlindungan sosial ini, Indonesia perlu belajar dari program serupa di masa krisis yang lalu maupun dari negara lain.

Strategi Manajemen Pendidikan Atas Perubahan Paradigma *Commercial Presence*

Dalam layanan pendidikan, kehadiran komersial berupa *Foreign Direct Investment* (FDI), investasi asing langsung. Dalam pendidikan

dasar dan menengah, afiliasi asing disebut sekolah internasional. Dalam pendidikan tinggi, afiliasi asing disebut kampus cabang. Asean Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (2020) mencatat, di Asean, aliran masuk FDI ke layanan pendidikan dari dunia terus meningkat, dari $ 2,26 juta pada tahun 2012 menjadi $ 54,41 juta pada tahun 2018. Negara-negara dengan investasi utama termasuk Kanada, Jepang, Republik Korea dan Uni Eropa, dipimpin oleh Inggris. Singapura adalah investor terbesar kedua dalam layanan pendidikan di antara semua negara, dan terbesar di antara negara-negara Asean. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, dibandingkan dengan industri jasa lainnya (kecuali administrasi publik dan seni, hiburan dan rekreasi), aliran masuk FDI ke pendidikan sangat kecil. Jumlahnya $ 54 juta pada tahun 2018, dibandingkan dengan $ 1.126 juta untuk "kegiatan profesional, ilmiah dan teknis", $ 494 juta untuk "kegiatan layanan administrasi dan dukungan", dan $ 905 untuk layanan kesehatan.

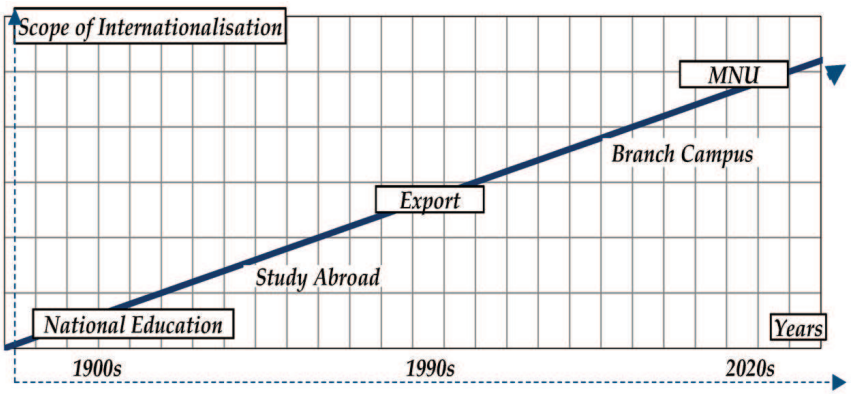

Sumber: Gallagher dan Garrett 2012

Gambar 4. 1 Evolusi Pendidikan Menjadi Multinasional

Pergeseran dari status nasional ke internasional dan multinasional telah terjadi di arena perguruan tinggi secara global selama abad yang lalu (lihat Gambar 4.1). Ekspor jasa pendidikan sudah dimulai pada saat generasi kedua pendidikan lintas batas berlangsung (Knight, 2003). Mobilitas siswa tumbuh menjadi mobilitas program dan, akhirnya, ekspor pendidikan berkembang menjadi bentuk radikal: Kampus cabang (pertama kali didirikan pada tahun 1998 di Inggris, dan pada tahun 1997 di Rusia). Terakhir,

pengembangan lebih lanjut telah diorientasikan pada kebangkitan universitas multinasional (MNU), yang melipatgandakan pengalaman mobilitas institusional mereka dan memiliki banyak IBC (misalnya, Universitas Limkokwing, Universitas Stenden).

Menurut Garrett et, al. (2016), sebelum tahun 1990, terdapat 22 IBC, dan pada tahun 2015 jumlahnya telah berkembang menjadi 256. Menurut Tim Riset Pendidikan Lintas Batas (C-BERT 2017) , pada tahun 2017, terdapat 247 kampus cabang yang beroperasi secara global, 22 IBC baru yang direncanakan akan dibuka, dan 42 diketahui telah tutup (lihat Gambar 4.2). Upaya pencatatan IBC yang berbeda tidak selalu cocok, dan ini mungkin terkait dengan perubahan dan perbedaan dalam definisi tentang apa yang termasuk dalam IBC (Lawton dan Katsomitros 2012; Kinser dan Lane 2012; Garrett et, al. 2016).

Tabel 4.2 Negara Asal & Tuan Rumah Terbesar

Home country	Jumlah kampus di luar negeri		Host country	Jumlah kampus dari luar negeri	
	2009	2015		2009	2015
United States	77	78	China	15	32
United Kingdom	13	39	United Arab Emirates	40	31
France	11	28	Malaysia	5	12
Russian Federation	-	21	Singapore	12	11
Australia	14	15	Qatar	9	11
Netherlands	5	9	United Kingdom	5	7
India	-	7	Canada	6	7
China	-	6	France	-	6
Canada	3	6	United States	-	5
Ireland	3	4	Spain	-	5
Germany	-	4	Republic of Korea	-	5
Malaysia	4	4	Germany	-	5
Total	131	220	Total	92	137

Source: Cross-Border Education Research Team (C-BERT). For 2009: WTO, 2010, based on OBHR.

Girdzijauskaite, et, al. (2019) menyatakan terlepas dari pertumbuhan pesat jumlah IBC di seluruh dunia, bentuk kehadiran komersial ini belum menjadi sangat penting untuk penyampaian

layanan pendidikan tinggi internasional. Sebagaimana dicatat, ini memengaruhi hanya sekitar 180.000 siswa di seluruh dunia, di antara 5 juta siswa yang telah meninggalkan negara mereka untuk belajar di luar negeri. Pada tahun 2016 di Australia, misalnya, 40.130 orang belajar di IBC universitas Australia, sementara 64.581 siswa terdaftar dalam program kembar dan waralaba yang disampaikan melalui kemitraan antara HEI Australia dan asing, terutama dari Singapura, Malaysia, Cina dan Vietnam (Pemerintah Australia, 2018). Negara-negara Asean telah terlibat sebagai pembeli dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi melalui NEM (*Non-equity Modes*) sejak tahun-tahun awal mereka membuka pendidikan asing.

Al-Youbi, Zahed & Tierney (2020) menyatakan kerja sama universitas internasional merupakan suatu keharusan, terutama bagi mahasiswa dan profesor di tahap awal karir mereka. Kerja sama dan kolaborasi internasional harus menjadi elemen integral dari misi dan fungsi universitas. Ini dicapai oleh universitas ketika mereka memikul tanggung jawab untuk bekerja sama dengan institusi kelas dunia lainnya. Kolaborasi dan kerjasama universitas internasional dapat terjadi di banyak jalan kerja universitas: pendidikan, penelitian, pelatihan, kerjasama budaya, dan beasiswa. Kemitraan menawarkan keuntungan dari kemungkinan. Lebih banyak ide, sumber daya, dan keahlian menciptakan lebih banyak peluang untuk penemuan inovatif dan perluasan perspektif dan basis pengetahuan siswa yang mengambil bagian dalam pengalaman internasional. Tindakan kerja sama kelembagaan ini merupakan bagian integral saat berupaya mengatasi tantangan global yang tak terhitung jumlahnya. Universitas yang membatasi pandangan kemitraan mereka pada mitra domestik membatasi apa yang mungkin dan dampak komunitas mahasiswa, fakultas dan lulusan mereka.

Internasionalisasi pendidikan tinggi memiliki dimensi penting, Palmer, Roberts, Cho & Ching (2011) dengan menggunakan data di Hong Kong dan Singapura menyatakan diperlukan empat komponen dalam pendidikan lintas batas merupakan dimensi penting dari "internasionalisasi" pendidikan tinggi, karena secara bersamaan meningkatkan dan mempromosikan universitas suatu negara di pasar pendidikan global. Pertama, pejabat pemerintah

Singapura melihat diri mereka memainkan peran utama dalam hal penyediaan, regulasi, dan pembiayaan pendidikan tingginya dalam pasar yang jauh lebih terkelola dan diatur oleh negara sehingga dapat meningkatkan daya saingnya secara keseluruhan untuk menjadi " pusat pendidikan regional". Kedua, internasionalisasi pendidikan tinggi, terutama dengan pendidikan lintas batas, telah memusatkan perhatian pada permainan kompetisi global ini, sehingga semua pemain harus dibandingkan dan dicocokkan dengan indikator kinerja yang dapat dihitung, dan akhirnya dilambangkan dalam liga universitas di seluruh dunia, atas nama tolok ukur internasional. Ketiga, di bawah gelombang pasang yang kuat dari marketisasi dan manajerialisme dalam pendidikan tinggi, universitas di kedua tempat ini perlahan-lahan menganggap diri mereka sebagai "perusahaan bisnis" dengan mengadopsi nilai pasar, prinsip, dan mekanisme dalam manajemen, pemasaran, dan cara lain untuk menjalankannya. bisnis mereka. Dengan demikian, administrator pendidikan mereka harus lebih peka terhadap kebutuhan pasar yang berubah, dan mencoba membedakan diri dari orang lain melalui berbagai pernyataan misi, mekanisme penilaian dan audit, rencana strategis, strategi pemasaran, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Para akademisi di perguruan tinggi akan merasakan tekanan untuk menjadi lebih akuntabel dan transparan, baik secara profesional maupun manajerial, dalam hal keluaran penelitian dan publikasi, konsultasi, evaluasi kinerja mengajar, keterlibatan dalam berbagai layanan kemasyarakatan dan sukarela, dengan karakteristik seperti kinerja. - sistem prestasi berbasis. Semua ini merupakan faktor penting dalam paradigma baru model tata kelola. Keempat, sektor pendidikan tinggi di dua tempat ini sekarang menghadapi lebih banyak tekanan dan persaingan dari rekan-rekan mereka di pasar global pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemangku kepentingan pendidikan tinggi yang berbeda, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, profesional akademis, badan mahasiswa, dan sebagainya, sekarang diharapkan untuk menanggapi tuntutan dan keadaan yang berubah secara proaktif dan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan berada di ujung tombak.

Kapitalisme dan pendidikan memiliki hubungan mesra, Saltman & Means (2019) menyatakan kapitalisme dan pendidikan

telah terjalin sejak lama. Sekolah massal dikembangkan dalam sistem dunia kapitalis. Manajemen perusahaan dari sekolah umum, kurikulum standar perusahaan, pengujian standar perusahaan, perangkat lunak pembelajaran yang "dipersonalisasi" untuk perusahaan dan platform data, merupakan bagian dari konsep ulang ideologis yang lebih luas dari sekolah sebagai industri komersial global. Pandangan yang muncul tentang pendidikan sebagai layanan swasta ini, pengetahuan dipahami sebagai komoditas swasta yang dapat dikirimkan daripada barang publik - sesuatu yang dapat distandardisasi, diproduksi secara massal, diukur, ditransmisikan, dan disampaikan dengan cara yang efisien dan menguntungkan.

Di Malaysia strategi sistem manajemen pendidikan yang dilakukan, terkait dengan globalisasi, oleh Sari & Faiz (2021) dikatakan aktor kunci internasionalisasi dan pemangku kepentingan, informasi berharga tentang pendekatan internasionalisasi untuk dijadikan pedoman dalam mengukur praktik internasionalisasi. William & Chang (2021) menyatakan hubungan negara-pasar dalam pendidikan transnasional Asia muncul sebagai hibrida dari sosialisme ekonomi dan liberalisme ekonomi serta supra-teritorial dan kedaulatan. Gagasan hibrida seperti itu berfokus pada bagaimana negara-negara Asia mengelola perjuangan atas makna dan nilai pendidikan tinggi, dengan demikian menangani berbagai cara di mana negara-negara berpartisipasi dalam globalisasi neoliberal. Bahwa pilihan kebijakan pendidikan tinggi negara-negara Asia dibatasi oleh politik lokal dan agenda kebijakan yang dihasilkan. Situasi paradoks ini yang terus menerus dihadapi Malaysia ketika mengembangkan rezim regulasi untuk mengatur pendidikan transnasional. Untuk memastikan pertumbuhan positif di antara siswa, Saharudin (2021) menyatakan banyak institusi terkemuka di Malaysia berfokus pada penerapan teknologi dan perangkat pembelajaran baru. Sistem manajemen pembelajaran adalah salah satu gagasan yang diterapkan secara luas di antara fasilitas pendidikan terkemuka.

Akhirnya, melalui berbagai label sekolah internasional, sekolah di seluruh dunia mulai mengadopsi kurikulum yang berupaya mengubah siswa menjadi warga negara "global". Mode 3, *commercial presence*, terjadi melalui penyediaan layanan oleh pemasok

layanan dari satu anggota, melalui kehadiran komersial di wilayah anggota lainnya. GATS menyadari bahwa pemasok layanan sering kali perlu membangun kehadiran komersial di luar negeri untuk memastikan kontak yang lebih dekat dengan konsumen di berbagai tahap produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman serta dalam konteks layanan purna jual. Untuk negara yang tidak maju, perdagangan jasa internasional mendorong masyarakat untuk bertindak konsumtif dan cenderung bergantung pada negara maju dalam pelayanan jasa yang diberikan. Dalam bidang pendidikan, investasi asing dalam operasi lembaga pendidikan, layanan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Sebagian besar kehadiran komersial terjadi melalui usaha patungan penyedia asing dan investor dengan mitra lokal untuk memastikan akses ke tenaga pendidik lokal yang memenuhi syarat dan pasokan siswa yang membayar. Strategi manajemen pendidikan atas perubahan paradigma commercial presence perlu memperhatikan pergeseran dari status nasional ke internasional dan multinasional telah terjadi di arena perguruan tinggi secara global selama abad yang lalu. Ekspor jasa pendidikan sudah dimulai pada saat generasi kedua pendidikan lintas batas berlangsung. Mobilitas siswa tumbuh menjadi mobilitas program dan, akhirnya, ekspor pendidikan berkembang menjadi bentuk radikal, kampus cabang.

BAB 5
MOVEMENT OF NATURAL PERSONS & SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Dahulu pergerakan tenaga kerja pergerakannya atas dasar batas negara, pergerakannya dibatasi. Sekarang, pergerakan itu lintas negara, yang terikat dengan berbagai layanan dalam perjanjian perdagangan. Pergerakan orang perorangan secara alami (*movement of natural person*) merupakan salah satu dari empat cara di mana layanan dapat disediakan secara internasional, dikenal sebagai Mode 4, itu mencakup orang perorangan yang merupakan penyedia layanan (seperti profesional independen) atau yang bekerja untuk penyedia layanan dan yang hadir di anggota WTO lain untuk menyediakan layanan. Mode ini tidak memperhatikan orang yang mencari akses ke pasar kerja di anggota tuan rumah, juga tidak memengaruhi tindakan mengenai kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen. Akses ke pasar kerja menjadi terbuka kepada calon tenaga kerja, lintas negara.

Pada dasarnya, sebagian besar negara membatasi masuknya orang asing ke layanan mode ini. Mereka sering mengenakan visa dan beberapa pembatasan lain pada masuknya orang asing. Menurut perkiraan WTO, perdagangan melalui *movement of natural person* relatif rendah dibandingkan dengan tiga mode lainnya. Sesuai dengan negosiasi Putaran GATT Uruguay, komitmen yang dijadwalkan dalam Mode 4 sebagian besar terbatas pada dua kategori: penerima transfer intra-perusahaan dianggap sebagai "personel penting", seperti manajer dan staf teknis yang terkait dengan kehadiran komersial di negara tuan rumah; dan pengunjung bisnis, yaitu pengunjung jangka pendek yang pada umumnya tidak dipekerjakan di negara tuan rumah. Selain itu, GATS juga memungkinkan bagi para profesional dan praktisi asing yang memenuhi syarat untuk tinggal sementara di suatu negara untuk melakukan tugas sementara.

Globalisasi membawa dampak terhadap *movement of natural person* yaitu penyedia jasa pendidikan dari satu negara memberikan pelayanan jasa pendidikan ke negara lain. Melalui kehadiran *movement of natural person,* warga negara bekerja di luar negaranya untuk memberikan pelayanan jasa pendidikan, disebut dengan perpindahan sementara dari warga negara tertentu ke negara lain, dalam rangka untuk memberikan jasa pendidikan di negara tersebut. Contohnya: kontrak jasa pendidikan. Berbagai *movement of natural persons*, lintas wilayah dan negara, membawa

dampak bagi pengembangan manajemen pendidikan di berbagai kawasan, dapat berupa orang perseorangan dan badan usaha firma, organisasi-organisasi profesional, perusahaan patungan, asosiasi-asosiasi, perusahaan-perusahaan, perwakilan badan usaha, dan kuasa-kuasa usaha bidang jasa pendidikan. Tabel 5.1 memperlihatkan ringkasan cakupan GATS mode 4.

Tabel 5.1 Ringkasan Cakupan GATS Mode 4

Komponen	Termasuk	Pengecualian
Lama tinggal	Kehadiran sementara serta jangka waktu tinggal yang tidak ditentukan ("sementara" tidak ditentukan di GATS, jangka waktu ditetapkan oleh negara tuan rumah)	Migrasi permanen (tidak ditentukan, tetapi GATS tidak berlaku untuk tindakan yang memengaruhi tempat tinggal, kewarganegaraan, atau pekerjaan secara permanen)
Tujuan tinggal	Kehadiran orang perseorangan untuk penyediaan layanan komersial	Orang yang ingin mengakses pasar kerja. Kehadiran orang perorangan untuk produksi barang (misalnya produk pertanian dan manufaktur). Layanan disediakan di bawah otoritas pemerintah.
Tingkat keahlian	Semua tingkat keahlian	Tidak ada tingkat keahlian yang dikecualikan dari GATS
Kategori utama orang perorangan	Pemasok layanan wiraswasta (Pemasok layanan kontrak - wiraswasta). Karyawan pemasok layanan yang dikirim ke luar negeri untuk memasok layanan (Pemasok layanan kontrak - karyawan). Karyawan pemasok jasa asing yang didirikan di negara tuan	Karyawan asing dari badan hukum milik dalam negeri.

Komponen	Termasuk	Pengecualian
	rumah terkait dengan Mode 3 (yaitu, perusahaan yang didirikan di negara tuan rumah yang memiliki penyertaan modal asing setidaknya 50 persen, atau dikendalikan oleh orang asing) (Penerima pengalihan intra-perusahaan dan staf asing yang direkrut). Penjual jasa dan orang yang bertanggung jawab menyiapkan kehadiran komersial	

Tatanan dunia yang tidak mengenal batas teritorial dan nasionalisme, globalisasi, terkait dengan berbagai persoalan yang bersifat lokal atau kawasan tertentu, Nalle (2011:555) menyatakan globalisasi sangat terkait dengan populasi di dunia yang sekarang jumlahnya hampir mencapai 7 milyar. Menurut laporan baru PBB tahun 2019, populasi dunia diperkirakan meningkat 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan, dari 7,7 miliar saat ini menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Populasi dan globalisasi, saat ini terkait dengan berebagai isu, terutama migrasi global. Semua aspek dalam globalisasi ternyata berkaitan dengan populasi, misalnya kelaparan, ketidakmerataan, konflik etnik, degradasi lingkungan, keamanan global, pengembangan ekonomi, perdagangan, kemiskinan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Peradaban dan industrialisasi adalah dua efek samping utama dari kelebihan populasi. Populasi yang berlebihan dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan konflik antar budaya, dan di mana hal ini diperumit oleh tingkat pendidikan yang tidak merata (Mataré, 2010:521). Borjas (2015:61) menyatakan bahwa menghapus pembatasan imigrasi di seluruh dunia menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang sangat besar.

Migrasi internasional menjadikan terjadinya budaya global kini semakin berkembang. Proses globalisasi difasilitasi oleh teknologi. Teknologi ini berasal dari satu tempat pendidikan. Cara utama

untuk menerima (atau melawannya) globalisasi adalah melalui pengetahuan, bidang pendidikan sangat menentukan. Alli, Winter & May (2007:89) menyatakan pendidikan adalah cara utama untuk memfasilitasi interaksi dan meningkatkan kualitas hidup orang di mana pun, bahwa terdapat permasalahan populasi dunia yang terlalu tinggi, dampaknya, dan tentang migrasi global, perubahan lingkungan, dan pendidikan.

Dampak globalisasi terhadap pendidikan, terutama terkait dengan sistem manajemen pendidikan nasional di negara atau kawasan tertentu, Adolf (2003:83) menyatakan *The World Trade Organization* (WTO) menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan. Dalam mengagendakan komitmen *General Agreement on Trade in Services* (GATS) pada sektor jasa pendidikan, mayoritas negara-negara anggota menggunakan kategori *United Nations Provisional Central Product Classification* (UN CPC) untuk mengklasifikasikan sektor pendidikannya. Menurut *Department of Economic and Social Affairs Statistics Division* (2015:9), sistem klasifikasi tersebut pada dasarnya menggambarkan perbedaan struktural diantara negara-negara berkenaan dengan sistem pendidikan nasionalnya.

Sistem pendidikan nasional, didalamnya berupa tata pemerintahan pendidikan menghadapi berbagai persoalan populasi dan kesehatan, contoh paling mutakhir yaitu adanya pandemi novel *coronavirus disease* (covid-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan penyakit coronavirus 2019 (covid-19), yang disebabkan oleh coronavirus 2 sindrom pernapasan akut (SARS-CoV-2), menjadi pandemi pada 12 Maret 2020. Pada 18 Maret 2020, *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) memperkirakan bahwa 107 negara telah menerapkan penutupan sekolah nasional terkait COVID-19, yang memengaruhi 862 juta anak-anak dan remaja, kira-kira setengah dari populasi siswa global. MacPherson, et.al (2009:1727) menyatakan mobilitas populasi adalah faktor utama dalam globalisasi, ancaman dan risiko kesehatan masyarakat, khususnya distribusi organisme yang resisten terhadap obat antimikroba. Peningkatan jumlah orang

yang hidup di bumi selama 12.000 tahun terakhir, perubahan yang mengejutkan: populasi dunia saat ini adalah 1,860 kali ukuran dari 12 milenium yang lalu ketika populasi dunia sekitar 4 juta - setengah dari populasi London saat ini.

Globalisasi dan *movement of natural persons* dalam sektor pendidikan membutuhkan manajemen pendidikan yang baik untuk menghasilkan lulusan secara efektif dan efisien. Lunn (2008:231) menyatakan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa menuntut agar lulusan memiliki pengetahuan yang baik tentang isu-isu global, keterampilan untuk bekerja dalam konteks internasional, dan nilai-nilai warga dunia. Orientasi internasional ini telah menghasilkan ruang kelas yang ditempati oleh guru dan siswa yang berasal dari budaya yang berbeda, yang semuanya terlibat dalam proses pembelajaran lintas budaya (Makalela, 2015:200; Otten, 2003:12). Kompetensi internasional dan antarbudaya juga dianggap penting untuk dikembangkan dalam pendidikan tinggi internasional (Van Gaalen & Gielesen, 2016:34). Keterampilan berbahasa adalah kompetensi lain yang membutuhkan peningkatan bagi guru dan siswa dalam pendidikan tinggi internasional. Bücker, Bouw & De Beuckelaer (2018:117) menyatakan dalam situasi global, untuk mencapai hasil pendidikan yang baik dibutuhkan (1) peran budaya dalam proses pembelajaran di kelas internasional, (2) bagaimana meningkatkan proses pembelajaran lintas budaya yang berbeda, dan (3) sekolah-sekolah memberikan dukungan menyediakan untuk secara memadai menangani budaya yang terkait tantangan dalam proses pembelajaran.

Mode Movement of Natural Persons & Tata Pemerintahan Pendidikan di Berbagai Kawasan

Globalisasi yang berwujud liberalisasi perdagangan dan mendorong *movement of natural persons* memiliki dampak yang luas, tidak sekedar ekonomi atau pedagangan semata-mata, tetapi terdapat sektor-sektor lainnya yang terpengaruh. Liberalisasi perdagangan telah menjadi yang terdepan dalam agenda global selama beberapa dekade, sementara itu terdapat berbagai negara dan kawasan tertentu yang membatasi *movement of natural persons* tetap dijaga dengan ketat. Namun demikian, Walmsley

& Winters (2005:688) menyatakan pembatasan pergerakan orang perorangan di seluruh wilayah membebankan biaya pada negara berkembang dan negara maju yang jauh melebihi pembatasan perdagangan barang. Pembatasan *movement of natural persons* membebankan biaya yang signifikan pada hampir semua negara (lebih dari $ 150 miliar secara keseluruhan), dan mereka yang menggunakan tenaga kerja tidak terampil lebih memberatkan daripada mereka yang menggunakan tenaga kerja terampil. Saturnino, et.al (2018:1227) menyatakan *movement of natural persons* teah mendorong pergeseran konteks dan objek dari kontestasi politik seputar masalah agraria, iklim, lingkungan dan keadilan pangan. Pergeseran ini memengaruhi aliansi, kolaborasi, dan konflik di antara dan di antara kekuatan negara dan sosial, serta di dalam dan di antara gerakan dan masyarakat.

Saat ini terdapat berbagai perjanjian yang berhubungan dengan *movement of natural persons* dan migrasi tenaga kerja, selain General Agreement on Trade in Services (GATS), berapa contoh diantaranya Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic and Trade Agreement UE-Kanada (CETA), China–Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) dan Trans-Pacific Partnership (TPP). Ekman & Engblom (2019:163) menyatakan terjadi paradoks mendasar dalam politik migrasi. Sementara memperkenalkan kebijakan migrasi yang lebih ketat menjadi agenda utama banyak negara, fakta-fakta demografis menunjukkan bahwa mereka perlu memperkenalkan imigrasi tenaga kerja yang lebih luas untuk menghindari kekurangan tenaga kerja. Berbagai perjanjian tenaga kerja di Uni Eropa berdampak pada berbagai hal.

Paradoks mendasar dalam politik migrasi tersebut, oleh Caviedes (2016:552) dinyatakan sebagai keterlibatan supranasional yang lebih besar di bidang migrasi tidak teratur dan khususnya suaka, baik melalui keterlibatan lembaga-lembaga Uni Eropa, atau melalui undang-undang dan keputusan pengadilan yang benar-benar mewajibkan negara untuk mengubah aturan domestik mereka. Perubahan kelembagaan terus memberdayakan komisi dalam lembaga, dengan potensi untuk partisipasi dan kewenangan yang jauh lebih besar untuk lembaga-lembaga Uni Eropa.

Fenomena migrasi bukan situasi baru untuk Uni Eropa, Torres (2019:45) menyatakan migrasi adalah elemen fundamental dari

identitas Eropa. Sejak pembentukannya, Uni Eropa telah ditandai oleh emigrasi dan imigrasi. Sebelum pembentukan Uni Eropa, sudah ada yang cukup besar aliran orang-orang di antara negara-negara yang berbeda, dimotivasi terutama oleh pencarian kerja. Ahammad (2016:135) menyatakan *movement of natural persons* yang mengaitkan pembatasan pekerja yang bepergian ke luar negeri untuk sementara, di mana negara-negara berkembang memiliki keunggulan komparatif, tetap menjadi salah satu masalah WTO yang paling tidak dinegosiasikan. Negara-negara berkembang dapat berpartisipasi secara bermakna dalam perdagangan jasa dunia dan melihat kepentingan ekonomi mereka dilindungi secara adil dengan negara-negara maju sehingga kepentingan ekonomi baik negara maju maupun negara berkembang dalam perdagangan jasa dapat menjadi saling mendukung. Cone (2018:1020) menyatakan menanggapi perubahan struktural dan diskursif membentuk bidang pendidikan tinggi di Eropa selama berapa dekade terakhir, konsekuensi pendidikan apa tujuan dan nilai tata kelola pendidikan tinggi telah bergeser ke arah pasar- relevansi dan dampak sebagai faktor legitimasi utama dalam penilaian kualitas kelembagaan. Leemann (2018:857) menyatakan proyek pembentukan komunitas Eropa sejak Perang Dunia II telah semakin maju dengan menambahkan - di samping empat kebebasan pergerakan barang, orang, jasa dan modal bebas - kebebasan kelima - sirkulasi bebas peneliti, pengetahuan dan teknologi - yang bermaksud untuk mempromosikan pembangunan komunitas di tingkat pendidikan tinggi dan penelitian dan dengan menciptakan European Research Area (ERA).

Di Uni Eropa selain berdampak pada migrasi internasional, terdapat juga berbagai standar mobilitas akademik transnasional sebagai modal manusia dan pengalaman. Contohnya yaitu pada para peneliti individu dalam mengkoordinasikan kepentingan mereka dan hidup dalam konteks *movement of natural persons*. Saat ini kebijakan, nilai, norma European Research Area, dan standar mobilitas geografis, pada intinya, didasarkan pada empat konvensi - industri, pasar, proyek, dan ketenaran. Pengaturan ini memaksa peneliti untuk memantapkan diri mereka sebagai wirausaha akademik di pasar pengetahuan. Karena itu, persyaratan mobilitas rezim tata kelola European Research Area mempersulit

individu untuk terlibat dalam rencana individu, kehidupan pribadi, dan dalam eksplorasi.

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja tidak terampil mendorong berbagai perjanjian untuk mendorong *movement of natural persons* lebih baik kualitas keterampilannya. Berbagai perjanjian lintas negara tersebut menjadikan bidang pendidikan sebagai pilar penyanggga pemenuhan kebutuhan tenaga terampil, selain membuka pasar kerja lebih luas.

Pendidikan menjadi investasi sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa, karena itu perlu dikelola dengan baik. Sumber daya manusia yang baik menjadi modal utama dalam kompetisi pasar kerja, karena berbagai komitmen globalisasi menjadi pengikat migrasi tenaga kerja. Pusser (2018:576) menyatakan pendidikan menjadi lebih penting karena sektor ini semakin diakui sebagai sumber vital inovasi, keterampilan, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan pribadi. Namun perbedaan politik utama tetap ada pada masalah-masalah seperti siapa yang harus membayar untuk pendidikan tinggi, bagaimana seharusnya bertanggung jawab, dan bagaimana kita mengukur kualitas dan produktivitasnya. Khususnya, negara atau pasar adalah kunci dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Devkota (2016:71) menyatakan gerakan buruh lintas batas sementara adalah bagian integral dari globalisasi.

Kemajuan teknologi informasi dan industri menjadi eleman yang menentukan keberhasilan globalisasi saat ini, walaupun berbagai resiko terhadap kelompok sosial dan individu tertentu selalu membayangi. Botlík (2020:76) menyatakan digitalisasi informasi dan automasi membawa perubahan di tingkat sosial, ini terutama adalah perubahan dalam perilaku perusahaan. Ada risiko yang signifikan untuk kelompok orang tertentu, terutama yang dapat digantikan oleh teknologi informasi baru. Dalam konteks gelombang globalisasi keenam saat ini, bentuk-bentuk baru migrasi orang dan modal dapat diharapkan terkait dengan sifat transnasional dari kegiatan produktif, bentuk komunikasi dan informasi global.

Resiko yang mungkin terjadi yaitu dalam konteks struktur sosial-ekonomi, seorang individu dihadapkan dengan serangkaian faktor.

Tujuan dari perilaku individu biasanya untuk mengubah lokalisasi sehubungan dengan nilai-nilai variabel sosial ekonomi yang disukai, seperti ketersediaan pekerjaan, keselamatan, kebersihan lingkungan, kualitas udara, dan lain-lain. Di sisi lain, posisi seseorang memengaruhi nilai-nilai tersebut, misalnya variabel sosial-ekonomi. Perilaku dapat disimulasikan menggunakan sistem multi-agen yang memberikan pendorongnya, sekaligus berbagai perubahan struktur sosial-ekonomi yang rentan terjadi dan tidak sesuai dengan tujuan perilaku individu.

Berbagai kawasan *movement of natural persons* memiliki dampak yang luas, di benua Amerika, pusat kapitalisme dunia di Amerika Serikat, kondisinya memang berbeda dibandingkan dengan negara atau kawasan pinggiran lainnya. Persoalan yang muncul di sini dominan keadilan distribusi pekerjaan antar warganya, alih-alih berkaitan dengan migrasi lintas negara. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang ketat dalam menyikapi migrasi lintas negara dengan banyak batasan untuk masuknya tenaga kerja dari luar. Bell, Leopold, Berry & Hall (2018:224) menyatakan meskipun ada banyak perhatian untuk "menghargai keragaman" di antara para sarjana dan praktisi, diskriminasi, pengucilan, dan ketidaksetaraan tetap ada dalam organisasi-organisasi Amerika. Secara khusus, orang Afrika-Amerika yang berpendidikan serupa biasanya memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah daripada kelompok lain, dan terus menghadapi diskriminasi dalam akses ke pekerjaan dan dalam perawatan di tempat kerja. Kesenjangan upah Hitam-Putih lebih tinggi daripada puluhan tahun yang lalu, dan tanpa perubahan signifikan, kesenjangan kekayaan membutuhkan waktu berabad-abad untuk dijembatani.

Diskriminasi dan kesenjangan yang masih terjadi berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan, sebagai hak sosial dan ekonomi, berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesepakatan dunia. Klees (2020:9) menyatakan beberapa kritikus berharap bahwa perhatian terhadap hak asasi manusia dan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat mengubah sistem dunia kita menjadi sistem yang adil. Sementara setiap tempat dapat menjadi situs untuk perjuangan progresif, perubahan nyata membutuhkan lebih banyak. Ada penolakan kuat untuk mengimplementasikan

agenda hak asasi manusia, terutama jika itu termasuk hak sosial dan ekonomi. Verger & Lubienski (2016:67) menyatakan bahkan ketika negara sering memperlakukan pendidikan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi mereka di dunia yang terglobalisasi, individu dan keluarga tampaknya menganut gagasan pendidikan sebagai barang pribadi yang diprivatisasi dan individual. Seperti dicatat, retorika seputar global reformasi pendidikan sering mengacaukan manfaat ekonomi individu dan kolektif dari sekolah. Dengan demikian, seperti halnya negara-negara berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar global melalui peningkatan pendidikan, keluarga di negara-negara tersebut sering bersaing untuk mendapatkan tempat yang dicari oleh anak-anak mereka di sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang relatif lebih baik. Bahkan sistem pendidikan akses terbuka sering melihat keluarga berlomba-lomba untuk menempatkan anak-anak mereka lebih tinggi dalam hierarki sekolah, karena pendidikan merupakan posisi sosial yang terhubung dengan konsumsi seseorang, dan tidak hanya rute ke prospek peningkatan kesempatan kerja.

Di benua Asia, kawasan yang memiliki negara beragam level ekonominya, integrasi ekonomi tidak secepat pada kawasan Eropa. Hugo (2013:14) menyatakan salah satu perubahan paling mencolok di kawasan Asia-Pasifik selama dua dekade terakhir adalah peningkatan besar-besaran arus barang, keuangan, layanan, dan manusia lintas batas. Ini telah menjadi penyebab dan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cepat dinikmati di wilayah tersebut. Meskipun telah terjadi peningkatan dramatis dalam pergerakan populasi antar negara, namun tidak sebesar modal dan barang. Meskipun telah ada liberalisasi peraturan yang cukup mengenai aliran modal dan barang, masih ada hambatan substansial pada migrasi internasional. Beberapa orang berpendapat bahwa ini telah menjadi kendala tidak hanya pada pembangunan di wilayah ini tetapi juga pada penyebaran manfaat pembangunan yang lebih luas dan lebih dalam di antara negara dan kelompok sosial ekonomi.

Meskipun telah terjadi peningkatan dramatis dalam pergerakan populasi antar negara di Asia, walaupun tidak sebesar modal dan barang, terjadi berbagai kesepakatan liberalisasi mobilitas tenaga

kerja melalui perjanjian perdagangan. Jurje & Lavenex (2018:83) menyatakan terlepas dari keterikatan tradisional mereka terhadap kedaulatan, negara-negara Asia Tenggara dan Timur telah menganut agenda dinamis liberalisasi mobilitas tenaga kerja melalui perjanjian perdagangan. Symaco & Tee (2019:72) menyatakan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah rumah bagi lebih dari 600 juta orang dengan perpaduan eklektik budaya, sejarah, struktur politik, sistem pendidikan, dan tingkat kemajuan ekonomi, dan non-intervensi ASEAN dalam urusan internal negara-negara anggota. Shun (2012:439) menyatakan dampak globalisasi pada proses internasionalisasi pendidikan tinggi di kawasan Asia-Pasifik, bahwa globalisasi memaksa banyak lembaga pendidikan tinggi di wilayah ini untuk mengikuti praktik dan ideologi global dari paradigma Anglo-Amerika tanpa mengembangkan sistem unik mereka sendiri dan menghormati budaya yang kaya di negara mereka sendiri. Sementara lembaga pendidikan tinggi terlibat dalam internasionalisasi dalam hal marketisasi dan pragmatisme ekonomi, mereka harus bertanya pada diri sendiri, 'Apa yang hilang dalam proses internasionalisasi?'

Tampaknya pendidikan di Asia Tenggara, pada umumnya terlibat dalam internasionalisasi pendidikan, tapi lupa mengembangkan sistem dan budaya lokal sendiri. Sehingga wajar saja, ciri khas pendidikan di kawasan ini kurang terbentuk dengan baik, dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya. Misalnya negara Asia Timur yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan yang rutin menduduki posisi teratas mutu pendidikan versi Programme for International Student Assessment (PISA). Sedikit lebih baik dari Asia Selatan seperti India, Nepal, Butan, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan Maldives, dan Afhganistan, mutu pendidikannya yang masih rendah menjadi penyebab negara-negara itu, tidak mampu untuk berkembang dan bersaing di kancah dunia internasional.

Berbagai kawasan sekarang terikat dalam perjanjian, yang semakin cepat mendorong proses globalisasi, hampir semuanya berada di bawah payung WTO. Winters, Walmsley, Wang & Grynberg (2003:1137) menyatakan perjanjian WTO apa pun harus meningkatkan mobilitas, bukan hanya birokratisasi, bahwa untuk mengatur perpindahan tenaga kerja yaitu dengan pendekatan jangka pendek yang paling menjanjikan untuk meningkatkan

mobilitas sementara. Chanda (2001:631) menyatakan perdagangan jasa telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, Namun, banyak hambatan peraturan membatasi perdagangan semacam itu, terutama ketika itu melibatkan pergerakan sementara lintas-perbatasan tenaga kerja, juga disebut, pergerakan orang perorangan. Banyak negara berkembang memiliki potensi untuk mengekspor layanan melalui pergerakan lintas batas tenaga kerja profesional, semi-terampil dan tidak terampil. Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) berupaya meliberalisasikan perdagangan jasa secara progresif melalui berbagai mode pasokan, termasuk perpindahan orang perorangan.

Upaya liberalisasi perdagangan jasa, termasuk pendidikan, memang menjadi persoalan dilematis bagi banyak negara berkembang. Satu sisi karena tanggung jawab negara atas pendidikan, sisi lainya kehadiran lembaga pendidikan asing menjadi factor yang memengaruhi kebijakan pemerintah tuan rumah. Ming (2009:89) menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan *movement of natural persons* di negara tuan rumah dari sudut pandang pemerintah, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk, pekerjaan dan situasi pendidikan negara tuan rumah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghalang pergerakan orang per orang. Mempertimbangkan perilaku pemerintah, Jules (2016:3) menyatakan sifat tata pemerintahan yang beragam dan dengan cara apa ia berkembang sebagai aksioma untuk masalah kebijakan yang dianut oleh sistem pendidikan nasional.

Tata Pemerintahan Pendidikan Indonesia: Antisipasi Dampak Negatif *Mode Movement of Natural Persons*

Secara umum belum ada produk hukum dan kebijakan tata pemerintahan pendidikan Indonesia yang jelas terkait *movement of natural persons*, kalaupun ada hanya terkait dengan istilah globalisasi saja. Berbagai dokumen yang ada, digunakan istilah globalisasi dan secara spesifik tidak menyebutkan adanya fenomena *movement of natural persons*, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan rencana strategis pendidikan yang diperiksa tidak memperlihatkan.

Memang fenomena globalisasi sudah mengubah pola pikir pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia dan terdapat diberbagai dokumen pertimbangan dikeluarkannya kebijakan, termasuk pendidikan. Hapsari & Wahyudi (2018:35) menyatakan perubahan tersebut sebagai upaya mereformasi sistem dan tata kelola pendidikan dengan desentralisasi, pemasaran, dan internasionalisasi untuk meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia. Pendidikan nasional perlu diubah untuk beradaptasi dengan tantangan global dan internasional, investasi asing, tenaga kerja, warga negara asing dapat menjadi peserta didik.

Sebenarnya keberadaan *movement of natural persons*, dapat dirasakan kehadirannya dalam tata pemerintahan pendidikan Indonesia. Salah staunya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan E-Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang merupakan layanan yang dibuat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah guna memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam pelayanan izin belajar dan penyetaraan ijazah. Layanan ini terdiri dari layanan penyetaraan ijazah, layanan izin belajar untuk warga negara asing yang ingin belajar di dalam negeri dan layanan penyaluran siswa untuk warga negara Indonesia dari luar negeri atau siswa satuan pendidikan kerjasama (internasional) di dalam negeri ingin belajar di sekolah nasional.

Undang-undung sistem pendidikan nasional Indonesia belum mengatur terkait dengan *movement of natural persons* ini, hanya diatur tentang sertifikasi dan akreditasi bertaraf internasional, bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global, dan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Logli (2016:561) menyatakan Indonesia memiliki sistem pendidikan tersier yang masif dan beragam, termasuk eksperimen di *community college* dan *program online*. Sistem pendidikan tinggi tetap terpusat, dengan pengecualian beberapa reformasi menuju otonomi keuangan. Pendanaan publik yang tidak memadai menghalangi kapasitas untuk menyediakan pengajaran, penelitian, dan fasilitas yang memadai di antara aspek-aspek lainnya. Kenaikan biaya siswa yang signifikan berkontribusi pada representasi siswa yang berlebihan dari Jawa, pusat kota, dan kelas sosial yang lebih tinggi.

Tentu saja kesadaran terhadap mutu pendidikan menjadi fokus banyak lembaga pendidikan, bahkan untuk perguruan tinggi didorong untuk terus menaikan level di kancah internasional. Jenjang pendidikan dasar dan menengah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/ Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) pada sekolah-sekolah pemerintah pada tahun 2013, sampai sekarang belum ada pengganti yang sejenis. Sayidah et.al (2019:10) menyatakan mutu pendidikan tinggi menurun jika ada kelangkaan dosen yang berkualitas. Menurunnya mutu pendidikan tinggi memengaruhi jumlah mahasiswa. Akhirnya, jika penurunan mahasiswa terjadi terus menerus, maka pendidikan tinggi bisa ditutup. Jadi mutu adalah prioritas utama dalam tata kelola universitas. Saputra (2020:46) menyatakan setelah sekolah-sekolah tak menyandang predikat RSBI/SBI karena putusan MK, ternyata hal itu tak mempunyai implikasi signifikan terkait mutunya, sebab sekolah-sekolah tersebut, sebelumnya memang sudah bermutu.

Untuk distribusi mutu pendidikan yang lebih baik itu, tampaknya pemerintah Indonesia kemudian mengambilkan kebijakan zonasi untuk penerimaan peserta didik baru. Mulai tahun 2019 sistem zonasi diterapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki niat baik untuk meratakan mutu pendidikan mendapatkan kritikan keras dari sebagian orang tua calon pendaftar. Pemerintah yakin dengan sekolah untuk menyediakan sistem pendidikan yang adil dan dampaknya pada akses pendidikan yang merata. Sebagian orang tua gusar dan tidak bahagia, tetapi sebenarnya bagaimana perasaaan calon siswa yang terkena dampak langsung sistem zonasi ini. Selain itu ada hak anak-anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tanpa membedakan kemampuan akademik dan kemampuan ekonomi keluarga. Selama ini sekolah-sekolah favorit selain unggul akademik, unggul juga pembayarannya yang hanya bisa diakses keluarga dengan ekonomi baik.

Penataan sistem penerimaan siswa baru perlu memperhatikan karakteristik kondisi masing-masing daerah, terutama ketersediaan fasilitas pendidikan, demografi, dan geografi lebih baik. Dampak positif yang mulai tumbuh perlu diperkuat lagi, sementara keluhan masyarakat perlu segera direspon untuk tahun-tahun penerimaan siswa baru berikutnya. Penelusuran data-data siswa juga dapat

dilakukan sejak anak masih duduk di prasekolah, yang sebenarnya data tersebut ada di Kemendikbud dan Kemenag untuk raudathul atfal.

Pada aspek pendidik, dosen dan guru, kondisi yang bekaitan *movement of natural persons* secara tegas juga belum diatur. Secara umum, hal tersebut diatur dalam peraturan presiden tentang tenaga kerja asing. Latar belakangnya untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Pemerintah saat ini sedang merancang Undang-Undang Omnibus Law. Versi pemerintah, undang-undang ini merupakan jalan keluar menyederhanakan peraturan dan perundang-undangan yang selama ini saling tumpang tindih. Salah satu topik yang diubah dalam aturan ini adalah soal tenaga kerja. Antara lain adalah kemudahan perizinan untuk tenaga kerja asing (TKA) ahli di Indonesia. Tahun 2019, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meluncurkan perguruan tinggi (PT) swasta baru yang dipimpin rektor asing di Indonesia, yaitu Universitas Siber Asia. Paine, Aydarova & Syahril (2017:1133) menyatakan meskipun terdapat manifestasi globalisasi di mana-mana dan beragam dalam kehidupan kita, pemeriksaan kebijakan dan praktik pendidikan guru dalam konteks globalisasi tetap relatif tidak berubah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, bagaimana mengelola pergerakan orang, ide, dan aktor kebijakan lintas batas telah memposisikan pendidikan guru di persimpangan pengaruh global dan kekuatan transnasional. Satu dimensi kunci globalisasi adalah pergerakan orang lintas batas. Untuk pendidikan guru, ini berarti mempersiapkan guru untuk meningkatkan keragaman di ruang kelas, mengingat meningkatnya migrasi/imigrasi.

Pengajaran berkualitas dalam konteks global memberikan indikasi bahwa sektor pendidikan guru tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kemajuan ilmu, teknologi, dan tatanan ekonomi dunia, yang terus semakin meluas akses yang diperoleh masyarakat. Furlong (2013:28) menyatakan selama 30 tahun terakhir, pendidikan guru telah menjadi bidang utama kebijakan pemerintah di banyak negara di dunia. Salah satu faktor kunci yang mendorong perubahan ini adalah semakin pentingnya globalisasi, "dibayangkan" oleh sebagian besar negara sebagai keharusan untuk

mengejar kebijakan neoliberal. Tetapi neoliberalisme itu sendiri tidak statis; interpretasi bervariasi antara negara yang berbeda dan berubah seiring waktu sebagai akibat dari proses politik. Bahkan politik nasional dalam pengembangan kebijakan pendidikan guru kadang diabaikan.

Globalisasi dan berbagai lembaga internasional mendorong praktik perbaikan pendidikan guru. UNESCO bekerja dengan negara-negara anggota dan mitra internasional mengimplementasikan program khusus yang mendukung pengembangan kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan guru yang ada, memanfaatkan penggunaan solusi yang didukung teknologi seperti pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Kebijakan Uni Eropa di bidang pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mendukung aksi di tingkat negara anggota - yang tetap bertanggung jawab atas bidang kompetensi ini - dan untuk membantu mengatasi tantangan bersama, seperti masyarakat yang menua, defisit keterampilan, perkembangan teknologi, dan persaingan di tingkat global. Pendidikan dan pelatihan 2020 (ET 2020) adalah kerangka kerja Uni Eropa untuk kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan. Globalisasi yang di dalamnya terdapat berbagai kekuatan, pengaruh, dan hubungan kawasan di Asia Tenggara berwujud dalam Asean dan diperkuat dengan AEC (Asean Economic Community) yang berlaku akhir tahun 2015. Asean memiliki AUN (Asean University Network), yang merupakan organisasi universitas di negara-negara Asean. Tujuan AUN adalah untuk meningkatkan kualitas standar universitas di Asean. AUN-QA (Asean University Network-Quality Assurance) merupakan sebuah asesmen yang mengacu ke standar akreditasi international.

Kontradiksi dengan situasi global tersebut, terdapat ancaman terhadap berbagai budaya dan kepentingan nasional, terutama pendidikan guru. Kualitas pendidikan guru perlu diperkuat dengan literasi yang baik untuk menmembendung munculnya tradisi serba praktis dimana pendidikan bergantung pada teknologi. Selain itu semakin menipisnya kebudayaan lokal karena masuknya budaya dari luar dan kekuatan kontrol pendidikan oleh negara berkurang, mendorong munculnya berbagai ideologi transnasional.

Saat ini telah terjadi transformasi kurikulum, pedagogi, penilaian, dan praktik: teori yang memungkinkan respons kreatif

terhadap kontradiksi globalisasi. Reformasi pendidikan guru dilakukan banyak negara, sayangnya, indikasi Al-Daami & Wallace (2007:339) reformasi telah meningkatkan kualifikasi guru dan meningkatkan jumlah guru laki-laki tetapi tidak meningkatkan standar keseluruhan atau meningkatkan tingkat mangkir di sekolah. Kontrol pusat yang ketat telah gagal melibatkan kesetiaan guru terhadap perubahan. Pejabat menyalahkan kegagalan di sekolah; kepala sekolah menyalahkan orang tua, dan para guru mengkritik kebijakan yang membuat mereka memediasi kurikulum yang kurang relevan dan gagal melibatkan siswa.

Ujung-ujungnya siswa yang memperoleh dampak paling nyata dari dari lemahnya layanan yang diberikan negara, terutama oleh guru. Kurkulum pendidikan guru kurang relevan dengan kurikulum yang berlaku saat mengajar di depan siswa, karena pengembangan kurikulum sering diperlakukan sebagai kebijakan bukan universalisme ilmu. Crawford-Garrett & Thomas (2018) menyatakan selama dua dekade terakhir, pendidikan guru telah semakin dikonseptualisasikan sebagai masalah kebijakan dalam menanggapi apa yang digambarkan oleh para pembaru sekolah, pembuat kebijakan, dan pemerhati sebagai krisis pendidikan global yang memerlukan solusi nasional dan internasional.

Selama ini pendidikan guru dibahas dari berbagai perspektif, dengan fokus pada struktur dan kurikulumnya, pada pengalaman lapangan dan tugas kuliah dan interaksi di antara mereka, serta pada pengalaman belajar guru-siswa (Darling-Hammond, Newton, & Wei 2010; Flores 2016; Townsend 2011). Goodwin (2010:19) menyatakan pendidikan guru domain pengetahuan ini dipercaya ampuh untuk mengajar: (1) pengetahuan pribadi/otobiografi dan filsafat pengajaran; (2) pengetahuan/pemahaman kontekstual anak-anak, sekolah, dan masyarakat; (3) pengetahuan pedagogis/konten, teori, metode pengajaran, dan pengembangan kurikulum; (4) pengetahuan/keanekaragaman sosiologis, relevansi budaya, dan keadilan sosial; dan (5) pengetahuan sosial/kerja sama, proses kelompok demokratis, dan konflik resolusi.

Sayangnya, kebutuhan siswa untuk belajar terus mengalami perubahan karakateristik, kebutuhan, dan tantangan perubahan teknoligi informasi dan komunikasi. Blaak, Openjuru & Zeelen (2013:88) menyatakan pemberdayaan praktis termasuk

memperoleh keterampilan yang dapat dipasarkan serta kemampuan untuk secara kritis memberikan arahan bagi kehidupan seseorang. Lytvynova & Melnyk (2018) menyatakan fitur khusus dari pelatihan TIK untuk guru non-formal meliputi ketersediaan Internet berkecepatan tinggi dan beberapa peralatan komputer. Huda & Teh (2018:136) menyatakan era digital telah bergeser cara praktik mengajar dari interaksi langsung ke interaksi virtual di mana kompetensi mengajar adaptif akan merujuk pada dasar model kerangka kerja, misalnya pendekatan big data. Affeldt, Tolppanen, Aksela & Eilks (2017:13) menyatakan bahwa pendidikan 'relevan' memiliki beberapa dimensi yang berbeda. Diisarankan adalah relevansi individu, diperlukan untuk mempelajari keterampilan untuk kehidupan sehari-hari sekarang dan di masa depan.

Berbagai perubahan mesti dihadapi dengan kesiapan yang memadai dengan sikap yang bertangggung jawab atas perkembangan imu dan teknologi. Berbagai kecenderungan global terhadap pendidikan guru seperti diantaranya neoliberalisme yang tidak statis dimana interpretasi bervariasi antara negara yang berbeda dan berubah seiring waktu sebagai akibat dari proses politik, ancaman terhadap berbagai budaya dan kepentingan nasional, terutama pendidikan guru, meningkatkan standar keseluruhan pendidikan guru, kontrol pusat yang ketat telah gagal melibatkan kesetiaan guru terhadap perubahan, pendidikan guru telah semakin dikonseptualisasikan sebagai masalah kebijakan semata-mata, dan kebutuhan siswa untuk belajar terus mengalami perubahan karakateristik, kebutuhan, dan tantangan perubahan teknoligi informasi dan komunikasi. Guru yang kompeten secara global memiliki sensitifitas berbagai kecenderunagn global tersebut, sementara pendidikan guru memberikan bekal memadai sehingga ada saatnya berada di depan siswa, mereka langsung dapat beradaptasi.

Akhirnya, mode *movement of natural persons* dan tata pemerintahan pendidikan, sebenarnya merupakan implikasi lebih lanjut dari globalisasi. Pergerakan orang perorangan secara alami (*movement of natural person*) merupakan salah satu dari empat cara di mana layanan dapat disediakan secara internasional, dikenal sebagai Mode 4, itu mencakup orang perorangan yang merupakan penyedia layanan (seperti profesional independen) atau yang

bekerja untuk penyedia layanan dan yang hadir di anggota WTO lain untuk menyediakan layanan. Walaupun, sebagian besar negara membatasi masuknya orang asing ke layanan mode ini, tapi migrasi internasional tidak terelakkan, dan menyebabkan berbagai persoalan kemudian. Populasi yang berlebihan dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan konflik antar budaya, dan di mana hal ini diperumit oleh tingkat pendidikan yang tidak merata. Selain itu, upaya menghapus pembatasan imigrasi di seluruh dunia menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang sangat besar.

The World Trade Organization (WTO) menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan. Sistem pendidikan nasional, didalamnya berupa tata pemerintahan pendidikan menghadapi berbagai persoalan populasi dan kesehatan, contoh paling mutakhir yaitu adanya pandemi novel *coronavirus disease* (covid-19). Kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa menuntut agar lulusan memiliki pengetahuan yang baik tentang isu-isu global, keterampilan untuk bekerja dalam konteks internasional, dan nilai-nilai warga dunia. Orientasi internasional ini telah menghasilkan ruang kelas yang ditempati oleh guru dan siswa yang berasal dari budaya yang berbeda, yang semuanya terlibat dalam proses pembelajaran lintas budaya.

Saat ini terdapat berbagai perjanjian yang berhubungan dengan *movement of natural persons* dan migrasi tenaga kerja, selain *General Agreement on Trade in Services* (GATS), berapa contoh diantaranya *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic and Trade Agreement UE*-Kanada (CETA), China–Australia *Free Trade Agreement* (ChAFTA) dan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Di Uni Eropa selain berdampak pada migrasi internasional, terdapat juga berbagai standar mobilitas akademik transnasional sebagai modal manusia dan pengalaman. Contohnya yaitu pada para peneliti individu dalam mengkoordinasikan. Di benua Asia, kawasan yang memiliki negara beragam level ekonominya, integrasi ekonomi tidak secepat pada kawasan Eropa. Hugo (2013:14) menyatakan salah satu perubahan paling mencolok di kawasan

Asia-Pasifik selama dua dekade terakhir adalah peningkatan besar-besaran arus barang, keuangan, layanan, dan manusia lintas batas. Tampaknya pendidikan di Asia Tenggara, pada umumnya terlibat dalam internasionalisasi pendidikan, tapi lupa mengembangkan sistem dan budaya lokal sendiri. Upaya liberalisasi perdagangan jasa, termasuk pendidikan, memang menjadi perosalan dilematis bagi banyak negara berkembang. Satu sisi karena tanggung jawab negara atas pendidikan, sisi lainya kehadiran lembaga pendidikan asing menjadi factor yang memengaruhi kebijakan pemerintah tuan rumah. Secara umum belum ada produk hukum dan kebijakan tata pemerintahan pendidikan Indonesia yang jelas terkait *movement of natural persons*, kalaupun ada hanya terkait dengan istilah globalisasi saja.

Memang fenomena globalisasi sudah mengubah pola pikir pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia dan terdapat diberbagai dokumen pertimbangan dikeluarkannya kebijakan, termasuk pendidikan. Sebenarnya keberadaan *movement of natural persons*, dapat dirasakan kehadirannya dalam tata pemerintahan pendidikan Indonesia. Salah satunya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan E-Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang merupakan layanan yang dibuat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah guna memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam pelayanan izin belajar dan penyetaraan ijazah. Pada aspek pendidik, dosen dan guru, kondisi yang bekaitan *movement of natural persons* secara tegas juga belum diatur. Secara umum, hal tersebut diatur dalam peraturan presiden tentang tenaga kerja asing. Pengajaran berkualitas dalam konteks global memberikan indikasi bahwa sektor pendidikan guru tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kemajuan ilmu, teknologi, dan tatanan ekonomi dunia, yang terus semakin meluas akses yang diperoleh masyarakat. Saat ini telah terjadi transformasi kurikulum, pedagogi, penilaian, dan praktik: teori yang memungkinkan respons kreatif terhadap kontradiksi globalisasi.

BAB 6
GLOBALISASI & KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Semua negara di Asia Tenggara kecuali Thailand memiliki sejarah kolonial, dan sistem pendidikan mereka sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial mereka. Kolonialisme meciptakan relasi tidak seimbang antar negara, penjajah dan terjajah, ada eksploitasi sumber daya yang membawa dampak tidak terperikan. Motif ekonomi kolonial yang menghisap inilah yang menjadi mimpi buruk dan kewaspadaan munculnya bentuk baru kolonialisme, melalui globalisasi dalam rupa liberalisasi diberbagai sektor.

Bentuk baru kolonialisme ini secara substantif tidak berbeda dengan sejarah kolonialisme sebelumnya, didalamnya ada eksploitasi sumber daya, dengan berbagai regulasi kekuasaan dan kebijakan seolah-olah menjadi legal. Yudice (2018:12) menyatakan dominasi neoliberalisme saat ini - seperangkat kebijakan yang mencakup liberalisasi perdagangan, privatisasi, pengurangan (dan dalam beberapa kasus hampir dihilangkan) layanan sosial yang disubsidi negara seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, penurunan upah, dan pengeluaran hak-hak buruh -memberikan kontribusi pada pergeseran pandangan politik dalam perhatian politik dari pengambilalihan kekuasaan negara (yang dalam banyak kasus belum menyelesaikan masalah kedaulatan) menjadi masalah hak-hak sipil dan hak asasi manusia serta kualitas hidup.

Globalisasi mendorong serangkaian kebijakan negara menyesuaikan agenda-agenda internasional yang mendesakan kepentingannya. Padahal, kepentingan-kepentigan internasional tersebut merupakan buah dari kepentingan negara-negara kuat, sekaligus wujud dari ketidak berdayaan negara-negara yang lemah ekonominya. Paul (2019:50) menyatakan liberalisme mengharapkan negara-negara kecil tidak memiliki banyak kekuatan dan pengaruh sendiri dalam hubungannya dengan negara-negara kuat.

Kekuatan negara-negara yang mapan secara ekonomi, atas nama kepentingan dan lembaga internasional mendesakkan agenda-agenda mereka untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, ada penghisapan sumber daya di sana. Penghisapan suber daya ini berwajah banyak, potensi setiap negara menjadi faktor pendorong utamanya. Roy & Biswas (2017:46) menyatakan industri perkebunan teh India menghadapi persaingan ketat karena pengurangan hambatan tarif dan pelonggaran pembatasan jumlah impor karena kebijakan LPG (Liberalisasi, Privatisasi, dan

Globalisasi) yang diundangkan pada tahun 1991. Akibatnya, para pekerja, yang sebagian besar bergantung pada perkebunan teh untuk bertahan hidup. Untuk makan, mereka terpaksa menjual anak mereka juga di berbagai perkebunan teh. Kematian pekerja teh karena kekurangan gizi di wilayah ini telah menjadi fenomena umum.

Semua ini telah menyebabkan pekerja menjadi lebih keras. Asher (2017:19) menyatakan efek dari privatisasi, korporatisasi, efisiensi, dan akuntabilitas terlihat jelas dalam konteks pendidikan di India, para pendidik dan cendekiawan menghadapi tantangan dalam menolak rekolonisasi dalam hal kurikulum, pedagogi, kajian, dan wacana. Farzanegan & Hassan (2017:13) menyatakan di Mesir, globalisasi membawa dampak pada pendidikan, pengeluaran pemerintah, produksi industri, dan partisipasi angkatan kerja.

Di Indonesia keperkasaan globalisasi membawa dampak, salah satunya pada sektor budaya dan ligkungan kerja. Kis-Katos, Pieters & Sparrow (2018:763) menyatakan terdapat efek spesifik gender dari liberalisasi perdagangan terhadap partisipasi dalam pekerjaan pasar, tugas domestik, dan tingkat pernikahan di Indonesia. Partisipasi kerja perempuan meningkat dan partisipasi dalam tugas-tugas domestik menurun, pengurangan tarif input mengarah ke ekspansi relatif dari sektor-sektor yang lebih intensif perempuan penurunan segregasi gender sektoral, terutama di antara yang berketerampilan rendah, dan pernikahan yang tertunda di antara kedua jenis kelamin dan berkurangnya kesuburan di antara wanita yang kurang berpendidikan. Di Thailand, Emmons (2019:25) menyatakan perubahan-perubahan seiring dengan meningkatnya migrasi dan persaingan yang disebabkan oleh globalisasi telah memengaruhi perempuan secara tidak proporsional, membuat banyak dari mereka mencari pekerjaan di industri seks.

Struktur masyarakat yang heterogen, di bawah kendali kekuatan globalisasi didorong menjadi homogen, ada keseragaman ekonomi, sosial, dan budaya yang relatif sama antar negara. Ditunjang dengan kenajuan ilmu dan teknologi komunikasi, homogenisasi berlangsung dengan cepat. Crawford (2000:69) menyatakan globalisasi sering dianggap sebagai kekuatan homogenisasi secara ekonomi, sosial dan budaya. Memburuknya saingan utama kapitalisme pada awal 1990-an telah membuka

jalan bagi ekonomi global yang sesungguhnya di mana semua peserta semakin beroperasi di bawah logika umum kapitalisme - yaitu, sistem produksi dan pertukaran yang berorientasi pasar, kepemilikan swasta dan fleksibel pasar tenaga kerja didasarkan atas kepentingan pribadi.

Kekuatan globalisasi tersebut ikut mendorong karakteristik kebijakan antar negara menjadi homogen, struktur kelembagaan ekonomi menjadi kekuatan yang menentukan arah kebijakan pembangunan negara, termasuk kebiajkan nasional pendidikan. Arbolino, Carlucci, Cirà, Simone, Ioppolo & Yigitcanlar (2018:149) menyatakan variabel kelembagaan dan ekonomi memainkan peran yang sangat penting untuk transfer kebijakan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan bidang pendidikan, sebagai penyumbang terbesar ketersediaan sumber daya manusia yang handal tidak bisa melepaskan jerat hegemoni kelembagaan dan ekonomi, sehingga kebijakan pendidikan yang lahirpun untuk melayani mereka. Kebijakan pendidikan hanyalah subordinat negara yang terkena imbas dari berbagai kepentingan globalisasi, yang tentu saja kepentingan nasional dapat diabaikan. Kepentingan nasional pendidikan menjadi hilang batas-batasnya karena dampak globalisasi, yang dikuatirkan membawa dampak buruk lebih jauh lagi kepada masyarakat. Berdasarkan itu, maka bagian ini bermaksud mengetahui dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional pendidikan.

Untuk memenuhi tujuan bagian ini, digunakan penelitian meta analisis. Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kata kunci dampak globalisasi dan kebijakan naasional pendidikan diperoleh beberapa artikel kemudian dipilih yang memenuhi kriteria yaitu tersedianya data dalam bentuk skor. Skor yang diperoleh dianalisis dengan mencari persentase. Teknik analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pembanding untuk menentukan dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional pendidikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan selisih skor variabel yang dikaji yaitu (1) Dampak globalisasi pada berbagai sektor; (2) Model kebijakan nasional pendidikan; (3) Kebijakan nasional pendidikan yang dikembangkan; dan (4) Bentuk dukungan

pemerintah. Dilakukan pengumpulan data dari berbagai jurnal yang dapat diunduh melalui berbagai mesin pencari yang tersedia di internet. Kata kunci yang digunakan variasinya terdiri dari dampak globalisasi pada berbagai sektor, kebijakan nasional pendidikan, dan dukungan pemerintah. Dari langkah-langkah tersebut diperoleh sejumlah 39 naskah, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis keseuaian tema, ditentukan menjadi 19 naskah.

Hasil analisis data menunjukkan dampak globalisasi pada berbagai sektor, disajikan berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah sebagai berikut, ekonomi (9,68%), kurikulum (9,68%), pendanaan pendidikan (9,68%), ketidaksetaraan (8,06%), lingkungan (8,06%), guru (4,84%), mutu pendidikan (4,84%), pengangguran (4,84%), politik (4,84%), sosial budaya (4,84%), teknologi pendidikan (4,84%), kejahatan (3,23%), menentang globalisasi (3,23%), pertanian (3,23%), hukum (1,61%), infrastruktur (1,61%), komunitas (1,61%), kualitas kehidupan (1,61%), pendidikan sains (1,61%), pendidikan tinggi (1,61%), penyebaran pendidikan (1,61%), perilaku konsumen (1,61%), pola pikir (1,61%), dan siswa (1,61%), lihat Gambar 6.1.

Hasil kajian tersebut menunjukan dampak globalisasi pada berbagai sektor, yaitu ekonomi, kurikulum, pendanaan pendidikan, ketidaksetaraan, lingkungan, guru, mutu pendidikan, pengangguran, politik, sosial budaya, teknologi pendidikan, kejahatan, menentang globalisasi, pertanian, hukum, infrastruktur, komunitas, kualitas kehidupan, pendidikan sains, pendidikan tinggi, penyebaran pendidikan, perilaku konsumen, pola pikir, dan siswa. Bertambahnya pengetahuan menjadikan ukuran pasar globalisasi meningkat dari lokal ke nasional dan sekarang ke internasional. Dampak globalisasi ini terjadi diberbagai negara, Guo, Jiang & Shen (2019:476) menyatakan tanah padang rumput di China digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi domestik dan perdagangan internasional. Chen, Ul-Haq, Visas & Cheema (2019:31) menyatakan di Pakistan karena globalisasi kondisi kerja perempuan memburuk sebagai akibat dari penghapusan berbagai macam tarif secara bertahap terkait dengan lingkungan kerja. Untuk mengurangi dampak negatif globalisasi, Salifou & Cao (2018:271) menyatakan perlu adanya integrasi ekonomi dan ketergantungan

timbal balik antara entitas lokal atau global, sehingga dihasilkan aliran yang lancar dan faktor-faktor produksi yang relatif bebas barang dan jasa, praktik bisnis kecil, inovasi dan usaha risiko akan secara obyektif menghasilkan keuntungan. Furuta (2019:12) menjelaskan, dari 139 negara yang diteliti dampak globalisasi menjadikan negara menjadi lebih berkomitmen terhadap hak-hak individu dan konsep universalistik dari proses pendidikan dan cenderung melacak siswa di tingkat sekolah menengah pertama; beberapa karakteristik khusus negara, seperti tingkat perkembangan ekonomi, juga membentuk pelacakan di tingkat sekolah yang lebih rendah.

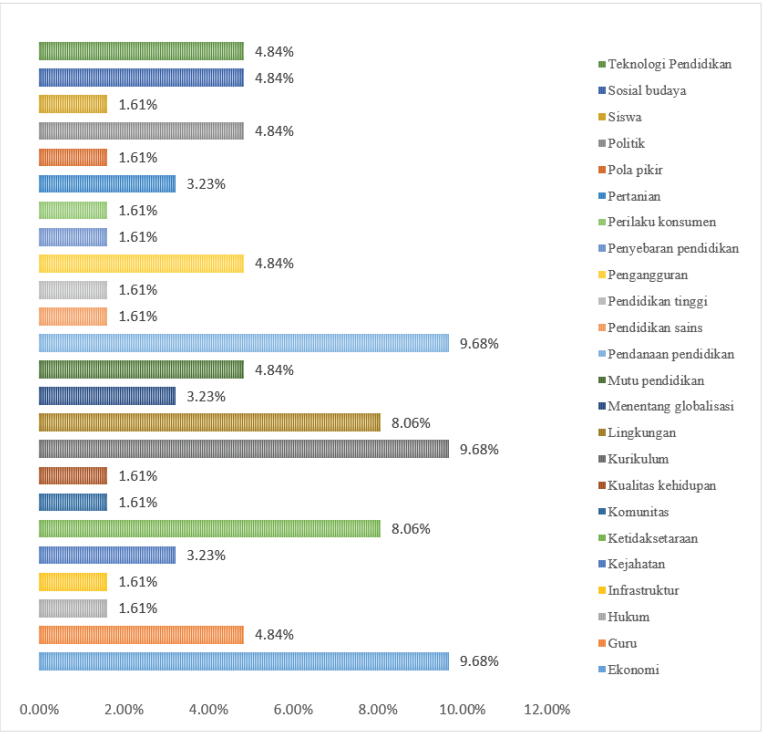

Gambar 6.1 Dampak Globalisasi Berbagai Sektor

Pendidikan sebagai produk jasa tidak bisa lepas dari dampak globalisasi, baik pada kebijakan nasional maupun akademik. Terbukanya akses teknologi dan kemudahan hubungan antar negara dan institusi pendidikan asing, semakin mempercepat dan memperkuat kerja sama. Tetapi karena produsen ilmu berada di

negara-negera maju, negara-negara dunia ketiga hanya menjadi konsumen saja. Berbagai standar dan pemeringkatan pendidikan internasioal telah mendorong lembaga-lembaga pendidikan dan kebijakan negara dunia ketiga dipaksa atau terpaksa mengikuti arus globalisasi. Ketergantungan ilmu dan teknologi menjadikan negara-negara dunia ketiga selalu menempati urutan terbawah standar dan pemeringkatan pendidikan internasional tersebut. Globalisasi belum mampu mendorong kesetaraan penguasaan iimu dan teknologi, yang memungkinkan negara-negara dunia ketiga menjadi produsen ilmu dan teknologi.

Cara pandang dampak globalisasi memang dapat dilakukan dari berbagai sudut, secara umum dapat dilihat melalui status negaranya, apakah negara itu sebgai pemenang atau sebagai pihak yang kalah. Walter (2010:403) menemukan bahwa para pecundang globalisasi lebih cenderung mengekspresikan perasaan tidak aman secara ekonomi. Perasaan seperti itu, pada gilirannya, meningkatkan preferensi untuk ekspansi negara kesejahteraan. Goldberg, Pinelopi, Koujianou & Pavcnik (2007:39) menyatakan globalisasi memengaruhi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang. Pecundang dan pemenang globalisasi berbeda secara signifikan terkait dengan preferensi kebijakan sosial mereka dan kecenderungan mereka untuk menentukan pilihan politik.

Kebijakan nasional pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari globalisasi, sekaligus merupakan pilihan politik negara sebagai bentuk pilihan politiknya. Globalisasi disikapi oleh negara melalui kebijakan nasional pendidikannya. Nguyen & Tran (2018) menyatakan kekuatan globalisasi dan internasionalisasi telah menempatkan pendidikan tinggi Vietnam di bawah tekanan perubahan. Yulia, et.al (2016) menyatakan pendidikan di era globalisasi harus mampu mengidentifikasi organisasi, lembaga pendidikan, yang mengungkapkan perlunya perubahan signifikan dalam sistem pendidikannya berdasarkan kemitraan pemerintah dan bisnis; sistem jaminan kualitas layanan pendidikan, metodologi optimal untuk menilai kualitas; analisis tren, model yang efektif dari pendekatan sistem dan proses dalam kerangka kerja organisasi - mekanisme ekonomi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Bhatia dan Panneer (2019) menyatakan

dampak globalisasi terhadap kualitas pendidikan kontemporer di India, yang mengarah ke kesenjangan keterampilan-kerja semakin meluas.

Model kebijakan nasional pendidikan yang dilakukan negara yang dikaji memperlihatkan keberagaman dalam menyikapi dampak globalisasi. Tabel 6.1 memperlihatkan sektor nasional pendidikan dari yang tertinggi ke terendah, yaitu: pendanaan pendidikan (19%), kurikulum (19%), sosial budaya (10%), guru (10%), politik (10%), mutu pendidikan (10%), teknologi pendidikan (10%), siswa (3%), penyebaran pendidikan (3%), pendidikan sains (3%), dan pendidikan tinggi (3%).

Hasil kajian tersebut menunjukan model kebijakan nasional pendidikan yang dilakukan memperlihatkan keberagaman dalam menyikapi dampak globalisasi, yaitu pendanaan pendidikan, kurikulum, sosial budaya, guru, politik, mutu pendidikan, teknologi pendidikan, siswa, penyebaran pendidikan, pendidikan sains, dan pendidikan tinggi. Globalisasi kerap hanya diterima saja sebagai sebuah keniscayaaan, padahal seperti dikatakan Chew (2019) bahwa problematika kebijakan pendidikan hanya dipahami sebagai pemeriksaan terhadap asumsi-asumsi utama yang mendasari konsep yang diterima begitu saja. Ramirez (2019) menyatakan pendekatan dengan pertimbangan inisiatif kebijakan pendidikan secara terpisah telah menyebabkan banyak konflik kebijakan, komplikasi, dan konsekuensi yang tidak diinginkan, bahwa kebijakan tidak efektif sering kali karena memiliki kerugian input.

Melalui berbagai input pembangunan, kebijakan nasional pendidikan yang dilakukan pemerintah di banyak negara digunakan untuk mendorong perbaikan kualitas hidup rakyatnya. Input tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan proses pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan pendidikan. Sayangnya, input kebijakan nasional pendidikan yang ada tidak menghasilkan output sesuai dengan kata-kata kunci yang diharapkan. Lee (2016) menyatakan berbagai kebijakan pendidikan mencakup konsep-konsep kunci seperti akses dan kesetaraan, kesatuan dan identitas, kualitas dan relevansi, efisiensi dan keefektifan.

Tabel 6.1 Model Kebijakan Nasional Pendidikan

Sektor	AS	Australia	Ethiopia	Jepang	Lithuania	Malaysia	Nigerian	Pakistan	Swiss	Turki	Total
Pendanaan pendidikan		38%				50%			25%	100%	19%
Kurikulum		25%						60%	25%		19%
Sosial budaya			50%	33%			33%				10%
Guru		25%						20%			10%
Politik	50%			33%			33%				10%
Mutu pendidikan					100%				50%		10%
Teknologi Pendidikan	50%			33%			33%				10%
Siswa								20%			3%
Penyebaran pendidikan			50%								3%
Pendidikan sains		13%									3%
Pendidikan tinggi						50%					3%

Konsep-konsep kunci kebijakan nasional pendidikan tersebut buah pemeringkatan dengan berbagai kriteria, yang menunjukan kualitas sumber daya manusia dengan perbandingan internasional. Hampir semua pemeringkatan tersebut memperlihatkan dominasi negara maju terhadap negara terbelakang, sekaligus memperlihatkan buruknya kinerja globalisasi. Artinya, kesejahteraan yang mestinya dapat dinikmati rakyat secara merata disetiap sudut dunia ini, tidak terjadi.

Penguasaan aset-aset ekonomi oleh kekuatan banyak perusahaan transnasional, yang tidak berimbas pada rakyat kebanyakan mengangkangi batas-batas nasionalisme. Sampai saat ini akses dan kesetaraan pendidikan masih menjadi persoalan di banyak negara dunia ketiga, kesatuan dan identitas masih menjadi isu-isu yang banyak melahirkan praktik kekerasan, serta kualitas dan relevansi pendidikan yang masih jauh dari harapan, yang ujung-ujungnya tidak tercapai efisiensi dan keefektifan kebijakan nasional pendidikan. Perusahaan transnasional sektor pendidikan umumnya menawarkan berbagi pelajaran dan pengalaman tentang reformasi pendidikan dan internasionalisasi dengan para tokoh dunia pendidikan, membantu negara dituju mengakses mitra yang tepat untuk berkolaborasi, mempromosikan program kolaborasi dengan mitra, dan memberikan informasi tentang peluang kolaborasi dan pendanaan pemerintah.

Indikator kebijakan nasional pendidikan yang ditemukan dalam kajian ini rata-rata nilainya 7,69%, yang tertinggi memperoleh nilai yang sama (12.50%) yaitu indikator perilaku siswa, kebijakan negara, dan pendapatan negara. Untuk indikator lainnya nilainya sama sebesar 6,25% yaitu sikap pemerintah, integrasi kawasan, pilihan kebijakan, aspek lokal pendidikan tinggi, efek psikologis, aktor untuk beradaptasi, strategi jangka panjang, adaptasi kebijakan, manajemen perubahan, dan komposisi pengeluaran pemerintah, lihat Tabel 6.2.

Hasil kajian menunjukan indikator kebijakan nasional pendidikan terdiri dari indikator perilaku siswa, kebijakan negara, pendapatan negara, sikap pemerintah, integrasi kawasan, pilihan kebijakan, aspek lokal pendidikan tinggi, efek psikologis, aktor untuk beradaptasi, strategi jangka panjang, adaptasi kebijakan, manajemen perubahan, dan komposisi pengeluaran pemerintah.

Hasil kajian tersebut relevan dengan yang dikatakan Spillane, Seelig, Blaushild, Cohen, dan Peurach (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan diidentifikasi di dalam sistem standar, akuntabilitas, kesetaraan, pengambilan keputusan berbasis bukti, kondisi kerja guru, pengembangan guru, masyarakat, yang digerakkan oleh pasar, kepatuhan, dan keunggulan akademik.

Tabel 6.2 Indikator Kebijakan Nasional Pendidikan

Indikator	Nilai
Perilaku siswa	12,50%
Kebijakan kurikulum	12,50%
Pendapatan negara	12,50%
Sikap pemerintah	6,25%
Integrasi kawasan	6,25%
Pilihan kebijakan	6,25%
Aspek lokal pendidikan tinggi	6,25%
Efek psikologis	6,25%
Aktor untuk beradaptasi	6,25%
Strategi jangka panjang	6,25%
Adaptasi kebijakan	6,25%
Manajemen perubahan	6,25%
Komposisi pengeluaran pemerintah	6,25%

Adopsi kebijakan pendidikan diidentifikasi dari tren globalisasi menjadi serangkaian program-program dan kegiatan untuk mendorong pemenuhan indikator-indikator internasional. Alasan kuat untuk pemikiran reformasi kebijakan pendidikan global berupa penilaian siswa internasional saat ini banyak dilakukan karena tren globalisasi itu. Sebagai akibatnya, reformasi pendidikan muncul yang mengandalkan serangkaian asumsi dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki kekurangan pendidikan lainnya. Pengukuran-pengukuran model Program for International Student Assessment (PISA) yang digagas oleh the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), ISO (International Organization for Standardization), berbagai akreditasi, lisensi, dan penjaminan mutu internasional.

Dibanyak lembaga pendidikan di seluruh dunia juga telah menandatangani perjanjian yang sebagian membuat mereka bertanggung jawab untuk mengadaptasi kurikulum mereka sehingga siswa menjadi fasih dengan masalah yang diperlukan dalam program pendidikan yang peduli terhadap lingkungan. Newburry dan Yakova (2006) menyatakan interdependensi kerja secara positif terkait dengan preferensi standardisasi, sedangkan kemelekatan lokal berhubungan negatif dengan preferensi standardisasi.

Aspek lokal sering diabaikan untuk memenuhi berbagai standardisasi pendidikan, kebijakan nasional pendidikan tidak mampu menjangkau wilayah terpencil dan jauh dari pusat perkotaan. Persoalan-persoalan siswa miskin, putus sekolah, dan distribusi guru yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya menjadi pemandangan lumrah di wilayah itu. Sumber daya pendidikan diarahkan untuk pencapaian penukuran internasional, yang mengabaikan kebutuhan lokal. Knight (2019) menyatakan guru yang paling tidak berpengalaman masih terkonsentrasi di sekolah-sekolah miskin dan minoritas tinggi, baik di seluruh maupun di dalam kabupaten. Data Unesco (2019a) menyebutkan pada tahun 2018, sebanyak 258,4 juta anak-anak, remaja dan remaja putus sekolah, mewakili seperenam populasi global kelompok usia ini. Jumlah ini 3,4 juta lebih rendah dari jumlah anak putus sekolah yang dikeluarkan oleh UIS pada September 2018 (261,8 juta). Data tersebut memperlihatkan negara-negara yang lemah dalam persaingan global menjadi penyumbang terbanyak angka putus sekolah, lebih dari satu dari lima anak usia sekolah dasar tidak bersekolah di negara-negara Afrika sub-Sahara, Asia Barat, dan Asia Selatan. Negara-negara dengan tingkat putus sekolah tertinggi termasuk Sudan Selatan (62%), Guinea Ekuatorial (55%), Eritrea (47%), dan Mali (41%).

Secara global, 20% atau 12 juta dari semua anak usia sekolah dasar tidak pernah bersekolah dan mungkin tidak akan pernah memulai jika tren saat ini berlanjut. Sepertiga dari semua anak tidak bersekolah bersekolah di masa lalu tetapi tidak melanjutkan pendidikan mereka, dan 45% kemungkinan masuk sekolah terlambat dan menjadi terlalu tua untuk usia mereka. Di Asia Selatan, lebih dari satu dari empat anak putus sekolah mungkin

tidak akan pernah menginjakkan kaki di ruang kelas. Ini juga merupakan kasus untuk satu dari lima anak putus sekolah di Afrika sub-Sahara, Afrika Utara dan Asia Barat, dan Oseania.

Kebijakan nasional pendidikan belum mampu mengatasi persoalan putus sekolah karena kemiskinan akut yang membelenggu mereka. Tingkat kemiskinan juga terkait erat dengan kesenjangan gender dalam pendidikan. Perbandingan tingkat putus sekolah laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah perempuan umumnya lebih mungkin tidak bersekolah daripada laki-laki, sedangkan yang sebaliknya dapat diamati di negara-negara berpenghasilan tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk remaja usia sekolah menengah atas, di mana tingkat putus sekolah perempuan lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, sementara tingkat putus sekolah laki-laki lebih tinggi di berpendapatan menengah ke atas dan negara-negara berpenghasilan tinggi.

Paling utama penyebab putus sekolah yaitu krisis ekonomi yang membelit keluarga, mendorong anak tidak melanjutkan sekolah. Saepuloh dan Suherman (2018) menyatakan penyebab putus sekolah yaitu: ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya usaha dari orang tua dalam membujuk anaknya dalam melanjutkan pendidikan, dan kurang meratanya pendataan dari pemerintah setempat dalam merespon program pendidikan sehingga masih banyak orang yang kurang mampu tidak mendapatkan program tersebut. Hasil kajian Dewi, Zukhri, dan Dunia (2014) menunjukkan bahwa ada enam faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. Faktor tersebut yaitu ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya, dan lokasi sekolah. Faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan, artinya bahwa perhatian orang tua mampu menjelaskan penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. Aristin (2015) menyatakan faktor-faktor putus sekolah yaitu karena jarak tempat tinggal dengan sekolah, jenis pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan.

Bentuk dukungan pemerintah sebagai dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional pendidikan dilakukan melalui banyak bentuk. Tabel 6.3 memperlihatkan bentuk-bentuk tersebut,

diantara dari yang tetinggi ke terendah: liberalisasi ekonomi (26,09%), privatisasi sektor publik kesehatan dan pendidikan (13,04%), manajemen kinerja (8,70%), partisipasi dalam organisasi internasional (8,70%), menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil (4,35%), manajemen kualitas total (4,35%), pengembangan pasar keuangan internasional yang terintegrasi (4,35%), manajemen risiko (4,35%), penghapusan hambatan perdagangan barang dan jasa (4,35%), pertukaran lintas budaya (4,35%), produksi ramping (4,35%), mendorong ekspor (4,35%), desentralisasi untuk pendidikan tinggi (4,35%), dan meningkatkan otonomi (4,35%).

Tabel 6.3 Bentuk Dukungan Pemerintah

Bentuk Dukungan	Nilai
Liberalisasi ekonomi	26,09%
Privatisasi sektor publik kesehatan dan pendidikan	13,04%
Manajemen kinerja	8,70%
Partisipasi dalam organisasi internasional	8,70%
Menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil	4,35%
Manajemen kualitas total	4,35%
Pengembangan pasar keuangan internasional yang terintegrasi	4,35%
Manajemen risiko	4,35%
Penghapusan hambatan perdagangan barang dan jasa	4,35%
Pertukaran lintas budaya	4,35%
Produksi ramping	4,35%
Mendorong ekspor	4,35%
Desentralisasi untuk pendidikan tinggi	4,35%
Meningkatkan otonomi	4,35%

Hasil kajian ini menunjukan bentuk dukungan pemerintah sebagai dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional pendidikan dilakukan melalui banyak bentuk, yaitu: liberalisasi ekonomi, privatisasi sektor publik kesehatan dan pendidikan, manajemen kinerja, partisipasi dalam organisasi internasional, menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, manajemen kualitas total, pengembangan pasar keuangan internasional yang terintegrasi, manajemen risiko, penghapusan hambatan perdagangan barang dan jasa, pertukaran lintas budaya, produksi ramping, mendorong ekspor, desentralisasi untuk pendidikan tinggi, dan meningkatkan otonomi. Keefektifan kebijakan nasional perlu memperhatikan

kesenjangan yang sangat mungkin terjadi. Karena, seperti yang dikatakan Bernal (2005) bahwa globalisasi menimbulkan kesenjangan sosial, setiap orang memiliki hak yang sama, tetapi apakah semua orang menikmati kondisi atau kemungkinan yang sama? Perjuangan antara monopoli pendidikan publik dan sistem pasar menghasilkan perbedaan yang lebih besar antara kelas sosial.

Perbedaan kelas sosial dan berbagai kebijakan privatisasi telah menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan, akses sanitasi dasar, dan banyak konflik serta perang di banyak negara. Unesco (2019b) menyatakan data dalam skala global menunjukan setengah dari orang yang minum air dari sumber yang tidak aman tinggal di Afrika. Di Afrika Sub-Sahara, hanya 24% dari populasi memiliki akses ke air minum yang aman, dan 28% memiliki fasilitas sanitasi dasar yang tidak dibagi dengan rumah tangga lain. Ketidaksesuaian yang signifikan dalam akses ada bahkan di dalam negara, terutama antara si kaya dan si miskin. Di daerah perkotaan, mereka yang kurang beruntung bertempat di akomodasi sementara tanpa air mengalir sering membayar 10 hingga 20 kali lebih banyak daripada tetangga mereka di lingkungan yang lebih kaya untuk air dengan kualitas yang sama atau kurang dibeli dari penjual air atau truk tangki.

Para pelaku pendidikan di masyarakat harus terus membuat suara mereka didengar dalam debat kebijakan mengenai privatisasi. Gollust dan Jacobson (2006) menyatakan privatisasi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sifat publik yang esensial dari kesehatan publik, memastikan kesetaraan, dan cakupan kesehatan masyarakat yang tepat untuk menyeimbangkan kesehatan pribadi dan layanan populasi. Pendekatan privatisasi, dengan klaim mereka untuk meningkatkan efisiensi, akses, dan kualitas, memiliki daya tarik yang tak terbantahkan, tetapi harus tunduk pada kajian dan evaluasi yang ketat. Pembenaran politik atau ideologis untuk pengaturan ini tidak cukup ketika kesehatan masyarakat dipertaruhkan. Kebijakan nasional pendidikan terkiat pivatisasi dilakukan banyak negara, Whitty dan Power (2000) menyatakan penekanan pada hak-hak konsumen dalam kebijakan pemasaran dan privatisasi dengan kepedulian baru terhadap hak-hak warga negara yang secara tradisional terkait dengan pendekatan sosial-demokrasi untuk kebijakan pendidikan.

Kebijakan nasional pendidikan di berbagai negara belum mampu mengentaskan angka buta huruf, warga miskin dunia menjadi penyumbang terbesarnya, selain karena situasi alam dan perang. Unesco (2018) dalam laporan pemantauan pendidikan global tahun 2018 menempatkan total jumlah orang dewasa yang buta huruf di 750 juta, dari yang 102 juta adalah kaum muda dan dua pertiga adalah perempuan. Kebijakan nasional pendidikan sangat penting untuk menempatkan persoalan ini dalam daftar prioritas. Unesco (2019b) menyatakan Buta huruf adalah masalah yang lebih mendesak bagi lansia daripada generasi muda; ada 40% lansia yang buta huruf lebih banyak daripada remaja yang buta huruf saat ini, dengan sebagian besar orang yang buta huruf tinggal di Asia Tengah dan Selatan. Pendidikan orang dewasa dan akses ke kesempatan belajar seumur hidup menjadi semakin penting ketika teknologi berubah dan tuntutan keterampilan bergeser. Dalam masyarakat yang cepat berubah namun menua, pendidikan orang dewasa dan warga lanjut usia menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa kontrak sosial bekerja untuk semua generasi.

Akhirnya, globalisasi yang asal muasalnya cinta, sepotong hasrat untuk tumbuh dalam kemakmuran ekonomi, kemajuan teknologi, dan rezim yang lebih demokratis, dengan menjadikan liberalisasi dan privatisasi sebagai pilar penyangganya. Namun, globalisasi memang bukan semata-mata cerita tentang kebutuhan neurotik sebuah bangsa atas cinta seperti itu—bukan cinta remeh-temeh—karena bangsa harus keluar dari problem keterasingan dan pembentukan diri-bangsa yang rendah diri untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, yang kemudian mumcul hasrat menguasai. Motif ekonomi kolonial yang menghisap inilah yang menjadi mimpi buruk dan kewaspadaan munculnya bentuk baru kolonialisme, melalui liberalisasi, privatisasi dan globalisasi diberbagai sektor, termasuk kebijakan nasional pendidikan.

Dampak globalisasi tampak pada berbagai sektor, yaitu ekonomi, kurikulum, pendanaan pendidikan, ketidaksetaraan, lingkungan, guru, mutu pendidikan, pengangguran, politik, sosial budaya, teknologi pendidikan, kejahatan, menentang globalisasi, pertanian, hukum, infrastruktur, komunitas, kualitas kehidupan, pendidikan sains, pendidikan tinggi, penyebaran pendidikan, perilaku konsumen, pola pikir, dan siswa. Model kebijakan nasional

pendidikan yang dilakukan memperlihatkan keberagaman dalam menyikapi dampak globalisasi, yaitu pendanaan pendidikan, kurikulum, sosial budaya, guru, politik, mutu pendidikan, teknologi pendidikan, siswa, penyebaran pendidikan, pendidikan sains, dan pendidikan tinggi. Indikator kebijakan nasional pendidikan yang ditemukan dalam kajian ini yaitu indikator perilaku siswa, kebijakan negara, pednapatan negara, sikap pemerintah, integrasi kawasan, pilihan kebijakan, aspek lokal pendidikan tinggi, efek psikologis, aktor untuk beradaptasi, strategi jangka panjang, adaptasi kebijakan, manajemen perubahan, dan komposisi pengeluaran pemerintah. Bentuk dukungan pemerintah sebagai dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional pendidikan dilakukan melalui banyak bentuk, yaitu: liberalisasi ekonomi, privatisasi sektor publik kesehatan dan pendidikan, manajemen kinerja, partisipasi dalam organisasi internasional, menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, manajemen kualitas total, pengembangan pasar keuangan internasional yang terintegrasi, manajemen risiko, penghapusan hambatan perdagangan barang dan jasa, pertukaran lintas budaya, produksi ramping, mendorong ekspor, desentralisasi untuk pendidikan tinggi, dan meningkatkan otonomi.

BAB 7
RESPON STANDARDISASI INTERNASIONAL

Standardisasi internasional di bidang pendidikan menjadi gejala yang terus berlanjut, seiring semakin massifnya globalisasi. Pendidikan dipandang sebagai produk yang terukur dan dapat diperbandingkan antar negara. Pilihan kebijakan pemerintah suatu negara sangat terkait dengan berbagai standadisasi internasional, oleh karenanya negara melalui sumber daya yang ada, melakukan proses pada berbagai aspek manajemen pendidikan untuk berebut peringkat terbaik dari bermacam-macam standardisasi internasional. Globalisasi tidak sekedar istilah teknik ekonomi semata-mata, bidang pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari jeratnya, Leoncio (2013) mengatakan pengaruh globalisasi tampak pada pada sistem pendidikan dan konvergensi pendidikan global.

Globalisasi terus mendorong standardisasi internasional, penilaian yang dilakukan secara transnasional, melewati batas-batas nasionalisme. Kertz-Welzel (2015) menyatakan karena globalisasi, dilakukan penilaian siswa internasional, yang paling umum untuk membandingkan hasil dari seluruh sistem sekolah atau bidang studi tertentu. Khosiyono (2018) menyatakan globalisasi yang ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan penguasaan bahasa asing (Inggris, Perancis, Mandarin, Jepang, Jerman, dan bahasa asing lainnya) sebagai syarat utama untuk mengembangkan diri sehingga mampu bersaing di tengah masyarakat global. Standardisasi internasional terkait bahasa-bahasa tersebut menjadi marak kemudian.

Respon pemerintah terhadap standardisasi internasional ini melahirkan serangkaian respon kebijakan pendidikan. Standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh badan standardisasi internasional yang diterapkan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Adopsi standar internasional oleh suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber. Suparmin (2018) menyatakan berapa negara di dunia, termasuk Indonesia mengasumsikan bahwa pengembangan standarisasi, jaminan kualitas dan akreditasi harus di pahami sebagai respon negara terhadap situasi semakin kompleks untuk mengendalikan sistem pendidikan dan untuk menjaga standar

kualitas. Zhang (2018) menyatakan standardisasi internasional telah mendorong semakin banyaknya model pendidikan internasional.

Globalisasi dan standardisasi internasional di Indonesia mendapatkan respon dari pemerintah melalui berbagai produk kebijakan nasional. Memang tidak secara eksplisit dalam undang-undang sistem pendidikan nasional menunjuk globalisasi dan standardisasi internasional ini, tetapi ada 5 pasal yang dengan tegas menyebutkan: (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia; (2) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia; (4) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia; dan (5) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 menyebutkan 28 kata global dan globalisasi yang digunakan secara bergantian untuk menunjukan tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia, daya saing Indonesia di mata dunia internasional, mutu kemahiran membaca, dan karakter siswa dan jati diri bangsa. Kata standardisasi dikaitkan dengan: (1) Standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar; (2) Standardisasi kelembagaan pelayanan perizinan; (3) Peningkatan kinerja BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi dalam melaksanakan standardisasi; (4) Jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan (5) Gerakan standardisasi mutu

bahasa. Kata standardisasi internasional muncul pada kalimat yang bermakna sejenis, yaitu: proses sertifikasi internasional, daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional, promosi dan diplomasi kebudayaan secara internasional, konvensi internasional mengenai pendidikan, penilaian berstandar internasional, daya saing di pasar internasional, peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 menyebutkan kata global 19 kali dan globalisasi 2 kali. Global dan globalisasi dikaitkan dengan kompetisi, perkembangan dunia, kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, perbedaan dunia kerja, berkebinekaan, melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa, kompetensi, berkewargaan global, interaksi, talenta, nilai baru dari kebudayaan, praktik-praktik baik, berwawasan, dan terindeks global. Dibandingkan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019, tahun 2020-2024 lebih kaya dan terukur dalam hal pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis.

Naskah akademik Kurikulum 2013, globalisasi dijadikan subjudul tersendiri sebagai bagian dari landasan empiris, tidak kurang dari 7 kata ini disebutkan. Sedangkan standardisasi internasional 2 kali ditegaskan, yaitu terkait dengan hubungan sekolah dengan masyarakat sekitarnya dan performansi standar pendidikan. Yuliantoro (2016) menyatakan salah satu bentuk imajinasi identitas nasional Indonesia terbentuk sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam arena internasional dan pengembangan komunitas global dengan cara menghasilkan warga negara yang bersaing secara global melalui pendidikannya. Sayangnya untuk mecapai standardisasi internasional tidak semudah membalik telapak tangan, seperti yang diungkapkan Raharjo (2014), untuk ketercapaian standar nasional pendidikan saja belum tuntas, terdapat 4 standar yang masih rendah yaitu standar sarana-prasarana 86,6%, standar proses 87,5%, standar kompetensi 87,5%, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan 87,7%.

Bagian ini bertujuan untuk mengetahui (1) respon kebijakan pendidikan dan (2) aspek manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon standardisasi internasional.

Untuk mencapai tujuan, bagian ini menggunakan penelitian meta analisis. Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kata kunci diperoleh beberapa artikel, kemudian dipilih yang memenuhi kriteria yaitu tersedianya data dalam bentuk skor. Pengumpulan data dari berbagai jurnal yang dapat didownload melalui berbagai mesin pencari yang tersedia di internet. Kata kunci yang digunakan variasinya terdiri dari respon kebijakan pendidikan, aspek manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, dan respon standardisasi internasional. Diperoleh sejumlah 46 naskah, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis keseuaian tema, ditentukan menjadi 28 naskah.

Hasil analisis data menunjukkan respons kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia terhadap standardisasi internasional meliputi berbagai kebijakan pendidikan. Hasil kajian menunjukan respon tersebut, dari persentase terbesar sampai yang terkecil, yaitu: adopsi nilai-nilai standar kualitas internasional (17,31%), memperluas akses dan meningkatkan kesetaraan (11,54%), pengembangan standarisasi pendidikan (11,54%), pendidikan seni budaya (7,69%), manajemen berbasis sekolah (5,77%), desain kurikulum (5,77%), otonomi institusi pendidikan (3,85%), penguatan kompetensi siswa (3,85%), sertifikasi (3,85%), mengembangkan pendidikan bahasa (3,85%), penguatan kapasitas dan kemauan lokal, upaya pemerataan pendidikan menengah, program kelas internasional, akreditasi satuan pendidikan, penguatan faktor di luar sistem pendidikan, efisiensi dan efektifitas, membangun sistem indeks evaluasi pendidikan, implementasi e-procurement, berpartisipasi aktif dalam arena internasional, pengembangan komunitas global, percepatan proses desentralisasi pendidikan, badan hukum pendidikan, dan modernisasi pendidikan islam, masing-masing memiliki persentase yang sama (1,92%).

Aspek manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan respon standardisasi internasional, yaitu standardisasi kualitas (27,12%), otonomi

pendidikan (20,34%), pembiayaan pendidikan (13,56%), kurikulum dan pembelajaran (10,17%), standardisasi pengelolaan (10,17%), pemerataan pendidikan (6,78%), guru dan tenaga kependidikan (5,08%), budaya (5,08%), dan siswa (1,69%).

Hasil kajian ini menunjukan bahwa respons kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia terhadap standardisasi internasional persentase terbesar yaitu pada adopsi nilai-nilai standar kualitas internasional (17,31%). Sejalan dengan hasil kajian tersebut yaitu bahwa nilai-nilai standar kualitas internasional diadopsi dan merujuk nilai-nilai standardisasi internasional ketika mengevaluasi pendidikan (Jæger & Gram, 2015; Liu, 2017), adopsi standar akuntansi global (Alsharairi, Atmeh, & Al-Abdullah, 2019), adopsi sistem pendidikan sekolah (Mufid & Suwidi, 2016), dan adopsi isi dan metode pengajaran utama (Choi & de Vries, 2011).

Di Indonesia, standar nasional pendidikan mulai diberlakukan sejak undang-undang sistem pendidikan nasional (nomor 20 tahun 2003). Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum dihapus oleh Mahkamah Kontitusi, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Mutu layanan pendidikan yang mesti diperbaiki oleh pemerintah memang berat, karena masih rendahnya jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, lebih dari 20 persen sekolah disemua jenjang belum memenuhi standar pendidikan minimal. Terdapat 38.912 sekolah yang belum memenuhi standar

nasional pendidikan, dari 201.940 sekolah yang ada. Jenjang sekolah dasar masih terdapat 27.270 yang belum memenuhi standar nasional pendidikan dari jumlah total sekolah dasar 148.805, sekolah menengah pertama 8.725 dari 39.426, dan sekolah menengah atas 2.917 dari 13.709 sekolah. Artinya, masih banyak sekolah yang harus diperbaiki mutu layanan pendidikannya.

Alih-alih memperbaiki dan mendorong pemenuhan standar nasional pendidikan, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang problematik, standardisasi internasional untuk sekolah. Tahun 2008, karena dianggap impelementasi standardisasi internasional terutama di SMK itu bagus, seperti misalnya ISO 9001 dengan berbagai variannya, khususnya bagi sekolah-sekolah yang masih dalam tahap perintisan, program ini menjadi mulus jalannya. Tahun 2009, Kompas (2009) memberitakan, setidaknya 275 SMK di sejumlah kabupaten/kota telah mengantongi sertifikat ISO 9001:2000 yang menunjukkan kualitas manajemen sekolah sudah baik. Selain itu, telah terdapat 312 rintisan SMK bertaraf internasional. Bagaimana dengan kondisinya sekarang, kebijakan standardisasi internasional model ISO ini meredup.

Dulu dikatakan manfaat ISO dalam hal dokumentasi, alur kerja-koordinasi-komunikasi, *job description* dan prosedur operasi standar (SOP) sehingga masing-masing anggota organisasi sekolah dapat memahami tugasnya, program ini berjalan mulus. Meskipun dalam beberapa hal penerapan standar ISO tersebut dihadapkan pada kendala diantaranya kesiapan fasilitas SMK yang belum cukup memadai untuk mencapai standar ISO, komitmen sumber daya manusia dan ketersediaan dana juga dibutuhkan untuk mencapai sertifikat ISO. Ditambah, dari data BPS tahun 2016 memperlihatkan dari kelas yang ada terjadi kekurangan guru SMA dan SMK masing-masing sebesar 160.661 dan 108.249 orang.

Kebijakan mengenai standardisasi internasional tersebut, kemudian untuk mendukung pembangunan ekonomi, Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu membuat kebijakan yang signifikan tentang proporsi jumlah siswa SMA dan SMK dari 57,85%:42,15% pada tahun 2007 dan menjadi 30%:70% pada tahun 2014. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. SMK yang digadang-gadang lulusannya terserap lapangan kerja memperlihatkan nasib tidak berbeda

dengan yang lain, dari tahun 1988 – 2018 kecenderungannya sama. Slamet (2016) menyatakan peningkatan jumlah siswa SMK tidak mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah siswa SMK menyebabkan tingkat pengangguran lulusan SMK makin tinggi.

Respon kebijakan pemerintah Indonesia berikutnya, yang dominan yaitu memperluas akses, meningkatkan kesetaraan, dan pengembangan standarisasi pendidikan (11,54%). Kebijakan tersebut, seperti yang dikatakan Suyahman (2016) dan Lee (2016) mengarah pada asas keadilan terhadap akses pendidikan, memperluas akses, dan meningkatkan kesetaraan. Hartmann (2018) menyatakan koordinasi transnasional yang muncul membutuhkan standarisasi lintas sektoral dalam konten dan kualitas keterampilan.

Tabel 7.1 berdasarkan data BPS tahun 2018, memperlihatkan pengangguran terbuka 1988 – 2018, pembangunan pendidikan untuk menyerap pasar kerja, selama ini dipercaya melalui pendidikan vokasional, tapi ternyata pasar tenaga kerja Indonesia tidak mampu menyerap dengan baik lulusan pendidikan ini. Pada tingkat pendidikan SMK yang digadang-gadang lulusannya terserap lapangan kerja memperlihatkan nasib tidak berbeda dengan yang lain, dari tahun 1988 – 2018 kecenderungannya sama. Artinya, berbagai kebijakan pendidikan vokasional belum mampu mendorong lulusannya menjadi individu kompeten, termasuk penerapan stadardisasi internasional. Lulusan sekolah vokasional belum dibekali modal kewirausahaan yang baik, padahal modal ini yang tanpa batas, berbeda dengan ketersediaan pasar kerja yang kompetitif dan terbatas.

Data BPS tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,23 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan (1,30 persen poin). Pandemi virus corona (Covid-19) membuat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran penduduk usia muda Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Tingkat pengangguran terbuka penduduk usia 15-24 tahun merupakan kelompok pengangguran

tertinggi, mencapai 20,46 persen. Tingkat pengangguran terbuka usia muda Indonesia hampir setara dengan sejumlah negara gagal *(failed state*) akibat konflik, yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara tersebut. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni 13,56 persen dan SMA 9,86 persen. Sedangkan, lulusan diploma III 8,08 persen dan universitas 7,35 persen.

Pengalaman di Estonia, siswa memasuki sekolah kejuruan karena prestasi belajarnya lemah. Musset, et al. (2019) menyatakan bahwa di Estonia hanya sekitar seperempat dari kelompok pemuda memasuki program kejuruan di tingkat menengah atas, banyak dari mereka dengan prestasi sekolah yang lemah. Banyak siswa di Estonia menglami putus sekolah, sekitar seperempat dari peserta gagal untuk menyelesaikan. Untuk kasus di Indonesia seperti dikatakan Slamet (2016) tingkat pengangguran lulusan SMK justru bertambah dengan bertambahnya persentase jumlah siswa SMK. Ini jelas tidak efisien karena SMK memiliki tugas dan fungsi pokok menyiapkan lulusannya untuk bekerja dan biaya penyelenggaraanyapun jauh lebih mahal dari pada SMA.

Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ekspansi jumlah siswa SMK harus dihentikan. Idealnya SMK memberikan peluang kepada lulusan untuk terserap pada lapangan kerja lebih baik, tetapi pemintaan dan penawaran kerja tidak mencapai keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Pola pikir rata-rata siswa kejuruan menengah tidak jauh berbeda dari pola pikir siswa dalam bentuk pendidikan lainnya. Namun, sebagian besar siswa kejuruan menengah tidak memiliki mindset berkembang dan pola pikir serta prestasi akademik tampaknya tidak berhubungan.

Peran pemerintah yang tidak mampu membuka lapangan kerja lebih luas, juga menjadi persoalan lulusan pendidikan vokasional semakin kompleks. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah pengangguran di Indonesia, padahal setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penciptaan lapangan kerja ini tak hanya melibatkan kepentingan lulusan pendidikan vokasional, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah dengan cara melakukan perluasan kesempatan kerja ataupun penempatan kerja untuk para pencari kerja.

Tabel 7.1 Pengangguran Terbuka 1988 – 2018

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2018
1	Tidak pernah sekolah	41.695	23.104	31.779	352.518	79.764	112.435	42.039
2	Tidak/belum tamat SD	128.880	92.356	223.029	710.354	448.431	523.400	446.812
3	SD	343.563	421.822	909.479	2.495.928	2.216.748	1.421.873	967.630
4	SLTP	333.506	356.418	983.145	2.458.913	2.166.619	1.821.429	1.249.761
5	SLTA Umum/SMU	687.929	748.491	1.616.700	2.435.819	2.204.377	1.874.799	1.650.636
6	SLTA Kejuruan/SMK	385.943	349.988	851.902	1.037.103	1.165.582	864.649	1.424.428
7	Akademi/Diploma	55.265	77.183	175.417	202.809	519.867	197.270	300.845
8	Universitas	63.937	129.848	253.809	245.857	626.202	425.042	789.113
	Total	**2.040.718**	**2.199.210**	**5.045.260**	**9.939.301**	**9.427.590**	**7.240.897**	**6.871.264**

Pendidikan seni budaya (7,69%) menjadi kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia dalam merespon standardisasi internasional berikutnya. Pemerintah Indonesia menganggap budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Seni dan karya budaya Indonesia mulai terasa asing di negara sendiri. Seni dan budaya itu secara halus mulai tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

Kebijakan pendidikan senin budaya, termasuk bahasa, diarahkan pada upaya menyediakan sarana dan prasarana aktualisasi seni dan karya budaya; mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif serta kecintaan pada produk dalam negeri; mempromosikan seni dan karya budaya di tingkat internasional. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa yaitu dengan jalan: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; dan d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program kerja pemerintah meliputi usaha mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui cara: pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri, pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia), dan pembangunan museum dan pusat kesenian. Wujud kegiatannya berupa peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional,

kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional). Selain itu berupa optimalisasi kecamatan yang memanfaatkan laboratorium seni budaya, pembinaan kesenian, dan peningkatan jumlah guru yang berkompeten bidang seni dan budaya.

Tampaknya selain karena kekhawatiran terhadap dampak tidak baik terhadap masuknya budaya dari luar, berbagai relasi internasional yang tidak selamanya positif, pemerintah menodorong berbagai program seni budaya asli Indonesia. Memang terjadi homogenisasi seni budaya akibat adanya relasi internasional yang masf terjadi, karena gobalisasi pekembangan ilmu dan teknologi. Ada usaha pemerintah untuk mempertahankan indentitas individu dan identitas nasional. Winarno (2004) menyatakan pendekaan budaya globalmasih merupakan suatu hal yang probematis, apakah sebagai realitas (*reality*), sebagai sebuah kemungkinan (*probability*), atau sebagai sebuah fantasi (*fantacy*).

Kebijakan pemerintah Indonesia yang lain dalam merespon berbagai standardisasi internasional yaitu mendorong praktik manajemen berbasis sekolah (5,77%) dan berbagai perubahan desain kurikulum (5,77%). Usmar (2018) menyatakan kebijakan tersebut merupakan solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan solusi teknis, yakni solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Silvanto, Ryan & Gupta (2017) menyatakan desain kurikulum dalam merespon standardisasi internasional menekankan pada menawarkan tingkat pengalaman belajar internasional yang lebih besar. Standardisasi internasional, oleh dikatakan Leoncio (2013) bahwa pada tingkat makro, sistem pendidikan semakin berbagi bentuk organisasi, desain kurikulum, struktur akademik, dan bentuk pemerintahan; secara morfologis semua sistem pendidikan pada dasarnya "sama".

Muara kebijakan pemerintah Indonesia yaitu berupa otonomi pendidikan yang lebih luas pada level daerah dan satuan pendidikan. Perbedaan pandangan terkait otonomi pendidikan tersebut tampak pada hasil-hasil kajian berikut. Otonomi sekolah sangat terkait dengan pilihan strategi dalam otonomi sekolah (Wang & Chan, 2015), kepuasan kerja kepala sekolah dan otonomi sekolah (Solomou, Nicolaidou & Petros, 2016), otonomi sekolah dan prestasi siswa (Hanushek, Link & Woessmann, 2013), dan otonomi

sekolah, sistem tanggung jawab, dan akuntabilitas sekolah (Bracci, 2009). Wilkins (2015) menyatakan di Inggris efek otonomi sekolah berupa peningkatan pemantauan dan pengawasan oleh badan pengelola sekolah. Woessmann (2016) menyatakan bahwa yang penting bukanlah jumlah input (otonomi sekolah) yang diberikan sistem sekolah, melainkan bagaimana mereka menggunakannya.

Dalam otonomi pendidikan, terdapat praktik tanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk tersebut antara lain sekolah mengendalikan perencanaan dalam setiap komponen manajemen sekolah, sekolah mengendalikan pelaksanaan dalam setiap komponen manajemen sekolah, sekolah mengendalikan penilaian dalam setiap komponen manajemen sekolah, melakukan pertanggungjawaban implementasi program sekolah, pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis yang sah, dan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tidak tertulis disertai bukti-bukti administratif yang sah.

Hasil kajian ini menunjukan bahwa ada penguatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal kompetensi siswa (3,85%) dan sertifikasi (3,85%) dalam merespon standardisasi internasional. Kadatska (2016) menyatakan kompetensi ini berfungsi sebagai fondasi dan tolok ukur yang harus diikuti untuk kurikulum inti standar yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mempersiapkan tenaga kerja secara internasional. Syahril (2016) menyatakan bahwa di Indonesia, seperti banyak negara di dunia, telah terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gurunya sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, melalui sertifikasi.

Terakhir, hasil kajian ini menunjukan respon pemerintah Indonesia terhadap standardisasi internasional terdapat pada penguatan kapasitas dan kemauan lokal, upaya pemerataan pendidikan menengah, program kelas internasional, akreditasi satuan pendidikan, penguatan faktor di luar sistem pendidikan, efisiensi dan efektifitas, membangun sistem indeks evaluasi pendidikan, implementasi e-procurement, berpartisipasi aktif dalam arena internasional, pengembangan komunitas global, percepatan proses desentralisasi pendidikan, badan hukum pendidikan, dan modernisasi pendidikan islam, masing-masing

memiliki persentase yang sama (1,92%). Nurmandi & Kim (2015) menyatakan berbagai tingkat keberhasilan dalam implementasi dan berbagai faktor penentu yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas di Indonesia menyiratkan bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dalam melaksanakan reformasi. Suroto (2014) menyatakan dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperoleh perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing.

Pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan program sekolah bertaraf internasional (SBI) yang diselenggarakan pemerintah dipicu oleh beberapa latar belakang kelahirannya. Beberapa latar belakang tersebut antara lain: pada tahun 90-an, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh suatu yayasan dengan menggunakan identitas internasional tetapi tidak jelas kualitas dan standarnya; banyak orang tua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan anaknya ke luar negeri; belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sekolah internasional; dan perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) pendidikan. Atas fenomena tersebut, pemerintah mulai mengatur dan merintis sekolah bertaraf internasional. Selain itu juga perlunya pengakuan secara internasional terhadap kualitas proses, dan hasil pendidikannya.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengentikan, kritik terhadap pelaksanaan SBI salah satunya karena menjadikan kurikulum dan materi pelajaran terkesan tidak terkontrol oleh pemerintah. Selain memakai kurikulum nasional, sekolah-sekolah nasional tersebut juga mengadopsi kurikulum internasional. Bahkan, pengajarnya lebih banyak warga negara asing, termasuk penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu berupa munculnya dampak panjang sosial budaya dan nasionalisme pada anak-anak Indonesia. Para siswa begitu minim pengetahuan sosial dan budaya Indonesia, nilai-nilai historis dan nasionalisme, serta sikap individualisme yang begitu tinggi. Kurikulum sekolah menyiapkan mereka sebagai warga dunia atau sebagai komunitas internasional, sebaliknya nilai-nilai keIndonesiaan tidak ditanamkan. Sekolah bertarif internasional mengancam potensi lokal.

Pemerintah belum memiliki landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sekolah nasional plus ini. Itu berarti pemerintah tidak percaya terhadap sistem pendidikannya sendiri, yaitu pendidikan nasional yang bisa bersaing secara global dengan negara lain. Kebijakan pemerintah justru mendorong bermunculannya sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional dan berbiaya besar ini. Seharusnya pemerintah memperkuat sistem pendidikan sendiri, bukan sebaliknya menciptakan sistem pendidikan berkelas-kelas yang menciptakan bom sosial kelak di kemudian hari.

Mahkamah Konstusi menyatakan SBI tidak sesuai dengan amanat UUD dan karena itu keberadaanya di sistem pendidikan Indonesia tidak boleh diteruskan. Sebagian besar hakim MK yang menangani gugatan ini menegaskan, pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI bisa menggerus kebanggaan berbahasa Indonesia. Para hakim juga mempersoalkan pungutan biaya tinggi bagi mereka yang ingin menikmati RSBI, dengan biaya jauh di atas rata-rata biaya sekolah berstandar nasional, RSBI hampir mustahil dijangkau oleh siswa-siswa dari keluarga miskin. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu. Dari delapan Hakim anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim Ahmad Sodiki memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan menegaskan: Mahkamah seharusnya menolak gugatan ini. Image caption Sekolah internasional sebelumnya didominasi swasta dengan biaya hingga ratusan juta. Menurut Sodiki, Mahkamah seharusnya menangani gugatan terkait norma pendidikan, bukan kasus kongkrit mengenai keberadaan SBI. Dengan kata lain jika yang dipersoalkan adalah bahasa Inggris sebagai pengantar dan diskriminasi karena biaya SBI, maka kebijakan tentang SBI sendiri mestinya tetap sah berlaku, bukan dihilangkan. Jika ada upaya lebih serius mengajarkan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, itu tidak lepas dari praktik pengajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang berhasil. Berapa ribu mahasiswa perguruan tinggi yang walaupun telah belajar bahasa Inggris kurang lebih enam tahun sejak SMP-SMA tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. Ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa adalah berlebihan. Praktik penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah dan pesantren selama

bertahun-tahun di Indonesia tak pernah menunjukkan adanya pengikisan kebanggaan berbahasa Indonesia dan terkikisnya jati diri murid selaku warga Indoensia. Malah ketidakmampuan berbahasa Inggris juga sangat merugikan karena membuat banyak warga Indonesia kalah bersaing dengan warga bangsa lain.

Selanjutnya, apakah kebijakan penghapusan SBI ini kemudian efektif mengurangi sekolah-sekolah berlabel internasional. Sayangnya, SBI yang merupakan sekolah negeri milik pemerintah mati, tapi kemudian menjamur sekolah-sekolah internasional swasta yang semakin merajalela. Data dari ISC Research (2019) menyatakan Indonesia masih mempertahankan posisinya sebagai destinasi utama untuk sekolah-sekolah internasional di Asia Tenggara. Indonesia masih memimpin dengan jumlah 198 sekolah internasional, kemudian diikuti Thailand (192), Malaysia (187), Singapura (119), dan Vietnam (118). Padahal kontrol pemerintah terhadap jenis sekolah ini sangat sulit, dibandingkan dengan sekolah negeri.

Respons kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia terhadap standardisasi internasional yaitu pada adopsi nilai-nilai standar kualitas internasional, pada aspek evaluasi pendidikan, standar akuntansi global, sistem pendidikan sekolah, isi, dan metode pengajaran utama. Kebijakan pendidikan diarahkan pada asas keadilan terhadap akses pendidikan, memperluas akses, dan meningkatkan kesetaraan, standarisasi lintas sektoral dalam konten, dan kualitas keterampilan. Kebijakan pemrintah Indonesia yang lain dalam merespon berbagai stndardisasi internasional yaitu mendorong praktik manajemen berbasis sekolah dan berbagai perubahan desain kurikulum, bahwa ada penguatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal kompetensi siswa dan sertifikasi dalam merespon standardisasi internasional. Aspek manajemen pendidikan pemerintah Indonesia sebagai respon standardisasi internasional yaitu kurikulum, pembiayaan, guru, budaya dan lingkungan sekolah, dan akreditasi.

BAB 8
SITUASI GLOBAL, TAMAN SISWA, & PERGERAKAN NASIONAL

Perkumpulan rutin 35 hari sekali – setiap Selasa Kliwon – didirikan tahun 1921, tempat banyak bangsawan Jawa bertemu, mempersiapkan berdirinya National Onderwijs Instituut Tamansiswa (Lembaga Perguruan Nasional Tamansiswa), di rumah Ki Ageng Soerjomentaram, untuk *kindergarten* (taman kanak-kanak) dan kursus guru, perguruan ini didirikan. Ki Ageng Suryomentaran merawat orang dewasa melalui Kawruh Jiwa yang terdiri dari Kawruh Pamomong, dan Ki Hadjar Dewantara merawat anak-anak melalui Sistem Among di Sekolah Tamansiswa. Towaf (2016) menyatakan dalam konteks gerakan nasional, komunitas ini sadar bahwa dalam bercita-cita untuk kemerdekaan Indonesia tidak cukup dengan perkelahian fisik, politik, atau diplomatik; tapi rakyat Indonesia harus dididik, untuk mengembangkan potensi alam yang diberikan oleh Tuhan untuk mencapai kebebasan dan martabat sebagai orang Indonesia.

Kepemimpinan pendidikan Tamansiswa, melalui individu tokoh-tokohnya, terus berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tercatat dalam sejarah, selain Ki Hadjar Dewantara, pernah menjabat Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama, tahun 1949 sampai September 1950 yaitu Sarmidi Mangoensarkoro. Sayangnya, seperti yang dicatat Tsuchiya (1975) pada tahun 1934, kepemimpina Tamansiswa yang begitu keras secara terus menerus menimbulkan pertikaian intern, yang memicu berapa guru berhenti mengajar.

Pertikaian internal di Tamansiswa itu juga dipantik perbedaan pandangan perlawanan terhadap penjajah. Secara umum di Tamansiswa terjadi perlawanan yang keras terhadap Undang-undang Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*, 1932) dan menjadi *milestone* bagi pergerakan nasional Indonesia.

Tahun 1920-an dipenuhi dengan ketegangan perang, yang membawa dampak pada pendidikan di berbagai negara. Organisasi pendidikan juga mengalami berbagai perubahan dan corak ragam gerak perjuangaannya. Fuchs (2007) menyatakan hampir tidak ada keraguan bahwa Perang Dunia Pertama mengganggu sebagian besar hubungan pendidikan internasional yang telah mencapai puncaknya dalam dua dekade sebelum pecahnya perang. Di hampir semua bidang pendidikan - sistem pendidikan, ilmu pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, kesejahteraan anak, dan profesi

pendidikan - organisasi dan kongres internasional telah dibentuk pada saat ini. Whyte (1974) dan Miles (1984) mengatakan bahwa Russia pada tahun-tahun itu juga mengadakan berbagai reformasi pendidikannya, melalui pendidikan pekerja dengan otoratianisme Partai Komunis dan Liga Plebs pada 1920-an.

Kondisi di Belanda, bangsa yang menjajah Indonesia sekian lama, oleh Burger & Veldheer (2001) dinyatakan bahwa pertumbuhan sektor pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan sosial, seni, dan budaya, Belanda memiliki tradisi inisiatif pribadi yang panjang dan kaya, mulai dari abad pertengahan dan kegiatan yang berkaitan dengan gereja hingga pillarisasi di abad ke-19 dan ke-20. Selain itu postur pemerintah menciptakan lingkungan politik yang merangsang pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Hall (1981) menyatakan pada 1900, pendapat Belanda tentang urusan kolonial menganggap liberalisme sudah ketinggalan zaman. Pemerintah mengadopsi kebijakan tanggung jawab moral untuk kesejahteraan penduduk asli. Gagasan ini masukkan ke dalam 'Pidato dari Tahta' tahun itu, dengan demikian diluncurkan yang kemudian dikenal sebagai Kebijakan Etis.

Sejarah Tamansiswa adalah membicarakan hubungan antarbiografi yang melewati atau menembus batas waktu, hal ini berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh, organisasi, dan peristiwa sejarah yang sezaman khususnya di bidang politik dan pendidikan, meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan. Sebaran spasialnya tentunya seluruh nusantara dan lingkup temporalnya mencakup periode pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20. Periode waktu tahun 1900-1945 merupakan perioda pergerakan nasional Indonesia.

Saling ketergantungan global adalah kenyataan; dalam keamanan, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan khususnya dalam pendidikan suatu bangsa. Terkait dengan perlunya dialog internasional tentang pendidikan, bagian ini bertujuan mengetahui pengaruh situasi global, tamansiswa, dan kepemimpinan pendidikan sebagai medan pergerakan nasional Indonesia.

Untuk tujuan pada bagian ini, dilakukan penelitian dengan jenis kualitatif-interpretif dan kepustakaan (Silverman, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai sumber

pustaka dan analisi secara kualitatif dengan teknik purposively selected texts sampling (Assarroudi et al., 2018). Pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Filosofis yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan obyek penelitian dengan sudut pandang filosofis; (2) Historis faktual yang digunakan untuk melacak benamg merah obyek kajian, dalam lingkungan historis dan berbagai pengaruhnya; dan (3) Hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan simbol dan dicari arti serta maknanya (Hennink et al., 2020). Sumber data penelitian berasal dari literatur yang terkait dengan objek kajian, berupa buku dan jurnal. Sumer primer dalam penelitian ini yaitu buku dan jurnal ilmiah terkait dengan tema. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen yang dilakukan dengan teknik anotasi bibliografis (Merriam & Tisdell, 2015). Triangulasi dilakukan melalui sumber berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek yang menjadi faktor yang membentuk kepemimpinan pendidikan Tamansiswa sebagai medan pergerakan nasional Indonesia, yaitu situasi global tahun 1900-an, perkembangan ilmu pendidikan tahun 1900-an, dan peran Tamansiswa dalam medan pergerakan nasional Indonesia. Situasi global tahun 1900-an dan merembes masuk ke Indonesia dalam dua kekuatan besar ideologi yaitu nasionalisme sekuler dan islamisme. Di Asia, pergulatan kekuatan ideologi juga terjadi di Cina, yang tumbuh jadi kekuatan yang membesar, rakyat frustrasi dengan imperialisme kulit putih dari Liga Bangsa-Bangsa dan imperialisme merah dari Komunis Internasional Ketiga, sejumlah intelektual Cina mulai membahas kemungkinan untuk opsi ketiga selama tahun-tahun antar perang. Di Indonesia, muncul berbagai pergerakan, yang tidak sekedar kedaerahan tetapi bersifat nasional kebangsaan. Tamansiswa didirikan di atas prinsip penerimaan terhadap perubahan yang sedang berlangsung, faktor – faktor asing ikut campur dalam proses perbaikan masyarakat, sangat menghambat penyesuaian yang normal. Terdapat pengaruh Rabindranath Tagore terhadap gerakan pendidikan nasional Indonesia tahun 1920 - 1930-an dan Tamansiswa. Sementara itu, gagasan politik Gandhi, yang berhasil dalam banyak hal, telah

menginspirasi banyak hak sipil dan gerakan kemerdekaan nasional di seluruh dunia, khususnya di negara-negara demokrasi liberal dan di negara-negara dengan tingkat konstitusionalitas tertentu. Gagasan Gandhi menjadi sumber inspirasi penting untuk tindakan mereka sendiri, yang didasarkan pada penentuan nasib sendiri dan juga pengendalian diri.

Aspek kedua yang menjadi faktor pembentuk kepemimpinan pendidikan Tamansiswa sebagai medan pergerakan nasional Indonesia, yaitu perkembangan ilmu pendidikan tahun 1900-an. Saat itu pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang untuk membentuk dunia modern berada pada reaksi-reaksi menggugat idealisme (Fichte, Schelling, dan Hegel). Masa itu pemikiran ilmu dihadapkan dengan tiga reaksi yang mewarnai untuk menghadang idealisme. Reaksi pertama yang masih berada dalam jalur idealisme, reaksi kedua yaitu usaha mentransformasikan idealisme menjadi materialisme, ini berasal dari kaum Hegelian Sayap Kiri, yaitu Feuerbach dan Mark. Reaksi yang terakhir yaitu sebuah usaha berani untuk menumbangkan sistem abstrak Hegel, dan reaksi ini berasal dari seorang filsuf Denmark, Kierkegaard. Kajian mengenai ilmu pendidikan saat itu sedang mekar-mekarnya pandangan progresivisme ke arah pragmatisme, yang percaya bahwa tujuan jangka panjang pendidikan yaitu untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar anak didik sebagaimana caranya menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya sendiri secara efektif. Tumbuh juga pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yang berpendapat bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuan mereka sendiri dan kenyataan itu ditentukan oleh pengalaman pembelajar. Berkembang secara bersamaan pada masa itu sistem pendidikan Dalton.

Aspek ketiga yang menjadi faktor pembentuk kepemimpinan pendidikan Tamansiswa sebagai medan pergerakan nasional Indonesia, yaitu peran Tamansiswa dalam medan pergerakan nasional Indonesia. Peran Tamansiswa melalui jalur-jalur pemikiran yang tertanam pada alam pikir orang-orang Indonesia yang mengenyam pendidikan. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai pendidikan: karakter, nilai-nilai, budi pekerti, pendidikan keluarga, konsep belajar, dan merdeka belajar. Peran Tamnsiswa dalam

pergerakan nasional, juga dapat dilihat dari salah satu pendirnya, yaitu Ki Ageng Suryomentaram. Tamansiswa memperkenalkan pendidikan yang berdasarkan atas kemanusiaan dan nasionalisme yang menggunakan sistem among, pendidikannya berusaha memanusiakan manusia untuk melahirkan cendekiawan yang lahir dan batin.

Situasi Global Tahun 1900-an & Berdirinya Tamansiswa

Berdirinya Tamansiswa merupakan desakan keras untuk pemenuhan pendidikan rakyat, di mana pemerintah Belanda terbukti tidak mampu mengatasinya. Dewantara (1967) mencatat pada saat itu banyak anak-anak, yang meminta untuk berpartisipasi di sekolah-sekolah, harus kecewa karena tidak tertampung. Pranoto (2018) menyatakan periode pertama keberadaan Tamansiswa, motivasi untuk lembaga pendidikan sendiri dapat dipahami sebagai anti-kolonial. Tahun-tahun berikutnya, dan dengan semakin banyak keterlibatan dalam gerakan nasionalis, gagasan tentang sistem pendidikan nasional, tidak hanya melawan negara kolonial, mulai terbentuk.

Selama ini kajian tentang berdirinya Tamansiswa dominan sebagai respon terhadap situasi politik internal Hindia Belanda (Indonesia-ketika itu), Purwoko (2016) menyatakan kontrol politik pemerintah sangat keras terhadap kaum pergerakan nasional yang nonkooperasi, sehingga dirasa perlu oleh kaum pergerakan untuk mencurahkan kegiatannya dan salah satunya adalah dalam jalur pendidikan. Depresi Hebat sedunia tahun 1929 dan awal 1930-an juga memiliki efek melumpuhkan pada ekonomi Belanda ikut mendorong berbagai daerah jajahan untuk melawan balik, Suwignyo (2013) menyebutkan latar belakangnya karena adanya Depresi Hebat dan perubahan lintasan kebijakan pendidikan publik di Indonesia oleh kolonial dalam menanggapi krisis. Krisis tersebut memaksa pemerintah kolonial menekan anggaran belanja pendidikan. Sementara itu tuntutan pendidikan sudah semakin meningkat, sehingga bermunculanlah sekolah-sekolah swasta termasuk Tamansiswa. McVey (1967) menyatakan latar belakang berdirinya Tamansiswa menandainya sebagai sisi abangan dari pembelahan budaya Jawa; dapat dianggap sebagai mitra abangan

dari sistem sekolah Muhammadiyah, keduanya diprakarsai oleh para pemimpin organisasi pelopor gerakan nasional, Budi Utomo; dan standar pihak berwenang Belanda tertarik untuk menyalurkan energi Islam ke dalam kegiatan nonpolitik.

Terdapat dua kekuatan besar ideologi di Indonesia pada tahun 1920-an sampai 1950-an, yaitu nasionalisme sekuler dan islamisme. Kaum nasionalisme sekuler, sering disebut sebagai abangan, berpendapat kemerdekaan Indonesia dapat diraih berdasar semangat nasionalisme yang netral agama, kaum islamis percaya bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih berlandaskan agama islam. Dewantara (1967) menyebutkan berapa aspek pendidikan nasional dan lembaga Tamansiswa, yaitu prinsip penerimaan terhadap perubahan yang sedang berlangsung, faktor – faktor asing ikut campur dalam proses perbaikan masyarakat, sangat menghambat penyesuaian yang normal.

Di Asia, pergulatan kekuatan ideologi juga terjadi di Cina, yang tumbuh jadi kekuatan yang membesar, Smith (2017) menyatakan frustrasi dengan "imperialisme kulit putih" dari Liga Bangsa-Bangsa dan "imperialisme merah" dari Komunis Internasional Ketiga, sejumlah intelektual Cina mulai membahas kemungkinan untuk opsi ketiga selama tahun-tahun antar perang. Knight (2018) menyatakan Revolusi Nasional Tiongkok ditandai oleh pandangan internasional. Keterlibatan Cina dengan Leninisme, menghasilkan bentuk nasionalisme internasionalis yang menekankan kedaulatan dan keterlibatan global.Berpaling dari liberalisme dan Marxisme, mereka memeriksa Tiga Prinsip Rakyat Yat-sen dan mulai bekerja untuk mempromosikan Prinsip Nasionalisme sebagai konsep yang berfokus pada ruoxiao (negara lemah dan kecil) dan dapat membebaskan orang di seluruh dunia yang menderita di bawah imperialisme. Tapi sayangnya ambisi Cina tersebut dilumpuhkan oleh imperialisme Jepang, ketika Kekaisaran Jepang menggunakan wacana serupa pan-Asianisme untuk membenarkan militerisme pada 1930-an dan 1940-an.

Saat itu di Cina dipenuhi nuansa nasionalisme kulturalis. Xu (2021) menyatakan nasionalisme kulturalis diartikan sebagai nasionalisme yang bertumpu pada homogenisasi politik bangsa dan budaya bangsa. Penduduk yang membentuk peradaban harus berbagi asal-usul budaya yang sama dan reformasi politik

yang diilhami oleh Barat harus beresonansi dengan tradisi budaya bangsa. Mengapa jenis nasionalisme ini berlaku pada akhir tahun 1890-an dan 1900-an di Tiongkok? Alasan yang paling jelas adalah pengaruh intelektual dan politik Jepang di Tiongkok. Tetapi keinginan intelektual Tiongkok untuk menyesuaikan dengan sistem politik modern Barat tidak dapat terlalu ditekankan.

Suasana tumbuhnya nasionalialisme juga tampak di Korea. Tikhonov (2018) menyatakan ketika diperkenalkan ke Korea sekitar tahun 1900, gagasan modern tentang bangsa (*minjok*) berkembang menjadi salah satu konsep intelektual dan politik paling penting yang beredar di negara itu pada awal tahun 1920-an. Dari sudut pandang kaum nasionalis, bangsa, dilihat sebagai entitas yang tidak berubah dan homogen, adalah situs utama untuk kepemilikan individu.

Di Indonesia, muncul berbagai pergerakan, yang tidak sekedar kedaerahan tetapi bersifat nasional kebangsaan. Tamansiswa secara harfiah berarti "Taman untuk Murid", tidak seorang pun berharap bahwa taman murid ini akan menjadi tanah yang keras bagi pemerintah kolonial Belanda pada 1930-an. Tsuchiya (1975) menyatakan iklim politik di Indonesia sekitar tahun 1922 menunjukkan pemberontakan nasionalisme yang luar biasa yang berpusat di sekitar gerakan serikat buruh yang dipandu oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Sarekat Islam (SI). Sujati & Haq (2020) menyatakan tahun 1920-an pula, pergerakan perempuan di Indonesia lebih mengarah kepada usaha-usaha untuk memajukan perempuan di bidang pendidikan, sosial, dan politik; sebagai usaha untuk melawan penjajahan bangsa Belanda dengan kesadaran nasional untuk bersatu serta meraih kemerdekaan yang hakiki.

Memang terdapat berapa kajian menyatakan situasi global-lah yang mendorong berdirinya Tamansiswa, Verma (2005) 283) menyatakan terdapat pengaruh Rabindranath Tagore terhadap gerakan pendidikan nasional Indonesia tahun 1920 - 1930-an dan Tamansiswa. Guha (2013) menyatakan Rabindranath Tagore dalam pola pengajaran di kelas, pemikiran filsuf sangat relevan bagi pelajar yang bingung, tertekan, dan terbebani. Peran kebebasan dalam pendidikan dalam suasana tanpa rasa takut sangat penting. Kondisi lingkungan yang berubah membutuhkan sistem pendidikan yang

inovatif; metodologi baru, yang tidak hanya memenuhi karir dasar anak, pelatihan formal berbasis tetapi yang mendorong hobi, kreativitas dan seni, memperkaya kelangsungan hidup. Pridmore (2009) menyatakan Rabindranath Tagore (1861–1941), peraih Nobel pertama di Asia, adalah orang yang memiliki banyak sekali sumbangannya dan mengartikulasikan satu visi global, bahwa untuk pertumbuhan manusia, harus berjuang menuju 'yang lain dan yang lebih jauh'. Dengan melakukan itu manusia menemukan bahwa, ketika manusia mencari, manusia sendiri sedang dicari.

Terdapat kesamaan pergerakan yang dilakukan Tamansiswa dan Rabindranath Tagore, Supardi et al., (2018) menyatakan keduanya menentang sistem pendidikan kolonial yang bersifat intelektual dan hegemonik. Keduanya mengembangkan pendidikan, yang memiliki konsep bahwa pendidikan adalah upaya kekuatan, bimbingan, untuk membimbing pertumbuhan anak. Tagore melihat pendidikan sebagai proses pembebasan untuk mendapatkan kebenaran tertinggi, yang membebaskan belenggu, memberikan banyak cahaya batin, bersama dengan cinta. Pendidikan tercermin dalam institusi pendidikan, yaitu pendidikan yang bersekutu dengan alam, kebebasan, ekspresi diri, dan internasionalisme dan universitas.

Shantiniketan dan kepemimpinan Kongres Nasional India dengan gerakan pendidikan baru global pada dekade pertama abad kedua puluh memberikan warna tersendiri pada gerakan Tamansiswa di Indonesia. Tschurenev (2017) menyatakan di berbagai belahan dunia, kritik terhadap teknologi pengajaran tradisional menyarankan lebih banyak pendekatan pedagogis pengalaman, kreatif, dan holistik, yang merangsang pertumbuhan individu, dan pemenuhan potensi manusia.

Jahn (2020) menyatakan tindakan dan gagasan politik Gandhi, yang berhasil dalam banyak hal, telah menginspirasi banyak hak sipil dan gerakan kemerdekaan nasional di seluruh dunia, khususnya di negara-negara demokrasi liberal dan di negara-negara dengan tingkat konstitusionalitas tertentu. Patgiri (2015) menyebutkan bahwa Mahatma Gandhi percaya bhwa pendidikan adalah menggambar semua yang terbaik dalam diri anak dan tubuh, pikiran, dan jiwa. Literasi bukanlah akhir dari pendidikan atau bahkan awal. Ini hanya salah satu cara di mana laki-laki dan

perempuan dapat dididik. Dia percaya bahwa tatanan sosial baru yang didasarkan pada kebenaran dan tanpa kekerasan dapat menghapus setiap jenis korupsi dan eksploitasi di masyarakat. Maka ia mengembangkan perencanaan pendidikannya.

Perkembangan Ilmu Pendidikan Tahun 1900-an

Ilmu pendidikan merupakan disiplin ilmu yang sudah ada sejak awal abad ke-20. Erdogan (2021) menyatakan disiplin itu muncul ketika pendidikan ditangani dengan perspektif ilmiah berdasarkan eksperimen, observasi, dan penelitian. Tuntutan pelatihan guru sebelumnya telah memengaruhi ilmu pendidikan. Seiring berjalannya waktu, ia dibentuk oleh keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, ilmu pendidikan telah bertransformasi dari dimensi mikro yang sebatas metode pengajaran menjadi dimensi makro yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Akhir abad ke-18 dan ke-19 merupakan periode aktivitas besar dalam merumuskan kembali prinsip-prinsip pendidikan, dan terdapat gejolak ide-ide baru, beberapa di antaranya pada waktunya melakukan transformasi di sekolah dan kelas. Pengaruh Jean-Jacques Rousseau sangat dalam dan tak ternilai. Teori pendidikan Rousseau menekankan pentingnya ekspresi untuk menghasilkan anak yang berpikiran bebas dan seimbang. Rousseau percaya bahwa jika anak-anak dibiarkan berkembang secara alami tanpa batasan yang dibebankan pada mereka oleh masyarakat, mereka akan berkembang menuju potensi mereka yang sepenuhnya, baik secara pendidikan maupun moral. Perkembangan alami ini harus berpusat pada anak dan difokuskan pada kebutuhan dan pengalaman anak pada setiap tahap perkembangan.

Salah satu pengikutnya yang paling terkenal adalah Pestalozzi, yang percaya bahwa sifat anak-anak, daripada struktur seni dan sains, harus menjadi titik awal pendidikan. Pestalozzi percaya pada kemampuan setiap individu manusia untuk belajar dan hak setiap individu atas pendidikan. Dia percaya bahwa itu adalah tugas masyarakat untuk mempraktikkan hak ini. Keyakinannya menyebabkan pendidikan menjadi demokratis; di Eropa,

pendidikan tersedia untuk semua orang. Pestalozzi sangat prihatin dengan kondisi orang miskin. Beberapa dari mereka tidak bersekolah. Jika ya, pendidikan sekolah seringkali tidak berguna untuk kebutuhan mereka. Dia ingin memberi mereka pendidikan yang membuat mereka mandiri dan mampu meningkatkan kehidupan mereka sendiri.

Ide Rousseauist terlihat juga dalam karya Friedrich Froebel, yang menekankan aktivitas diri sebagai fitur sentral dari pendidikan masa kanak-kanak, dan dalam pemikiran Johann Friedrich Herbart, mungkin pemikir abad ke-19 yang paling berpengaruh dalam pengembangan pedagogi sebagai ilmu. Froebel percaya bahwa "bermain adalah ekspresi tertinggi dari perkembangan manusia di masa kanak-kanak karena itu sendiri adalah ekspresi bebas dari apa yang ada dalam jiwa anak." Menurut Froebel, dalam bermain anak-anak membangun pemahamannya tentang dunia melalui pengalaman langsung dengannya. Ide-idenya tentang belajar melalui alam dan pentingnya bermain telah menyebar ke seluruh dunia.

Saat tahun 1900-an pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang untuk membentuk dunia modern berada pada reaksi-reaksi menggugat idealisme (Fichte, Schelling, dan Hegel). Masa itu pemikiran ilmu dihadapkan, oleh Sedgwick (2007) dikatakan memiliki tiga reaksi yang mewarnai untuk menghadang idealisme. Reaksi pertama yang masih berada dalam jalur idealisme, cenderung kembali ke dalam filsafat Kant tentang "*das Ding an sich*", lalu masuk dalam idealisme dengan cara lain, ini berasal dari Schopenhauer. Reaksi kedua yaitu usaha mentransformasikan idealisme menjadi materialisme, ini berasal dari kaum Hegelian Sayap Kiri, yaitu Feuerbach dan Mark. Reaksi yang terakhir yaitu sebuah usaha berani untuk menumbangkan sistem abstrak Hegel, dan reaksi ini berasal dari seorang filsuf Denmark, Kierkegaard.

Kajian mengenai ilmu pendidikan saat itu sedang mekar-mekarnya pandangan progresivisme ke arah pragmatisme, yang percaya bahwa tujuan jangka panjang pendidikan yaitu untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar anak didik sebagaimana caranya menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya sendiri secara efektif. Pandangan progresivisme dan pragmatisme sering diidentifikasikan sebagai

aliran liberalisme pendidikan. Di berbagai negara, kehadiran di sekolah menengah meningkat drastis antara tahun 1890 dan 1900, dengan pendaftaran lebih dari dua kali lipat selama dekade ini.

Sebelum pertengahan 1800-an, pendidikan sains dan sains ada di Amerika Serikat dengan cara yang tidak terstruktur. Namun, ketertarikan publik pada sains meningkat pada akhir abad ke-19 (Bybee, 2010), sebagian karena kemajuan sains dan kemajuan teknologi yang terkait dengan revolusi industri.

Berkembang secara bersamaan pada masa itu sistem pendidikan Dalton, Ploeg (2013) menyatakan pendidikan Dalton adalah gerakan reformasi pendidikan terbesar di Belanda pada tahun 1920-an. Pendidikan Dalton ditemukan di AS, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Uni Soviet, India, Cina, dan Jepang. Pendirinya Helen Parkhurst (1886–1973), pendidik progresif, sebuah sekolah mandiri yang berpusat pada anak yang berlokasi di New York City. Abad ke-19 dikatakan Nagata (2007) Belanda secara tradisional menumbuhkan semangat humanisme sipil yang paling mengakar dari semua negara Eropa. Feodalisme tidak berlaku di negara ini, yang mula-mula mengembangkan federasi negara-kota, dan para pedagang dan petani mandiri mengambil bagian aktif dalam mencapai kemakmuran bahkan sebelum perang kemerdekaannya.

Kondisi di dalam negeri Belanda saat itu, sosialisme mulai berkembang. Liga Sosial Demokratik yang didirikan pada abad ke-19, tahun 1901 Partai Buruh Sosial Demokrat meningkatkan perwakilannya dari dua menjadi enam kursi di majelis rendah parlemen, menjadi kegelisahan besar dari elit yang mengaku dan liberal.. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di Indonesia. Era antara tahun 1900 dan berakhirnya Perang Dunia II dapat dianggap sebagai masa manajemen ilmiah dalam sistem sekolah Amerika.

Tampaknya situasi global menjadikan corak sistem pendidikan dan kurikulum sekolah di berbagai negara dan kawasan menjadikannya sangat mirip. Benavot et al., (1991) menyatakan pengetahuan budaya dipilih oleh otoritas pendidikan, diorganisasi ke dalam kurikulum sekolah nasional, dan ditransmisikan ke anak-anak dalam sistem sekolah massal. Terlepas dari variasi nasional

dalam struktur politik, ekonomi, atau sosial, kurikulum sekolah dasar sangat mirip di seluruh dunia. Bahwa kurikulum pendidikan massal terkait erat dengan perluasan sistem negara-bangsa dan meningkatnya dominasi model pendidikan massal standar. Negara-bangsa dan pendidikan massal - yang dipromosikan oleh para intelektual dan pembuat bangsa untuk mencapai kemajuan nasional dan kesetaraan sosial - telah menghasilkan sistem pendidikan nasional dan kurikulum sekolah yang sangat mirip. Pendidikan yang dikembangkan oleh Perguruan Tamansiswa juga tidak terlepas dari corak sistem pendidikan dan kurikulum yang mirip.

Peran Tamansiswa dalam Medan Pergerakan Nasional Indonesia

Kepemimpinan merupakan fitrah manusia, karena setiap manusia pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kepemimpinan berkaitan dengan urusan setiap individu. Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya kepada atasan yang mengangkatnya. Pemimpin yang lebih rendah posisinya bertanggung jawab kepada pemimpin yang lebih tinggi posisinya, termasuk kepemimpinan pendidikan. Gonzales (2019) menyatakan terdapat 5 filosofi kepemimpinan pendidikan yaitu esensialisme, perenialisme, progresivisme, behaviorisme, atau eksistensialisme (*The Five Key Education*). Barbuto & Davoudpour (2019) mengkonfirmasi perbedaan generasi dalam gaya kepemimpinan. Bracht et al., (2018) menyatakan hingga saat ini, konsep kepemimpinan difokuskan pada pencapaian tujuan tingkat individu atau tim, dan dengan demikian tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks sosial-organisasi yang lebih luas. Ncube (2010) menyatakan kepemimpinan adalah tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk transformasi.

Mulai tumbuh pergerakan rakyat dalam bidang pendidikan, selain Tamansiswa, salah satunya Perguruan Rakyat. Kurniawan (2017) menyatakan Perguruan Rakyat merupakan sekolah dalam konsep kebangsaan. Perguruan Rakyat didirikan atas dasar aplikasi dari Sumpah Pemuda dan dampak dari kebijakan politik etis. Munculnya nasionalisme merupakan sebagai acuan untuk

memberikan pengertian ini kepada rakyat. Pendidikan adalah cara yang tepat untuk memberikan wawasan nasionalisme dan kebangsaan kepada rakyat. Tokoh-tokoh pendiri berasal dari beberapa alumni Perhimpunan Indonesia.

Peran Tamansiswa melalui jalur-jalur pemikiran yang tertanam pada alam pikir orang-orang Indonesia yang mengenyam pendidikan. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai pendidikan: karakter (Wardani, 2010), nilai-nilai (Susilo, 2018), budi pekerti (Muthoifin & Jinan, 2015), pendidikan keluarga (Yohana, 2017), konsep belajar (Mujito, 2014), dan merdeka belajar (Ainia, 2020). Peran Tamnsiswa dalam pergerakan nasional, juga dapat dilihat dari salah satu pendirnya, yaitu Ki Ageng Suryomentaram. Menurut Kamal & Wahyuningrum (2017) Ki Ageng Suryomentaram terlibat dalam pendirian Taman Siswa melalui paguyuban Selasa Kliwon dan menjadi guru orang tua, pemikirannya mengenai pendidikan Taman Siswa dituangkan dalam naskah Unipersitit dan ceramah Kawruh Pamomong.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara, berdampak sangat besar bagi Indonesia. Natalia (2021) menyatakan prinsip-prinsip pendidikan yang ia ciptakan dan terapkan di perguruan Tamansiswa adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, siswa mandiri, pendidikan yang mencerahkan masyarakat, pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, perjuangan kemerdekaan, sistem bela diri, dan pendidikan anak. Hak menentukan nasib sendiri memperhatikan tuntutan kebersamaan dari masyarakat yang rukun, tidak bergantung pada orang lain atau kelompok lain.

Tamansiswa memperkenalkan pendidikan yang berdasarkan atas kemanusiaan dan nasionalisme yang menggunakan sistem among, pendidikannya berusaha memanusiakan manusia untuk melahirkan cendekiawan yang lahir dan batin. Dasar pendidikan itu yang menjadi daya dorong kuat pada banyak generasi muda, yang menikmati pendidikan pada saat itu dan momentum pergerakan nasional tersebut terjadi pada tahun 1945. Bahwa kurikulum sekolah, yang kita kenal sekarang, di sebagian besar negara didominasi oleh kepentingan negara korporat yang mengatur dunia. Alternatif pendidikan telah muncul di banyak negara yang mewakili masyarakat yang kehilangan haknya. Aletheiani (2021) menyatakan di Indonesia, karya Ki Hadjar Dewantara memberikan

ilustrasi pedih tentang pendidik yang mengembangkan tulisan dan praktik yang menawarkan alternatif kepada negara korporat atau pendahulu imperialis dan kolonial kepada mereka.

Ki Hadjar Dewantara sangat menggugah dan mengharapkan adanya kemerdekaan Indonesia. Kusuma (2021) menyatakan perjuangan Ki Hadjar Dewantara pada pendidikan, karena dengan mendidik anak bangsa maka terbentuk generasi yang mempunyai kekuatan. Dengan berdirinya Tamansiswa memberikan fondasi dan jalan pendidikan bangsa. Nilai filosofis yang tertanam pada Tamansiswa memberikan semangat juang hak kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk kebebasan mengelola negara, tetapi kemerdekaan juga adalah hak siswa untuk menentukan jalan hidupnya.

Akhirnya, terdapat tiga aspek yang menjadi faktor yang membentuk kepemimpinan pendidikan Tamansiswa sebagai medan pergerakan nasional Indonesia, yaitu situasi global tahun 1900-an, perkembangan ilmu pendidikan tahun 1900-an, dan peran Tamansiswa dalam medan pergerakan nasional Indonesia. Situasi global tahun 1900-an dan merembes masuk ke Indonesia dalam dua kekuatan besar ideologi yaitu nasionalisme sekuler dan islamisme. Aspek kedua yang menjadi faktor pembentuk kepemimpinan pendidikan Tamansiswa sebagai medan pergerakan nasional Indonesia, yaitu perkembangan ilmu pendidikan tahun 1900-an. Saat itu pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang untuk membentuk dunia modern berada pada reaksi-reaksi menggugat idealisme (Fichte, Schelling, dan Hegel). Aspek ketiga yang menjadi faktor pembentuk kepemimpinan pendidikan Tamansiswa sebagai medan pergerakan nasional Indonesia, yaitu peran Tamansiswa dalam medan pergerakan nasional Indonesia. Peran Tamansiswa melalui jalur-jalur pemikiran yang tertanam pada alam pikir orang-orang Indonesia yang mengenyam pendidikan. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai pendidikan: karakter, nilai-nilai, budi pekerti, pendidikan keluarga, konsep belajar, dan merdeka belajar.

Perkembangan dan perubahan masyarakat dipandu oleh pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran Tamansiswa melalui jalur-jalur pemikiran dalam pendidikan dapat ditepkan sebagai pandunya, seperti pendidikan karakter,

pendidikan nilai-nilai, budi pekerti, pendidikan keluarga, konsep belajar, dan merdeka belajar. Selain itu, menarapkan pendidikan yang berdasarkan atas kemanusiaan dan nasionalisme yang menggunakan sistem among, pendidikannya berusaha memanusiakan manusia untuk melahirkan cendekiawan yang lahir dan batin.

DAFTAR RUJUKAN

Altman, S. A., & Bastian, C. R. (2022, April). The State of Globalization in 2022. *Harvard Business Review Home*. https://hbr-org.translate.goog/2022/04/the-state-of-globalization-in-2022?

Astomo, P. (2021). Legal Politics of Responsive National Education System in the Globalization Era and the Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, *36*, 401. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.25897

Baglioni, E., Campling, L., Coe, N. M., & Smith, A. (2022). *Labour regimes and global production*. Agenda Publishing.

DHL Global Connectedness Index. (2021). *DHL Global Connectedness Index*. DHL. https://www.dhl.com/global-en/delivered/globalization/global-connectedness-index.html

Hou, Y.-W., & Cheng, K. S. Y. (2022). Opportunities and Challenges Under Globalization on the Higher Education Reforms in Taiwan from 2000 to the Present. In J. Zajda & W. J. Jacob (Eds.), *Discourses of Globalisation and Higher Education Reforms: Emerging Paradigms* (pp. 179–195). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83136-3_12

Ipsos. (2022). *What Worries the World—February 2022*. Ipsos. https://www.ipsos.com/en/what-worries-world-february-2022

Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E., & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact of Covid-19 school closures on academic achievement. *Educational Researcher*, *49*(8), 549–565.

Lombard, M. D. (2022). *Reclaiming Migrant Motherhood Identity, Belonging, and Displacement in a Global Context*. Lexington Books.

Micklethwait, J., & Wooldridge, A. (2022). The hidden promise: Liberty renewed. In F. J. Lechner & J. Boli (Eds.), *The globalization reader*. Wiley.

Olsen, B. (2022). Global education trends and research to follow in 2022. *Brookings*. https://www.brookings.edu/experts/brad-olsen/

Schleicher, A. (2020). *The impact of COVID-19 on education—Insights from Education at a Glance 2020*. OECD.

Adolf, Huala. (2003). The WTO agreement on movement of natural persons: historical analysis and evaluation. *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad*, 2(1), 83-104.

Mas'udi, Wawan., Karim, Abdul Gaffar., & Tapiheru, Joash. (2021). *Tentang kuasa lingkup kajian, metodologi, dan pengajaran ilmu politik & pemerintahan*. Editor: Mas'udi, Wawan & Karim, Abdul Gaffar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Adserias, Ryan P., Charleston, LaVar J., & Jackson, Jerlando F. L. (2017). What style of leadership is best suited to direct organizational change to fuel institutional diversity in higher education? *Race Ethnicity and Education*, 20(3), 315-331.

Aerni, Philipp. (2018). *Global business in local culture the impact of embedded multinational Enterprises*. Switzerland: Springer Nature.

Affeldt, Fiona., Tolppanen, Sakari., Aksela, Maija., & Eilks, Ingo. (2017). The potential of the non-formal educational sector for supporting chemistry learning and sustainability education for all students – a joint perspective from two cases in Finland and Germany. *Chemistry Education Research and Practice*, 18(1): 13-25.

Afip, Liyana Ahmad., Hamid, M. Obaidul., & Renshaw, Peter. (2019). Common European framework of reference for languages (CEFR): Insights into global policy borrowing in Malaysian higher education. *Globalisation, Societies and Education*, 17(3), 378-393.

Ahammad, S. (2016). Free movement of natural persons: North-South conflicts of economic interests. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 2(2), 135-141.

Ainia, D. K. (2020). Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembanagan pendidikan

karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *3*(3), 95–101. https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525.

Al-Youbi, Abdulrahman., Zahed, Adnan H. M., & Tierney, William G. (2020). *Successful global collaborations in higher education institutions*. Switzerland: Springer Nature.

Akcam, B.K., Guney, S., & Cresswell, A.M. (2019). Research design and major issues in developing dynamic theories by secondary analysis of qualitative data. *Systems*, 7(3), 40-65.

Akhtar, Uzma., & Hussain, Bashir. (2019).An analysis of existence of localization for the implementation of triplization in higher education Pakistan at policy and practice level. *Review of Economics and Development Studies*, 5(1), 49-57.

Akopova, E., & Przhedetskaya, N. (2015). Institutional designing of continuous education in Russia under the conditions of neo-economy and globalization. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 15(2), 115-122.

Al-Daami, Kadhum Khan., & Wallace, Gwen. (2007). Curriculum reform in a global context: a study of teachers in Jordan. *Journal of Curriculum Studies*, 39(3): 339-360.

Aletheiani, D. (2021). *Public-oriented alternatives to dominating control of schooling exemplified by Raden Adjeng Kartini and Ki Hadjar's taman siswa schools in Indonesia*. Oxford Research Encyclopedia of Education.

Al-Imarah, Ahmed A., & Shields, Robin. (2019). MOOCs, disruptive innovation and the future of higher education: A conceptual analysis. *Innovations in Education and Teaching International*, 56(3), 258-269.

Allen, I. E., & Seaman, J. (2010). *Learning on demand: Online education in the United States*, 2009. In Sloan Consortium (NJ1). Sloan Consortium. https://eric.ed.gov/?id=ED529931.

Alli, A. M., Winter, G. S., & May, D. L. (2007). Globalization: Its effects. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 6(1), 89-96.

Alsharairi, Malek., Atmeh, Muhannad., & Al-Abdullah, Riyadh. (2019). Glocalization: a balanced approach for a smoother

international accounting harmonization in the developing countries. *The Journal of Developing Areas*, 53(4), 207-215.

Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–305. https://doi.org/10.1177/1028315307303542.

Amaral, Alberto., Tavares, Orlanda.,Cardoso, Sónia., & Sin, Cristina. (2016). Shifting institutional boundaries through cross-border higher education. *Journal of Studies in International Education*, 20(1), 48–60.

Amirbek, Aidarbek., & Ydyrys, Kanat. (2014). Education and soft power: Analysis as an instrument of foreign policy. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 143(1), 514-516.

Andriansyaha., Taufiqurokhman., & Wekkeb, Ismail Suardi. (2019). Responsiveness of public policy and its impact on education management: An empirical assessment from Indonesia. *Management Science Letters*, 9(1), 413–424.

Anna, Kosmützky., & Putty, Rahul. (2016).Transcending borders and traversing boundaries: a systematic review of the literature on transnational, offshore, cross border, and borderless higher education. *Journal of Studies in International Education*, 20(1), 8–33.

Arbolino, Roberta., Carlucci, Fabio., Cirà, Andrea., Simone, Luisa De., Ioppolo, Giuseppe., & Yigitcanlar, Tan. (2018). Factors affecting transport privatization: An empirical analysis of the EU. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 110 (1), 149-160.

Aristin, Nevy Farista. (2015). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap anak putus sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*. 20 (1): 30-36.

Ariu, A. (2016). Crisis-Proof services: Why trade in services did not suffer during the 2008-2009 collapse. *Journal of International Economics*, 98(1), 138-149.

Asean Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism. (2020). *Promoting services trade in Asean second phase (social*

services) trade in education services. Tokyo: Asean-Japan Centre.

Asher, N. (2017). Engaging identities and cultures in a globalized, postcolonial india: implications for decolonizing curriculum and pedagogy. *In: Pink W., Noblit G. (eds.) Second International Handbook of Urban Education*. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham.

Aslamiyah, Tsuwaybah Al., Setyosari, Punaji., & Praherdhiono, Henry. (2019). Blended learning dan kemandirian belajar mahasiswa teknologi pendidikan. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 2(2), 109-114.

Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: The description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. *Journal of Research in Nursing*, *23*(1), 42–55. https://doi.org/10.1177/1744987117741667

Axel Dreher, Jan-Egbert Sturm., & Ursprung, Heinrich W. (2008). The impact of globalization on the composition of government expenditures: Evidence from panel data. *Public Choice*, 134(1), 263–292.

Ayyagari, R., & Tyks, J. (2012). Disaster at a university: A Case study in information security. *Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice*, 11(1), 85–96.

Badan Pusat Statistik. (2016). *Hasil akreditasi menurut jenjang sekolah dan peringkat akreditasi 2015*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Garis kemiskinan provinsi 2018*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik pendidikan 2020*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Balkar, Betül., Öztuzcu, Rabia., & Akşab, Şahabettin (2019). Inferences on Turkish education policies in the light of international education policy studies following the compulsory education reform, *Educational Considerations*, 45(1), 90-104.

Barbuto, John E., & Davoudpour, Shahin (2019). *Servant leadership philosophy across intergenerational cohorts: an empirical inquiry*. USA: Academy of Management Proceedings.

Bassett, R. M. (2006). The WTO and the university: Globalization, GATS, and American higher education: Routledgefalmer.

Bawon, Syawitri Pertiwi., Palandeng, Engelien R., & Baftim, Firdja. (2020). Dampak perdagangan bebas pada era globalisasi di Indonesia dalam UU nomor 44 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas. *Lex Privatum*, 8(2), 154-163.

Bearman, M., Smith, C. D., Carbone, A., Slade, A., HughesWarrington, M., & Neumann, D. L. (2012). Systematic review methodology in higher education. *Higher Education Research & Development*, 31(1), 625-640. DOI:10.1080/07294360.2012.702735.

Beaumont, C., & Hartley, P. (2019). The cyber security knowledge exchange: working with employers to produce authentic PBL scenarios and enhance employability. In Z. Pan, A. D. Cheok, W. Müller, M. Zhang, A. El Rhalibi, & K. Kifayat (Eds.), *Transactions on edutainment XV* (pp. 209–228). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59351-6_14.

Bell, M.P., Leopold, J., Berry, D.,Hall, A.V. (2018). Diversity, discrimination, and persistent inequality: Hope for the future through the solidarity economy movement. *Journal of Social Issues*, 74(1), 224-243. DOI: 10.1111/josi.12266.

Ben Naseir, M. A., Dogan, H., Apeh, E., Richardson, C., & Ali, R. (2019). Contextualising the national cyber security capacity in an unstable environment: A spring land case study. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, & S. Costanzo (Eds.), *New Knowledge in Information Systems and Technologies* (pp. 373–382). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16181-1_35.

Benavot, A., Cha, Y., Kamens, D., Meyer, J., & Wong, S. (1991). Knowledge for the masses: world models and national curricula, 1920-1986. *American Sociological Review*, 56(1), 85-100.

Berg, B. L., & Lune, H. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences (Ninth edition)*. Pearson.

Bernal, Jose Luis. (2005). Parental choice, social class and market forces: the consequences of privatization of public services in education. *Journal of Education Policy*, 20(6), 779-792.

Bhatia, S. M., & Panneer, S. (2019). Globalization and its impact on business education in emerging economies: A case of India. *South Asian Journal of Human Resources Management*. https://doi.org/10.1177/2322093719838076.

Bidyuk, Natalya. (2016). Higher education globalization in the context of American guidelines. *Comparative Professional Pedagogy*, 6(4), 7-14.

Bieber, T. & Martens, K. (2011). The OECD PISA study as a soft power in education? Lessons from Switzerland and the US. *European Journal of Education*, 46(1), 101-116.

Birdie, Arvind, K. (2021). *Cross-cultural exposure and connections intercultural learning for global citizenship*. Canada: Apple Academic Press Inc.

Bishop, S. (2019). The internet of things: Implications for consumer privacy security. *2019 IEEE 12th International Conference on Global Security, Safety and Sustainability (ICGS3)*, 1–9. https://doi.org/10.1109/ICGS3.2019.8688024.

Blaak, Marit., Openjuru, George L., & Zeelen, Jacques. (2013). Non-formal vocational education in Uganda: Practical empowerment through a workable alternative. *International Journal of Educational Development*, 33(1): 88-97.

Bogdan, Robert., & Biklen, Sari Knopp. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods*. U.S.A: Pearson.

Bond, M., Zawacki-Richter, O. & Nichols, M. (2019). Revisiting five decades of educational technology research: A content and authorship analysis of the British Journal of Educational Technology. *The British Journal of Educational Technology*, 50(1), 12-63.

Borchert, I & A, Mattoo (2009). The crisis-resilience of services trade. *The Service Industries Journal,* 30(14): 1-20.

Borjas, George J. (2015). Immigration and Globalization: A Review Essay. *Journal of Economic Literature*, 53(4), 61-74.

Botlík, Josef. (2020). *Movement of autonomous systems after selected infrastructure as a globalization effect induced by initiate Industry 4.0*. SHS Web Conf. DOI: 10.1051/shsconf/20207402001.

Bracci, E. (2009). Autonomy, Responsibility and accountability in the Italian school system. *Critical Perspectives on Accounting*, 2(3), 293-312.

Bracht, E.M., Junker, N.M, van Dick, R. (2018). Exploring the social context of self-leadership—Self-leadership-culture. *Journal Theo Soc Psycho*l, 25(2), 119– 130.

Brooks, J., & Brooks, M. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms, ASCD. NDT Resource Center database.

Brooks, Jeffrey S., & Normore, Anthony H. (2010). Educational leadership and globalization: literacy for a glocal perspective. *Educational Policy*. 24(1), 52-82.

Bücker, J., Bouw, R., & De Beuckelaer, A. (2018). Dealing with cross-cultural issues in culturally diverse classrooms: The case of Dutch business schools. In Bista, K. (Ed.), *International student mobility and opportunities for growth in the global marketplace,* (pp. 117-133). IGI Global. DOI:10.4018/978-1-5225-3451-8.ch008.

Burd, S. D., Gaillard, G., Rooney, E., & Seazzu, A. F. (2011). Virtual computing laboratories using vmware lab manager. *2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences*, 1–9. https://doi.org/10.1109/HICSS.2011.482.

Burger, A., & Veldheer, V. (2001). The growth of the nonprofit sector in the Netherlands. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, *30*(2), 221–246.

Bybee, R. W. (2010). *The teaching of science: 21st century perspectives*. NSTA Press.

Caviedes, Alexander, (2016). European integration and the governance of migration. *Journal of Contemporary European Research*, 12(1), 552-565.

Cebolla-Boado, Héctor., Hu, Yang., & Soysal, Yasemin Nuhoğlu. (2018). Why study abroad? Sorting of Chinese students across

British universities. *British Journal of Sociology of Education,* 39(3), 365-380.

Chanda, R. (2001), Movement of natural persons and the GATS. *World Economy*, 24(1), 631-654. DOI:10.1111/1467-9701.00373.

Chen, Pi-Yun. (2015).Transnational education: Trend, modes of practices and development. *International Journal of Information and Education Technology*, 5(8), 634-637.

Chen, Z., Ul-Haq, J., Visas, H., & Cheema, A. R. (2019). Globalization and working environment nexus: Evidence from Pakistan. Sage Open. https://doi.org/10.1177/2158244019852474.

Chew, Adrian, W. (2019). Quasi-markets, competition, and school choice lotteries. *Educational Policy*, 33(4), 587–614.

Clothey, Rebecca., Mills, Michelle., & Baumgarten, Jacqueline. (2010). A closer look at the impact of globalization on science education. *Cultural Study of Science Education*, 5(1), 305–313.

Cone, Lucas Lundbye. (2018).Towards a university of Halbbildung: How the neoliberal mode of higher education governance in Europe is half-educating students for a misleading future. *Educational Philosophy and Theory*, 50(11), 1020-1030. DOI: 10.1080/00131857.2017.1341828.

Copple, C., & Bredekamp, S. (2009). *Developmentally appropriate practice in early childhood programs*. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

Crawford, Darryl. (2000). Chinese capitalism: Cultures, the Southeast Asian region and economic globalization. *Third World Quarterly*, 21(1): 69-86.

Crawford-Garrett, K., & Thomas, M. (2018). Teacher education and the global impact of teach for all. Oxford research encyclopedia of education. Retrieved 9 Jun. 2020, from https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-417.

Crittenden, Victoria., & Peterson, Robert A.. (2019). Digital disruption: The transdisciplinary future of marketing education. *Journal of Marketing Educ*ation, 41(1), 3 –4.

D'Arcy, J., & Lowry, P. B. (2019). Cognitive-affective drivers of employees' daily compliance with information security

policies: A multilevel, longitudinal study. *Information Systems Journal*, *29*(1), 43–69. https://doi.org/10.1111/isj.12173

Dalton, E., & Gronseth, S. (2019). *Best practices for teacher educators to address digital security issues in synchronous sessions and webinars*. 416–419. https://www.learntechlib.org/primary/p/207674/.

Dan, Xu. (2019). Analysis of the current situation of cross-border higher education in the background of internationalization. *Open Journal of Social Sciences*, 7(1), 132-137.

Danyathi, Ayu Putu Laksmi. (2016). Eksistensi perguruan tinggi asing di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Kertha Patrika*, 38(1), 167-180.

Darling-Hammond, L., X. Newton., & R. C. Wei. (2010). Evaluating teacher education outcomes: A study of the stanford teacher education programme. *Journal of Education for Teaching*, 36(4), 369–388.

Darwin, C. (2015). *Teori evolusi manusia*. Yogyakarta: Indoliterasi.

Darwin, C. (2015). *The Origin of species by means of natural selection*. Terjemahan (Ira Tri Onggo) Teori Evolusi Manusia. Yogyakarta: Indoliterasi.

Department of Economic and Social Affairs Statistics Division (2015). *Central Product Classification (CPC) Version 2.1. Statistical Papers Series M No. 77, Ver.2.1*. New York: United Nations.

Devkota, Jeevanath. (2016). Labor movement barrier under GATS mode 4. *Journal of Economics and Development Studies*, 4(1), 71-77.

Dewantara, Ki Hadjar (1962): *Karja Ki Hadja Dewantara. bagian pertama: pendidikan*. First Edition. Edited by Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. Yogyakarta.

Dewantara, Ki Hadjar. (1967). Some Aspects of National Education and the Taman Siswa Institute of Jogjakarta. *Indonesia*, *4*, 150–168. https://doi.org/10.2307/3350909

Dewantara, Ki Hadjar. (1935). Nationale opvoeding. ons recht, maar ook onze plicht." In Ki Hadjar Dewantara: Nationale Opvoeding: Majelis Luhur PersatuanTamansiswa, pp. 8–34.

Dewantara, Ki Hadjar. (1935): Pemuda pemuda kita. *In Poesara* 5(7), 149–152.

Dewantara, Ki Hadjar. (1967). Some Aspects of national education and the tamansiswa institute of Jogjakarta. Indonesia, (4), 150-168. doi:10.2307/3350909.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Collier Books.

Dewi, Ni Ayu Krisna., Zukhri, Anjuman., & Dunia, I Ketut. (2014). Analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di Kecamatan Gerokgak tahun 2012/2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. 4(1): 63-75.

Dikmenjur. (2003). *Keterampilan menjelang 2020: Program pengembangan SMK berstandar nasional dan internasional*. Jakarta: Dikmenjur.

Dodgson, J. E. (2017). Tentang penelitian: Metodologi kualitatif. *Journal of Human Lactation*, 33(2), 355–358.

Drake-Brockman, Jane. (2011).*The importance of measuring the delivery of services via commercial presence of offshore foreign affiliates: some case studies from Australian business experience*. Tokyo: Asian Development Bank.

Driscoll, M. (2000). Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn& Bacon

Ekman, Åsa Odin., & Engblom, Samuel. (2019). Expanding the movement of natural persons through free trade agreements? A review of CETA, TPP and ChAFTA. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 35(2), 163–200.

Elçi, A., & Seçkin, Z. (2019). Cyberbullying awareness for mitigating consequences in higher education. *Journal of Interpersonal Violence*, *34*(5), 946–960. https://doi.org/10.1177/0886260516646095

Elliott, S.N., Kratochwill, T.R., Littlefield Cook, J. & Travers, J. (2000). Educational psychology: Effective teaching, effective learning (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill College.

Emmons, K. (2019). The Effects of neoliberalism and globalization on Thailand's sex industry. *Undergraduate honors thesis*. University of Redlands.

Ena, Ouda Teda. (2013). Visual analysis of e-textbooks for senior high school in Indonesia. *Dissertation*. U.S.A: Loyola University Chicago.

Erdogan, Irfan. (2021). Educational science: From past to present. *Hayef: Journal of Education*, 18(1), 234-242.

Ernest, P. (1994). Varieties of constructivism: Their metaphors, epistemologies and pedagogical implications. *Hiroshima Journal of Mathematics Education*, 2(2), 282-295.

Evans, D., & Kowanko, I. (2000). Literature reviews: Evolution of a research meodology. *Australian Journal of Advanced Nursing*. 18(2), 33-38.

Farzanegan, Mohammad Reza., & Hassan, Mai. (2017).*The impact of economic globalization on the shadow economy in Egypt*. CESifo Working Paper Series No. 6424.

Flores, M. A. (2016). Teacher education curriculum. *In International Handbook of Teacher Education*, edited by J. Loughran & M. L. Hamilton, Dordrecht: Springer Press.

Fogg, Kevin W. (2015). The standardisation of the Indonesian language and its consequences for Islamic communities. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(1), 86–110.

Fox, R. (2001). Constructivism examined. Oxford review of education, 27(1), 23-35.

Fuchs, E. (2007). The creation of new international networks in education: The league of nations and educational organizations in the 1920s. *Paedagogica Historica*, *43*(2), 199–209. https://doi.org/10.1080/00309230701248305

Furlong, John. (2013) Globalisation, neoliberalism, and the reform of teacher education in England. *The Educational Forum*, 77(1), 28-50.

Furuta, J. (2019). *Liberal individualism and the globalization of education as a human right: the worldwide decline of early tracking*, 1960–2010. *Sociology of Education*. https://doi.org/10.1177/0038040719873848.

Gall, M.D., Gall, S.P., Borg, W.R. (2003). Educational research; an introduction. Boston: Pearson Education, Inc.

Galvan, J. (2006). *Writing literature reviews: A Guide for student of the behavioral sciences (Third Editions)*. Glendale CA: Pyrczak Publishing.

Garrett, Richard., Kinser, Kevin., Jason E. Lane., & Merola, Rachael. (2016). *International branch campuses: Trends and developments*. Redhill: Surrey.

Gerro, Tally Katz. (2017). Cross-national differences in the consumption of non-national culture in Europe. *Cultural Sociology*, 11(4), 438 –467.

Girdzijauskaite E., Radzeviciene A., Jakubavicius A., & Banaitis A. (2019). International branch campuses as an entry mode to the foreign education market. *Administrative Sciences*, 9(2), 44-54.

Goldberg, Pinelopi, Koujianou, & Pavcnik, Nina. (2007). Distributional effects of globalization in developing countries. *Journal of Economic Literature*, 45(1), 39-82.

Gollust, Sarah, E., & Jacobson, Peter, D. (2006). Privatization of public services: organizational reform efforts in public education and public health. *American Journal of Public Health*, 96(1), 1733-1739.

Gonzales, S. R. (2019). A Leg to Stand On: Developing core beliefs and a leadership philosophy for sound ethical decision-making. *New Directions for Community Colleges*, *2019*(185), 43–51. https://doi.org/10.1002/cc.20337.

Goodwin, A. Lin. (2010). Globalization and the preparation of quality teachers: rethinking knowledge domains for teaching. *Teaching Education*, 21(1), 19-32.

Govoni, P. (2013). The power of weak competitors: Women scholars, "Popular Science," and the building of a scientific community in Italy, 1860s-1930s. Science in Context, 26(3), 405-436. doi:10.1017/S0269889713000124.

Guha, Madhumita. (2013). Education in a Tagorean perspective. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 2 (12): 35-41.

Guo, Shan., Jiang, Li., Shen, Geoffrey, Q.P. (2019). Embodied pasture land use change in China 2000-2015: From the perspective of globalization. *Land Use Policy*, 82(1), 476-485.

Gupta, Tania. (2015).The genesis and growth of commercialization of higher education. *International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies*, 2(6), 4-15.

Hadiwitanto, Handi., & Sterkens, Carl. (2015). Empirical models of the relationship between religion and state in Indonesia: how religious beliefs define the relation between religion and state? *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(2), 129-152.

Hall, D. G. E. (1981). The Dutch 'new course' and nationalism in Indonesia, 1900–42. In D. G. E. Hall (Ed.), *A History of South-East Asia* (pp. 789–797). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16521-6_45

Halonen, Tarja., & Liukkunen, Ulla. (2021). *International labour organization and global social governance*. Switzerland: Springer Nature.

Hanus, Gabriela. (2018).*The impact of globalization on the food behaviour of consumers – literature and research review*. CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Czech Republik: Cbuni.Cz.

Hanushek, E A., Link, S., Woessmann, L. (2013). Does school autonomy make sense everywhere? Panel estimates from PISA. *Journal of Development Economics*, 104(9), 212-232.

Hapsari, Ritma Nugrahaningtyas., & Wahyudi, Agus Setianta. (2018). *Education for sustainable development: reorientation of national education in coping with challenges in globalization era*. Proceeding International Seminar on Education Innovation Issues and Challenges in Education for Education Sustainability. Indonesia: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Hardiman, F. B. (2015). *Pemikiran-pemikiran yang membentuk dunia modern (dari Machiavelli Sampai Nietzsche)*. Jakarta: Erlangga.

Harjatanaya, Tracey Yani., & Hoon, Chang-Yau. (2020). Politics of multicultural education in post-Suharto Indonesia: a study of

the Chinese minority. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 50(1), 18-35,

Harper, Jeffrey S. (2016). Extrinsic and intrinsic motivations and their impact on student participation in a study abroad experience. *A Dissertation In Hospitality Administration Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University*.

Hartmann, Eva. (2018). Transnational private authority in the sphere of education. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 25(1), 217-232.

Hastuti, Noer Fadlilah Wening Dwi., & Sutama (2019). *Politik dan sistem pendidikan nasional: pengaruh politik terhadap implementasi kurikulum di Indonesia*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hausmann, A., Toivonen, T., Slotow, R., Tenkanen, H., Moilanen, A., Heikinheimo, V., & Di Minin, E. (2018), Social media data can be used to understand tourists' preferences for nature☒based experiences in protected areas. *Conservation Letters*, 11(1), 23-43.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. SAGE.

Hentea, M., Dhillon, H. S., & Dhillon, M. (2006). Towards changes in information security education. *Journal of Information Technology Education: Research*, *5*(1), 221–233.

Hermawan, Ida Kintamani Dewi. (2015). Kinerja pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan misi pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(1): 87-100.

Ho Mok, K. (2008). Singapore's global education hub ambitions. *International Journal of Educational Management*, 22(6), 527-546.

Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah. (2005). Three approaches to qualitative content analysis qualitative health research. *Qualitative Health Research*, 15(9), 77-88. DOI: 10.1177/1049732305276687.

Hsu, Locknie. (2017). Legal barriers to supply chain connectivity in Asean. *Research Collection School of Law*, 34(1), 184-195.

Huang, Futao. (2007). Internationalization of higher education in the developing and emerging countries: a focus on transnational higher education in Asia. *Journal of Studies in International Education*, 11(1), 421-432.

Huda, M., & Teh, K. S. (2018). Empowering professional and ethical competence on reflective teaching practice in digital era. In Dikilitas, K., Mede, E., & Atay, D. (Ed.), *Mentorship strategies in teacher education* (pp. 136-152).

Hugo, G. (2013). *Governance and institutional issues in migration in Asia, in cross-border governance in asia: regional issues and mechanisms*. UN, New York, DOI: 10.18356/b269c3ab-en.

ICEF Monitor. (2017). *Southeast Asia trading and mobility bloc continues to take shape*. https://monitor.icef.com/2017/07/southeast-asia-trading-mobility-bloc-continues-take-shape/

Iqbal, S. (2016). Design and emergence of a pedagogical online infosec laboratory as an ensemble artefact. *Journal of Information Systems Education*, *27*(1), 17-29.

ISC Research. (2019). *25 years of isc research and the international schools market*. Oxfordshire, United Kingdom: ISC Research.

Jadoon, Atif Khan., Butt, Abdul Rauf., & Hayat, Muhammad Azmat. (2016). Development of measurement models for globalization, consumption patterns and culture a case study of three big cities of Punjab. Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, 54(2), 327-361.

Jæger, Kirsten., & Gram, Malene. (2015). (Self) confidence or compliance students' experience of academic quality in study-abroad contexts. *Learning and Teaching*, 8(3), 37–59.

Jahn, E. (2020). Is the policy of non-violence of Mohandas K. Gandhi a unique phenomenon, or is it of universal significance? In E. Jahn (Ed.), *war and compromise between nations and states: Political issues under debate – Vol. 4* (pp. 97–115). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34131-2_6

Jang, In Chull. (2017). Consuming global language and culture: South Korean youth in English study abroad. *A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of*

Philosophy Graduate Department of Curriculum, Teaching and Learning Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.

Jian Xu. (2009). China's education market and foreign suppliers of education services. *International Journal of Business and Management*. 4(4), 49-53.

Johnson, L. D., & Pak, Y. K. (2019). Teaching for diversity: Intercultural and intergroup education in the public schools, 1920s to 1970s. *Review of Research in Education*, 43(1), 1–31.

Joshi, Kishore M., & Ahir, Kinjal V. (2019). Higher education in India: Issues related to access, equity, efficiency, quality and internationalization. *Academia*, 14(1), 70-90.

Jules, T.D. (2016). Innovative orthodoxies and old bedfellows – re(drawing) the geometries of education governance. The global educational policy environment in the fourth industrial revolution. *Public Policy and Governance*, 26(1), 3-31.

Jurje, F., & Lavenex, S. (2018). Mobility norms in free trade agreements. *European Journal of East Asian Studies*, 17(1), 83-117.

Kadatska, Polina. (2016).The standardization of master-level education competencies among humanitarian and international development professionals. *Dissertation. U.S.A: The Graduate School at the University of Missouri-St. Louis*.

Kahn, Hilary E., & Agnew, Melanie. (2017). Global learning through difference: Considerations for teaching, learning, and the internationalization of higher education. *Journal of Studies in International Educatio*n, 21(1), 52–64.

Kamal, Faisal., & Wahyuningrum, Zulfa Indra. (2017). Aktualisasi ajaran Ki Ageng Suryomentaram sebagai basis pendidikan karakter. *Pancar*, 1(2), 9-20.

Kamal, Marium. (2019). Indian strategic influence in Afghanistan: Realist ends through social means. *South Asian Studies*, 34(2), 453-467.

Karunakara, Rao R., & Temesgen, Asfaw. (2014). Globalization and its impact on cooperatives – a case of Oromiya Regional State,

Ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 162-171.

Kearney, M., Burden, K., & Schuck, S. (2019). Disrupting education using smart mobile pedagogies. *In: Daniela L. (eds.) Didactics of smart pedagogy*. Springer, Cham

Kelch, Kristina. (2014). Becoming history. Tamansiswa and its influence on the Indonesian national education. *Master Thesis: Research Master Area Studies: Asia and the Middle East. Faculty of Humanities, Leiden University*.

Kertz-Welzel, Alexandra. (2015). Lessons from elsewhere? Comparative music education in times of globalization. *Philosophy of Music Education Review*, 23(1), 48-66.

Khalid, Jamshed, Ali, Anees Janee, Nordin, Nordiana Mohd, & Shah, Syed Fiasal Hyder. (2019). Regional cooperation in higher education: can it lead ASEAN toward harmonization? *Southeast Asian Studies*, 8(1), 81–98.

Khan, Amir Ullah. (2015).What globalization means for the education sector: how do we cater to emerging needs? *Emerging Economy Studies*, 1(1), 96–107.

Khan, N. (2017). Adaptive or transactional leadership in current higher education: a brief comparison. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(3), 178-183.

Khatun, Rehana. (2019).Rapidly changing globalized economy and its impact on education in the era of globalization. *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, 4(06), 1197-1200.

Khosiyono, Banun Havifah Cahyo. (2018). Kebijakan pendidikan bahasa asing di Indonesia dalam perspektif masyarakat global. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 6(1), 70-82.

Kim, Dae-Young. (2010).The impact of globalization and technological innovations on crime and punishment in the United States 1945-2007. *A Dissertation the Graduate College at the University of Nebraska*. Nebraska: The Graduate College at the University of Nebraska.

King, E., & Boyatt, R. (2015). Factors that influence adoption of e-learning. *British Journal of Educational Technology*, 46(6), 1272-1280.

Kinser, Kevin., & Jason E. Lane. (2012). Foreign outposts of colleges and universities. *International Higher Education,* 66(2), 72-84.

Kis-Katos, K., Pieters, J., & Sparrow, R. (2018). Globalization and social change: gender-specific effects of trade liberalization in Indonesia. *IMF Economic Review*, 66(4), 763–793.

Klees, Steven J. (2020). Beyond neoliberalism: Reflections on capitalism and education. *Policy Futures in Education*, 18(1), 9-29. https://doi.org/10.1177/1478210317715814.

Knight, David, S. (2019). Are school districts allocating resources equitably? The every student succeeds act, teacher experience gaps, and equitable resource allocation. *Educational Policy*, 33(4), 615–649.

Knight, J. M. (2018). Savior of the East: Chinese imaginations of Soviet Russia during the national revolution, 1925-1927. *Twentieth-Century China*, *43*(2), 120–138. https://doi.org/10.1353/tcc.2018.0015

Knight, Jane. (2005). Borderless, offshore, transnational and crossborder education: Definition and data dilemmas. Redhill: Observatory on Borderless Education, Available online: http://www.obhe.ac.uk/documents/view_details?id=35&gt (accessed on 30 May 2019).

Kompas. (2009). Wow, 275 SMK sudah kantongi ISO. https://otomotif.kompas.com/read/2009/06/23/09245438/Wow.275.SMK.Sudah.Kantongi.ISO-1.

Kotler, Philip. (2000).*Marketing management: edisi milenium, international edition*. New Jersey: Prentice Hall. International, Inc.

Kouwoaye, A.R. (2021). *GATT/WTO membership-poverty nexus: An unconditional quantile regression approach*. The World Economy.

Kristiansen, Stein., & Pratikno. (2006).Decentralising education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 26(5), 513-531.

Kurian, V. Mathew., & Manikandan, A.D. (2011). Impact of the India Sri Lanka free trade agreement on pepper trade in Kerala. *Rajagiri Journal of Social Development*, 2(2), 127-146.

Kurniawan, P. W. (2017). Sejarah berdirinya perguruan rakyat (Volksuniversiteit) 1928 di Jakarta. *Historia: Jurnal Pembelajaran Sejarah dan Sejarah UM Metro*, *5*(1), 15–30.

Kusuma, Anggun Badu. (2021). *Ki Hadjar Dewantara*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika pada tanggal 29 Agustus 2020 di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMP.

Laats, A. (2012). Red schoolhouse, burning cross: The Ku Klux Klan of the 1920s and educational reform. *History of Education Quarterly*, 52(1), 323-350.

Lahoud, H. A., & Tang, X. (2006). Information security labs in IDS/IPS for distance education. *SIGITE '06*. https://doi.org/10.1145/1168812.1168826

Landon, Adam C., Tarrant, Michael A., Rubin, Donald L., & Stoner, Lee. (2017).Beyond "just do it": fostering higher-order learning outcomes in short-term study abroad. *Aera Open*, 3(1), 1–7.

Lane J., Owens T., & Kinser K. (2015). *Cross border higher education, international trade, and economic competitiveness: A review of policy dynamics when education crosses borders*. Toronto, Geneva and Brighton: Ileap, Cuts International Geneva and Caris.

Lane, Jason E. (2011). Global expansion of international branch campuses: Managerial and leadership challenges. *New Directions for Higher Education,* 155(1), 5–17.

Latifah, Abidatul., Moh. Mustofa, Solehatul., & Fatimah, Nurul. (2016). Penerapan program kelas advance placement (AP) dalam menunjang visi internasional siswa di SMA semesta bilingual boarding school Semarang. *Solidarity*, 5(2), 94-104.

Lawal-Adebowale, O. A. (2017). Effect of mobile telecommunication technologies on globalization of Nigerian rural areas. *Journal of Rural Social Sciences*, 32(2), 20–36.

Lee, Molly N. N. (2007). Higher Education in Southeast Asia in the Era of Globalization. *In: Forest J.J.F., Altbach P.G. (eds.)*

International Handbook of Higher Education. Springer International Handbooks of Education, vol 18. Springer, Dordrecht.

Lee, Molly N. N. (2016). Contemporary education policies in Southeast Asia: common philosophical underpinnings and practices. *Asia Pacific Educ*, 17(1), 465–478.

Leemann, Regula Julia. (2018). Free movement of people and capital and the standard of transnational academic mobility: Principles of governance in the European Research Area. *European Educational Research Journal*, 17(6), 857-876. https://doi.org/10.1177/1474904118773946.

Leoncio, Vega Gil. (2013). Global politics and education systems: towards education markets? *New Approaches in Educational Research,* 2(2), 95–101.

Li, Jian. (2018). *Conceptualizing soft power conversion model of higher education*. In*: conceptualizing soft power of higher education. Perspectives on rethinking and reforming education*. Singapore: Springer.

Liu, Hui. (2017). Analysis on China's international standardization strategy based on the swot-pest analysis paradigm. *3rd International Conference on Social Science and Higher Education (ICSSHE-17). Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 99(0), 238-244.

Liu, Sida., Trubek, David M., & Wilkins, David B. (2016). Mapping the ecology of China's corporate legal sector: globalization and its impact on lawyers and society. *Asian Journal of Law and Society*, 3(1), 273–297.

Liu, Y. C., & Burn, J. M. (2007). Improving the performance of online learning teams—A discourse analysis. *Journal of Information Systems Education*, *18*(3), 369–379.

Lo, William Yat Wai. (2011). Soft power, university rankings and knowledge production: distinctions between hegemony and self-determination in higher education. *Comparative Education*, 47(2), 209-222.

Lobnibe, Jane-Frances Yirdong. (2020). Internationalization of higher education (HE) in an unequal terrain: UDS and

international partnerships. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 240-249. DOI: 10.20448/801.52.240.249.

Logli, Chiara. (2016). Higher education in Indonesia: Contemporary challenges in governance, access, and quality. *In: Collins C., Lee M., Hawkins J., Neubauer D. (eds) The palgrave handbook of Asia Pacific higher education*. Palgrave Macmillan, New York.

Lucya, Cici., & Anis, Ali. (2019). Pengaruh teknologi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 509 – 518.

Lumby, J., & Foskett, N. (2016). Internationalization and culture in higher education. *Educational Management Administration & Leadership*, 44(1), 95–111.

Lund, Susan., & Manyika, James. (2016). *How digital trade is transforming globalisation initiative*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum.

Lunn, J. (2008). Global Perspectives in higher education: taking the agenda forward in the United Kingdom. *Journal of Studies in International Education*, 12(3), 231–254.

Lytvynova, Svitlana., & Melnyk, Oksana. (2018). *Professional development of teachers using cloud services during non-formal education*. USA: Oxford University.

Ma, S., Zhang, S., Li, G., & Wu, Y. (2019). Exploring information security education on social media use: Perspective of uses and gratifications theory. Aslib Journal of Information Management, 71(5), 618–636. https://doi.org/10.1108/AJIM-09-2018-0213

MacPherson, Douglas W., Gushulak, Brian D., Baine, William B., Bala, Shukal., Gubbins, Paul O., Holtom, Paul., & Segarra-Newnham, Marisel. (2009). *Emerging Infectious Diseases*, 15(11), 1727–1731.

Makalela, Leketi. (2015). Moving out of linguistic boxes: the effects of translanguaging strategies for multilingual classrooms, *Language and Education*, 29(3), 200-217, DOI: 10.1080/09500782.2014.994524.

Mao, J., Ifenthaler, D., & Fujimoto, T. et al. (2019). National policies and educational technology: a synopsis of trends and

perspectives from five countries. *TechTrends*, 63(3), 284-293.

Marginson, Simon. (2018). Public/private in higher education: a synthesis of economic and political approaches. *Studies in Higher Education*, 43(2), 322-337.

Martin, Sonya N. (2010). Act locally, publish globally: international/ multi-disciplinary research efforts needed to understand the impact of globalization on science education. *Cultural Study of Science Education*, 5(1), 263–273.

Masruri, Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: ng,

Mataré, H.,F. (2010). Globalization, education, religion and terror. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 35(1), 521-526.

Mathew, Zachariah. (2016).Studying abroad: understanding the factors influencing the study abroad decision, country, and university choice of international students from India. *A Dissertation Presented to The College of Graduate and Professional Studies Department of Educational Leadership Indiana State University Terre Haute, Indiana*.

Mcburnie, Grant., & Ziguras, Christopher. (2001).The regulation of transnational higher education in Southeast Asia: Case studies of Hong Kong, Malaysia and Australia. *Higher Education*, 42(1), 85–105.

McVey, R. T. (1967). Taman Siswa and the Indonesian national awakening. *Indonesia*, *4*, 128–149. https://doi.org/10.2307/3350908.

Medcom.id. (2020). *Tiga puluh perguruan tinggi asing antre 'masuk' ke Indonesia*. Di akses pada 6 Mei 2021. https://m.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwjGAJN-30-perguruan-tinggi-asing-antre-masuk-ke-indonesia.

Menchaca, M. and Valencia, R.R. (1990), Anglo-Saxon ideologies in the 1920s-1930s: Their impact on the segregation of Mexican students in California. *Anthropology & Education Quarterly*, 21(1), 222-249. doi:10.1525/aeq.1990.21.3.04x0607i.

Menristekdikti. (2019). *Menristekdikti umumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia 2019, fokuskan hasil dari*

perguruan tinggi. https://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/#vokJMloYevVfmfM4.99.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.

Mikalauskiene, A., Štreimikiene, D., & Mulagalejeva, K. (2016). Assess the impact of globalisation processes by indices. *Economics and Sociology*, 9(4), 82-100.

Miles, A. (1984). Workers' Education: The communist party and the plebs league in the 1920s. *History Workshop*, *18*, 102–114.

Milles, M.B., & Huberman, AM. (1992). Analisis *data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Milner, Helen V., & Rudra, Nita. (2015). Globalization and the political benefits of the informal economy. *International Studies Review*, 17(4): 664–669.

Ming, Qian Zheng-Ming Deng. (2009). Culture distance, institution distance and spillover of natural persons movement policy. *Journal of International Trade,* 10(1), 89-112.

Miranti, R., Vidyattama, Y., Hansnata, E., Cassells, R., & Duncan, A. (2013). Trends in poverty and inequality in decentralising Indonesia you or your institution have access to this content. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*. No. 148. Paris: OECD Publishing.

Moak, Ken. (2017). *Developed nations and the economic impact of globalization*. Switzerland: This Palgrave Macmillan.

Mufid, Ahmad Irfan., & Suwidi. (2016). Mengungkap politik kekuasaan dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia melalui kajian historis. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1-14.

Mujito, W. E. (2014). Konsep belajar menurut Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan agama islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *11*(1), 65–78. https://doi.org/10.14421/jpai.2014.111-05

Mulyono, Amidi. (2018). Menyongsong asesmen AUN-QA. *Prisma*, 1(1), 531-538.

Musset, P., et al. (2019). Developing the foundations of the vocational education and training system in Estonia. *In vocational education and training in Estonia*. Paris: OECD Publishing.

Muthoifin, M., & Jinan, M. (2015). Pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara: Studi kritis pemikiran karakter dan budi pekerti dalam tinjauan islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *16*(2), 167-180–180.

Nagata, Y. (2007). Case Study: The Netherlands alternative education shaken by changes in its basic foundation. In Y. Nagata (Ed.), *Alternative education: Global perspectives relevant to the Asia-Pacific Region* (pp. 57–73). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4986-6_5

Nalle, Victor Imanuel Williamson. (2011). Mengembalikan tanggung jawab negara dalam pendidikan: kritik terhadap liberalisasi pendidikan dalam UU Sidiknas dan UU BHP. *Jurnal Konstitusi: Keadilan dan Demokrasi Substantif*, 8(4), 555-556.

Natalia, B. (2021). Philosophical basis on education principle of tamansiswa in the beginning of its establishment. *Academy of Education Journal*, 12(1), 15-21.

Ncube, L. B. (2010). Ubuntu: A transformative leadership philosophy. *Journal of Leadership Studies*, *4*(3), 77–82. https://doi.org/10.1002/jls.20182.

Newburry, W. & Yakova, N. (2006). Standardization preferences: a function of national culture, work interdependence and local embeddedness. *Journal of International Business Studies*, 37(1), 44–60.

Nguyen, Nhai., & Tran, Ly Thi .(2018). Looking inward or outward? Vietnam higher education at the superhighway of globalization: culture, values and changes. *Journal of Asian Public Policy*, 11(1), 28-45.

Nguyen, Shelbee., & Coryel, Joellen E. (2015). Flipping the script in study abroad participation: the influence of popular culture and social networks. *Journal of International Students*, 5(1), 23-37.

Nhamo, Godwell., & Mjimba, Vuyo. (2020). *Sustainable development goals and institutions of higher education*. Switzerland: Springer Nature.

Nhan, Thi Thuy., & Nguyen, Huu Cuong. (2018). Quality challenges in transnational higher education under profit-driven motives: The Vietnamese experience. *Issues in Educational Research*, 28(1), 138-152.

Nilson, Theresse. (2010). Good for living? On the relationship between globalization and life expectancy. *World Development*, 38(9), 1191–1203.

Niño-Zarazúa, Miguel. (2016). Aid, education policy, and development. *International Journal of Educational Development*, 48(1), 1-8.

Nulhaqim, Soni Akhmad., Heryadi, Dudy., Pancasilawan, Ramadhan., & Ferdryansyah, Muhammad. (2016). Peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share Social Work Journal*, 6(2), 197-219.

Nurmandi, Achmad., & Kim, Sunhyuk. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system a comparison of three Indonesian cities. *International Journal of Public Sector Management*, 28(3), 198-220.

Nye, J. (2005). *Soft power and higher education*. U.S.A: Harvard University.

Nye, Joseph. (2004).The decline of America's soft power: why Washington should worry. *Foreign Affairs*, 83(3), 16–20.

Nye, Joseph. (2011). *The Future of Power*. New York: Public Affairs.

O'neil, F. W. (2002). *Ideologi-ideologi pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Otten, M. (2003). Intercultural learning and diversity in higher education. *Journal of Studies in International Education*, 7(1), 12–26.

Paine, L., Aydarova, E. & Syahril, I. (2017). Globalization and teacher education. In Clandinin, D. J., & Husu, J. *The SAGE handbook*

of research on teacher education, 2(1), 1133-1148. London: SAGE Publications Ltd doi: 10.4135/9781529716627.

Palmer, John D., Roberts, Amy., Cho, Young Ha., & Ching, Gregory S. (2011*). The internationalization of East Asian higher education globalization's impact*. New York: Palgrave Macmillan.

Patgiri, Binoy Kumar. (2018). Educational philosophy of Mahatma Gandhi and its impact on present education system. *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, 3(9): 789-791

Paul, T. (2019). When balance of power meets globalization: China, India and the small states of South Asia. *Politics*, 39(1), 50–63.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Peterson, Sarah Dryden. (2016). Refugee education: the crossroads of globalization. *Educational Researcher*, 45(9), 473–482.

Phillips, D. C. (1995). The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. *Educational researcher*, 24(7), 5-12.

Ploeg, P. van der. (2013). The Dalton Plan: Recycling in the guise of innovation. *Paedagogica Historica*, *49*(3), 314–329.

Ploeg, Piet van der. (2013) The Dalton Plan: Recycling in the guise of innovation. *Paedagogica Historica*, 49:3, 314-329, DOI: 10.1080/00309230.2012.725840

Pohlmann, Markus., & Lim, Hyun-Chin. (2014). A new "spirit" of capitalism? – Globalization and its impact on the diffusion of neoliberal management thinking in Germany and the East Asian economies. *Development and Society*, 43(1), 1-32.

Pranoto, H. S. H. S. (2018). *History of the organizational structure of pesparani/pesparawi: how choral music helped promote unity*

in Indonesia. https://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu%3A653491/.

Pridmore, J. (2009). The poet's school and the parrot's cage: The educational spirituality of Rabindranath Tagore. *International Journal of Children's Spirituality*, *14*(4), 355–367. https://doi.org/10.1080/13644360903293572.

Pucciarelli, Francesca., & Kaplan, Andreas. (2016). Competition and strategy in higher education: Managing complexity and uncertainty. *Business Horizons*, 59(3), 311-320.

Purwoko, Dwi. (1994). Semangat Tamansiswa dan perlawanannya terhadap undang-undang sekolah liar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 1(2): 125-135.

Pusser, B. (2018). The state and the civil society in the scholarship of higher education. *In handbook on the politics of higher education*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi: https://doi.org/10.4337/9781786435026.00008.

QS University Rankings. (2019). https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

Quynh, Anh Le. (2016).The Impact of Globalisation on the Reform of Higher Education in Vietnam. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 1(1), 29-35.

Raharjo, Sabar Budi. (2014). Contribution of eight national education standards towards learning achievement. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 470-481.

Rajesh, M. (2015). *Revolution in communication technologies: impact on distance education*. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 16(1), 62-88.

Ramirez, Al. (2019). Democracy in action and the creation of Colorado's school finance gordian knot. *Educational Policy*, 33(5), 687–701.

Rautalin, Marjaana., Alasuutari, Pertti., & Vento, Eetu. (2019). Globalisation of education policies: does PISA have an effect? *Journal of Education Policy*, 34(4), 500-522.

Rode, Martin., & Gwartney, James D. (2012). Does democratization facilitate economic liberalization? *European Journal of Political Economy*, 28(4), 607-619.

Rosser, Andrew. (2016). Neo-liberalism and the politics of higher education policy in Indonesia. *Comparative Education*, 52(2), 109-13.

Roy N.C., & Biswas, D. (2017). Management of human resources during pre and post-globalized regime: an empirical study in tea industry of North Bengal. *Journal of Tea Science Research*, 7(9), 46-51.

Rushubirwa, Leonce., Ndimande-Hlongwa, Nobuhle., & Mkhize, Nhlanhla. (2015). Globalization, Migration, and Local communities, one adverse upshot: a case review of xenophobia in ethekwini municipality, Durban, KZN, South Africa. *Journal of Social Development in Africa*, 30(1), 97-120.

Saepuloh, Dadang., Suherman, Agus. (2018). Analisis penyebab angka putus sekolah dan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kota Tangerang. *Jurnal Kajian Dan Karya Ilmiah,* 18 (2), 74-87.

Saharudin, Muhammad Dhiyauddin. (2021). The Role of Academic Administration in Higher Education in Malaysia. *International Journal of Management, Sciences, Innovation, and Technology*, 2(2), 16-21.

Salifou, K. Coulibaly., & Cao, Erbao, T. (2018). Metuge Mekongcho, Economic globalization, entrepreneurship, and development. *Technological Forecasting and Social Change*, 127(1), 271-280.

Salloum, S. A., Al-Emran, M., Monem, A. A., & Shaalan, K. (2018). Using text mining techniques for extracting information from research articles. In K. Shaalan, A. E. Hassanien, & F. Tolba (Eds.), *Intelligent natural language processing: trends and applications* (pp. 373–397). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67056-0_18

Saltman, Kenneth J., & Means, Alexander J. (2019).*The wiley handbook of global educational reform*. USA: Wiley Blackwell.

Samimi P, Jenatabadi H.S. (2014). Globalization and economic growth: empirical evidence on the role of complementarities. *Plos One*, 9(4), 1-7.

Saputra, Yulianta. (2020).Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan kualitas

sekolah eks RSBI. *Justisi*, 6(1), 46-57. https://doi.org/10.33506/js.v6i1.776.

Sari, N., & Faiz, N. (2021). Internationalisation of higher education: the activity – process approach at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. *Indonesian Journal of Educational Research and Technology*, 1(1), 7-10.

Sarker, Kanchan. (2015). Neoliberalism, GATS, and higher education in India: Moving away from its original objectives. *New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry*, 7(2), 13-27.

Sartika, Ratu Ayu Dewi. (2012). Penerapan komunikasi, informasi, dan edukasi gizi terhadap perilaku sarapan siswa sekolah dasar. *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(2), 76-82.

Sassen, Saskia. (2021). How to theorize globalization: a comment. *Globalizations*, 18(5), 792-793.

Saturnino, M. Borras Jr., Tsegaye Moreda, Alberto Alonso-Fradejas & Zoe W. Brent (2018). Converging social justice issues and movements: implications for political actions and research. *Third World Quarterly*, 39(7), 1227-1246, DOI: 10.1080/01436597.2018.1491301.

Sayidah, Nur., Ady, Sri Utami., Supriyati, Jajuk., Sutarmin, Sutarmin., Winedar, Mestika., Mulyaningtyas, Alvy., Assagaf, Aminullah. (2019). Quality and university governance in Indonesia. *International Journal of Higher Education*, 8(4), 10-17.

Sedgwick, S. (2007). *The reception of Kant's critical philosophy: Fichte, Schelling, and Hegel*. Cambridge University Press.

Selvaraj, Grapragasem., Anbalagan, Krishnan., & Norhaini, Mansor Azlin. (2014). Current trends in Malaysian higher education and the effect on education policy and practice: an overview. *International Journal of Higher Education*, 3(1), 85-93.

Shun, Wing Ng. (2012). Rethinking the mission of internationalization of higher education in the Asia-Pacific region. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 42(3), 439-459. doi: 10.1080/03057925.2011.652815.

Silvanto, Sari., Ryan, Jason., & Gupta, Vipin. (2017). A study of the impact of business education on global career mobility an

analysis of location and international orientation. *Journal of International Education in Business*, 10(1), 31-48.

Silverman, D. (2020). *Qualitative research*. SAGE.

Slamet, P.H. (2016). Konstribusi kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 35(3), 301-311.

Slamet, P.H. (2011). Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala Pendidikan*. 30(2), 189-203.

Slamet, P.H. (2014). Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21. *Cakrawala Pendidikan*, 33(3), 324-337.

Slamet, P.H. (2019). *Melesatkan mutu pendidikan tinggi di era terpori*. Disampaikan pada Acara Pelepasan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Akademik Guru Besar pada Tanggal 16 April 2019 di Ruang Sidang Utama Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta.

Smith, C. A. (2017). China as the Leader of the Weak and Small: The Ruoxiao Nations and Guomindang Nationalism. *Cross-Currents: East Asian History and Culture Review*, *6*(2), 530–557. https://doi.org/10.1353/ach.2017.0018

Solomou, Nicolaidou, G., Petros, P. (2016). An effective school autonomy model. *The International Journal of Educational Management*, 30 (5), 718-734.

Stemler, S. (2012). An overview of content analysis. *Practical Assesment Research and Evaluation*, 7(17), 1-10.

Stiglitz, Joseph, E. (2017).The overselling of globalization. *Business Economics*, 52(3), 129–137.

Stracke, Christian M. (2019). Quality frameworks and learning design for open education. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 20(2), 181-203.

Streeten, Paul. (1999). Globalization and its impact on development co-operation. *Development*, 42(3), 9–15.

Sujati, B., & Haq, I. H. (2020). Gerakan perempuan di jawa (1912-1941). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, *2*(1), 16–31.

Sunu, Anton Pratomo. (2020). Perdagangan internasional sebagai aspek kedua dan ketiga dari power. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR*), 2(1), 3-17.

Supardi, S., Kuntoro, S. A., & Dwiningrum, S. I. A. (2018). Ki Hadjar Dewantara and Rabindranath Tagore's thought about education. *Journal of Social Studies (JSS)*, *14*(1), 48–62. https://doi.org/10.21831/jss.v14i1.21653

Suparmin. (2018). Kajian kritis terhadap standarisasi pendidikan di Indonesia. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 154-161.

Suprastowo, Philip. (2014). Kontribusi bantuan siswa miskin terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2): 149 -172.

Suroto. (2014). Kebijakan pembangunan pendidikan nasional Indonesia dan kendala yang dihadapi sebagai upaya perbaikan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang baik dan cerdas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), 495-499.

Suryadi, Ace. (1992). *Improving the educational quality of primary school*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suryahadi, Asep., Izzati, Ridho Al., & Suryadarma, Daniel. (2020). *The impact of covid-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia*. Jakarta: The Smeru Research Institute.

Susilo, S. V. (2018). Refleksi nilai-nilai pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam upaya mengembalikan jati diri pendidikan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendas*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.31949/jcp.v4i1.710.

Suwignyo, A. (2013). The great Depression and the changing trajectory of public education policy in Indonesia, 1930-42. *Journal of Southeast Asian Studies*, *44*(3), 465–489.

Suyahman. (2016). Analisis kebijakan pendidikan gratis di sekolah menengah atas dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan menengah atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.

Syahril, Iwan. (2016). The Indonesian teacher certification policy: a case study of policy sense-making. *Dissertation*. U.S.A: Michigan State University.

Symaco L.P., & Tee M.Y. (2019). Engaging forms of ASEAN higher education: regionalism and governance. *In: Jarvis D., Mok K. (eds) Transformations in higher education governance in asia. Hhigher education in asia: quality, excellence and governance*. Singapore: Springer.

Tam, M. (2000). Constructivism, instructional design, and technology: implications for transforming distance learning. *Educational Technology and Society*, 3(2), 78-89.

Taubman, Antony., Wager, Hannu., & Watal, Jayashree. (2020). *A handbook on the wto trips agreement*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Teik, Khoo Boo., & Takeshi, Onimaru. (2016). Introduction: A place for networks in Asian politics. *Southeast Asian Studies*, 5(1), 3-17.

Tella, Oluwaseun. (2018). South African higher education: the paradox of soft power and xenophobia. In: Akinola A. (eds) *The political economy of xenophobia in africa. Advances in African economic, social and political development*. Springer, Cham

Tidjani, A. (2017). Manajemen lembaga pendidikan islam menghadapi tantangan globalisasi. *Reflektika*, 12(1), 96-133.

Tight, Malcolm. (2021). Globalization and internationalization as frameworks for higher education research. *Research Papers in Education*, 36(1), 52-74.

Tikhonov, V. (2018). Demystifying the Nation: The Communist Concept of Ethno-Nation in 1920s–1930s Korea. *Cross-Currents: East Asian History and Culture Review*, *7*(2), 474–503. https://doi.org/10.1353/ach.2018.0017

Torres, Bravo, C. C. (2019). The role of the European Union on immigration. An anthropological approach to the treaties that have been carried out in Europe in order to manage diversity. *Region*, 6(1), 45-53. doi: 10.18335/region.v6i1.262.

Towaf, Siti Malikhah. (2016).The national heritage of Ki Hadjar Dewantara in Tamansiswa about culture-based education and learning. *Journal of Education and Practice*, 7(23), 167-176.

Townsend, T. (2011). Searching high and searching low, searching east and searching west: looking for trust in teacher education. *Journal of Education for Teaching*, 37(4), 483–499.

Trilling, D., & Jonkman, J. G. F. (2018). Scaling up content analysis. *Communication Methods and Measures*, 12(2–3), 158–174.

Tschurenev, J. (2017). Women, early childhood education, and global reform movements: new perspectives on colonial and national education in India. *Südasien-Chronik-South Asia Chronicle*, *7*(1), 425–448.

Tsuchiya, Kenji. (1975).The Tamansiswa movement — Its early eight years and Javanese background. *Journal of Southeast Asian Studies*, 6(2), 164-177.

Tsuchiya, Kenji. (2019). *Demokrasi dan kepemimpinan: Kebangkitan gerakan tamansiswa*. Jakarta: Balai Pustaka & Kepustakaan Populer Gramedia.

UNESCO. (2018) *Accountability in education: Global education monitoring report 2017–18*.Paris, UNESCO. http:// unesdoc. unesco.org/images/0025/002593/ 259338e.pdf (Accessed 24 September 2019).

UNESCO. (2019a). *New methodology shows that 258 million children, adolescents and youth are out of school*. *UIS Fact Sheet*, No. 56 | September 2019.

UNESCO. (2019b).*The 2018 Global Education Meeting (GEM 2018*). Brussels: Government of Belgium.

UNESCO. (2019c).*The United Nations world water development report 2019: Leaving no one behind*. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Usmar, Ali. (2018). Kajian sosial, budaya dan kebijakan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 Tantang Sistem Pendidikan Nasional). *Al-Ashlah*, 2(2), 143-163.

Van Gaalen, A., & Gielesen, R. (2016). Internationalisation at home. *In global and local internationalization. Leiden, the*

Netherlands: Brill | Sense. Retrieved Jul 12, 2020, from https://brill.com/view/book/edcoll/9789463003018/BP000021.xml.

Varghese, N.V. (2008). *Globalization of higher education and cross-border student mobility*. Paris: International Institute for Educational Planning.

Varghese, N.V. (2013). Globalization and higher education: Changing trends in cross border education. *Analytical Reports in International Education*, 5(1), 7-20.

Verger, A., Lubienski, C.G., & Steiner-Khamsi. (2016).The emergence and structuring of the global education industry: Towards an analytical framework. *In Verger, A., C. Lubienski, G. Steiner-Khamsi (eds). World Yearbook of Education 2016: The Global Education Industry*. New York: Routledge.

Verma, R. (2005). Rabindranath Tagore's Influence on the Indonesian nationalist educational movements of 1920s and 1930s: Ki Hadjar Dewantara and The Tamansiswa. *Proceedings of the Indian History Congress*, 66, 1283-1289. Retrieved July 7, 2020, from www.jstor.org/stable/44145940.

Volk, C. (2016). Towards a critical theory of the political: Hannah Arendt on power and critique. *Philosophy & Social Criticism*, 42(6), 549–575.

Von Glasersfeld, E. V. (1994). A radical constructivist view of basic mathematical concepts. Constructing mathematical knowledge: Epistemology and mathematics education, 76(1), 215-225.

Vrielink, Oude, R.A., Jansen, E.A., & Hans, E.W. (2017). Practices in timetabling in higher education institutions: a systematic review. *Annals of Operations Research*, 275(1), 145–160.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Waag-Cowling, N. van der, & Leenen, L. (2019). *ICCWS 2019 14th International Conference on Cyber Warfare and Security: ICCWS 2019*. Academic Conferences and publishing limited.

Wahono, F, (2001). *Kapitalisme pendidikan antara kompetisi dan keadilan*. Yogyakarta: Insist-Cindelaras-Pustaka Pelajar.

Walmsley, T., & Winters, L. (2005). Relaxing the restrictions on the temporary movement of natural persons: A simulation analysis. *Journal of Economic Integration*, 20(4), 688-726.

Walter, Stefanie. (2010). Globalization and the welfare state: testing the microfoundations of the compensation hypothesis. *International Studies Quarterly*, 54(2), 403–426.

Wang J. (2018). *Challenges from globalisation. In: conceptualizing copyright exceptions in China and South Africa*. China-EU Law Series, vol 6. Springer, Cham.

Wang, D. (2019). Opportunities, challenges and strategies for the *internationalization development of higher vocational education in the new situation. Creative Education*, 10(1), 2174-2185.

Wang, Y., Chan, R.K.H. (2015). Autonomy and control: the struggle of minban schools in China. *International Journal of Educational Development*, 45(11), 89-97.

Wardani, K. (2010). *Peran guru dalam pendidikan karakter menurut konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara*. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI, Bandung.

Welch, Anthony. (2012). China-ASEAN relations in higher education: an analytical framework. *Frontiers of Education in China*, 7(4), 465–485.

Whitty, Geoff., & Power, Sally. (2000). Marketization and privatization in mass education systems, *International Journal of Educational Development*, 20(2), 93-107.

Whyte, M. K. (1974). Educational Reform: China in the 1970s and Russia in the 1920s. *Comparative Education Review*, *18*(1), 112–128. https://doi.org/10.1086/445759

Wilkins, Andrew. (2015).Professionalizing school governance: the disciplinary effects of school autonomy and inspection on the changing role of school governors. *Journal of Education Policy*, 30(2), 182-200.

William, Yat Wai Lo., & Chang, Da Wan. (2021). Revisiting the Asian regulatory regimes in transnational education: how local politics (re)oriented higher education policy in Malaysia,

Singapore and Hong Kong. *Policy Reviews in Higher Education*, DOI: 10.1080/23322969.2020.1869064.

Willis, Jessica. (2019). Technology in the classroom: Digital revolution or disruption? *Independent Educa*tion, 49(2), 22-233.

Winarno, Budi. (2004). *Globalisasi wujud imprealisme baru*. Yogyakarta: Tajidu Press.

Winarno, Jaka. (2006). Globalisasi dan liberalisasi pendidikan. *Unisia*, 60(2), 186-193.

Winters, L.A., Walmsley, T.L., Wang, Z.K., & Grynberg, R. (2003), Liberalising temporary movement of natural persons: An agenda for the development round. *World Economy*, 26(1), 1137-1161. doi:10.1111/1467-9701.00566.

Woessmann, Ludger. (2016).The importance of school systems: Evidence from international differences in student achievement. J*ournal of Economic Perspectives*, 30(3), 3-32.

Woods, Orlando., & Kong, Lily. (2020).The spatial subversions of global citizenship education: Negotiating imagined inclusions and everyday exclusions in international schools in China. *Geoforum*, 112(1), 139-147.

World Bank. (1999). *Decentralization briefing notes*. New York: WBI Working Papers.

World Bank. (2006). *World development report – equity and development*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2019). *World Development Report 2019*. Washington, DC: World Bank.

Wu, H. (2019). Three dimensions of China's "outward-oriented" higher education internationalization. *Higher Education*, 77(1), 81–96.

Xu, Aymeric. (2021).*From culturalist nationalism to conservatism*. Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Xue-xin, He. (2007). On the strategy of the opening of education in China in the process of the educational globalization. *Theory and Practice of Education*, 23(1), 40-53.

Yang, Hayhoe Ruth. (2014). Responses to internationalization and indigenization. *Frontiers of Education in China*, 9(2), 163–187.

Yohana, N. (2017). Konsepsi pendidikan dalam keluarga menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Hasan Langgulung. *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, *1*(2), 126–145.

Yudice, G. (2018). *The globalization of culture and the new civil society. In cultures of politics politics of cultures: re-visioning Latin American social movements*. Taylor and Francis.

Yulia, V. Nadtochy., Elena, N. Klochko., Marina, V. Danilina., Lira, K., Gurieva, Ruslan I., Bazhenov, & Vladimir. V. Bakharev. (2016). Economic factors and conditions for the transformation of the education services market in the context of globalization. *International Review of Management and Marketing*, 6(1), 33-39.

Yuliantoro, Dwi Agus. (2016). Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) court case and contesting visions of Indonesian national identity. *Dissertation*. U.S.A: Michigan State University.

Zaini Tamin, AR, et.al (2018). *Politik pendidikan: konsep dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.

Zhang, X., & Huang, A. Z. (2018). Research on the international education path for Chinese standard going global. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 18(6), 2652-2660.

Zhang, Y., Wildemuth, B.M. (2009). Qualitative Analysis of Content. In B. WIldemuth (ed.). Applications of Social Research Methods to Questions in Informaation and Library Science. Wesport CT: Libraries Unlimited.

Ziguras, Christopher. (2003).The impact of the GATS on transnational tertiary education: Comparing experiences of New Zealand, Australia, Singapore and Malaysia. *The Australian Educational Researcher*, 30(3), 89-109.

Zulkifli, M. (2014). Globalisasi komunikasi dalam hubungannya dengan pendidikan di Indonesia. *Al-Munzir*, 7(2), 139-161.

PENULIS

Teguh Triwiyanto. Assosiate professor di Universitas Negeri Malang. Lahir di Slawi (Tegal), beristri Hera Idris dengan dikarunia tiga anak (Nevatera, Eikasia, & Langit). Penulis menyelesaikan pendidikan SDN 3 Kedungbanteng, SMP Negeri 1 Pangkah dan SMA Negeri 2 Slawi di Kabupaten Tegal. Setelah itu melanjutkan program studi jenjang S1, S2, dan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta pada Program Studi ManajemenPendidikan. Selama kuliah aktif mengajar dan terlibat di kegiatan intra serta ekstra kampus. Menjadi Ketua Umum BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Sekretaris Umum Cabang PMII Sleman. Saat ini mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pernah mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat Kepala Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Malang, kepala laboratorium jurusan, dan sekretaris jurusan. Terlibat dalam program USAID DBE1 dan USAID Prioritas sebagai STTA Consultant, pengelola di Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan (JMSP), Pusat Sumber Daya Manajemen Berbasis Sekolah (PSDMBS) Universitas Negeri Malang, peneliti utama pada Indonesian Presidential Studies, dan pengurus ADP IKAPMII. Penulis dapat dihubungi dan disapa melalui surel: teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id.

Karya penulis berupa buku: *Teori Belajar* (Erlangga, 2023) *Kepemimpinan Pembelajaran Berbasis Budaya* (bersama Tim, PT RajaGrafindo Persada, 2022), *Landasan Filosofis Kebutuhan Siswa dalam Implementasi Merdeka Belajar* (bersama Nurul Ulfatin PT RajaGrafindo Persada, 2022) *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Keguruan & Pendidikan* (bersama Nurul Ulfatin, Erlangga, 2021), *Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia* (Kompas, 2021), *Gelombang Liberalisme Pendidikan Mengawal Tata Kelola Pendidikan Untuk Rakyat* (Kompas, 2019), *Manajemen Hubungan Sekolah Masyarakat*

(UMPress, 2019) *Model Perkuliahan Berbasis Kehidupan Melalui Penerapan Pendidikan Hadap Masalah* (UMPress, 2018), *Panduan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah* (UMPress, 2018), *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan* (bersama Nurul Ulfatin, Rajagrafindo Persada, 2016), *Manajemen Kurikulum & Pembelajaran (*Bumi Aksara*, 2015), Audit Manajemen Pendidikan* (UMPress, 2015), *Pengantar Pendidikan* (Bumi Aksara, 2014), *Hakikat Manusia, Aliran-Aliran, Sistem, Layanan, & Persoalan Pendidikan* (UMPress, 2014), *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* (UMPress, 2014), dan *Panduan Menglola Sekolah Bertaraf Internasional* (Arruz Media, 2010).

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
UM
The Learning University

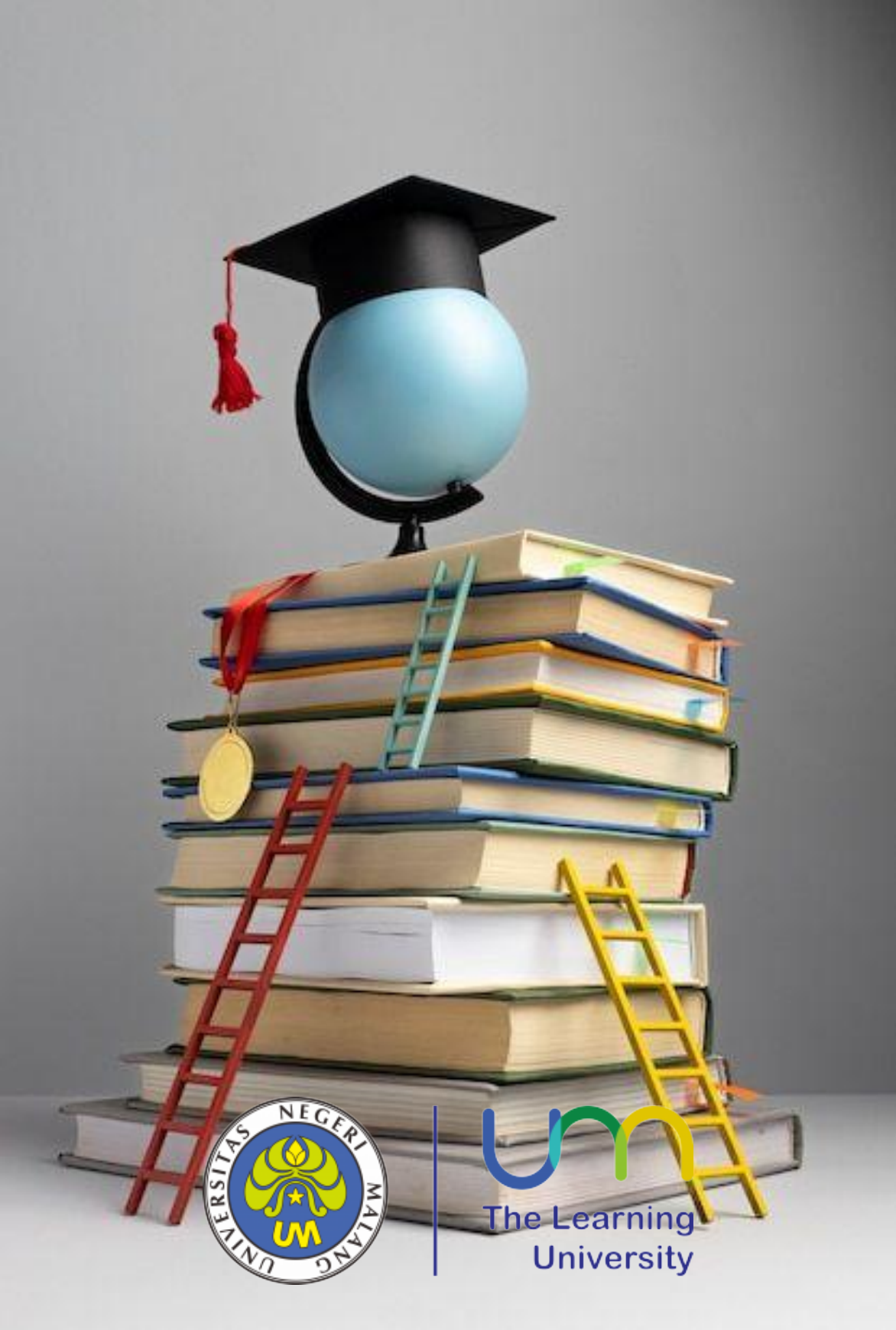
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
The Learning University